



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2019 - 2024



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo**



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 153.1 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

ke

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo

A

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 142), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 24a, angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dihapus
5. Instansi vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diderahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Ar

Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat.
15. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten atau kota atau desa, dunia usaha atau investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

18. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
19. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
21. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 24A. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu kegiatan.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
31. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
34. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

36. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
38. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda, yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil dan dampak.
40. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
41. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
42. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari Pencapaian hasil beberapa program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
44. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
46. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
47. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

48. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
 49. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 50. Provinsi atau Kabupaten atau Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
 51. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
 2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD;
 3. Lampiran III : Renstra Inspektorat;
 4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan;
 6. Lampiran VI : Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan dan

- Kawasn Permukiman;
8. Lampiran VIII : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Lampiran IX : Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 10. Lampiran X : Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 12. Lampiran XII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 15. Lampiran XV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perhubungan;
 17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 20. Lampiran XX : Renstra Dinas Perikanan;
 21. Lampiran XXI : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 22. Lampiran XXII : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
 23. Lampiran XXIII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 24. Lampiran XXIV : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 25. Lampiran XXV : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 26. Lampiran XXVI : dihapus
 27. Lampiran XXVII : dihapus
 28. Lampiran XXVIII : Renstra Kecamatan Majauleng;
 29. Lampiran XXIX : Renstra Kecamatan Sabbangparu;
 30. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Tanasitolo;
 31. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Bola;
 32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Pammana;
 33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Pitumpanua;

- 34. Lampiran XXXIV : Kecamatan Takkalalla;
- 35. Lampiran XXXV : Kecamatan Tempe;
- 36. Lampiran XXXVI : Kecamatan Belawa;
- 37. Lampiran XXXVII : Kecamatan Maniangepajo;
- 38. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Gilireng;
- 39. Lampiran XXXIX : Kecamatan Keera;
- 40. Lampiran XL : Kecamatan Penrang; dan
- 41. Lampiran XLI : Kecamatan Sajoanging

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman PD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022, Rencana Kerja PD Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 1 November 2021

BURATI WAJO,
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 53

TELAH DITELITI
DIREKSI BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIELVIRA FAJASWATI S.H.
NIP. 19840118 200601 2 010

KATA PENGANTAR

Pembangunan pendidikan dan Kebudayaan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompetensi, dan daya saing dalam era globalisasi. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan program yang realistis dan terarah dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Periode Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Wajo, disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 dengan pertimbangan capaian pembangunan pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan dasar dan pedoman bagi pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Program Kegiatan Pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Laporan tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kependidikan dan kebudayaan di lingkup Kabupaten Wajo.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Sengkang,

2021



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4. Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo	I - 11
2.2. Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.....	II - 74
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo	II - 77
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo	II -143
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN WAJO	III -160
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.....	III -160
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2024 Kabupaten Wajo.....	III-164
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD.....	III-176
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD	III-180
3.5. Penentuan Isu-isu strategis	III-181
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-183
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	IV-183
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-186
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-192
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	VI-192
6.2. Pendanaan indikatif.....	VI-217

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-252
BAB VIII PENUTUP	VIII-286
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.....	II - 39
---	----------------

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, dan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	I - 40
Tabel II. 2.	Jumlah Tenaga NON PNS SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	I - 74
Tabel II. 3.	Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	II - 75
Tabel II. 4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo.....	II - 78
Tabel II. 5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kab Wajo.....	II -142
Tabel II. 6.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Dan Renstra K/L.....	II -146
Tabel II. 7.	Hasil Telaah Pola Ruang / Wilayah Kabupaten Wajo.....	II -147
Tabel II. 8.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Wajo	II -154
Tabel II. 9.	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Wajo	II - 159
Tabel II. 10.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	II - 99
Tabel III. 11.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.....	II -162
Tabel III. 11.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	II -168
Tabel III. 12.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	

	Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	I -177
Tabel III. 13	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III -180
Tabel III. 14	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III -180
Tabel III. 15	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	III -181
Tabel III. 16	Nilai Skala Kriteria.....	III -181
Tabel III. 17	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis	III - 182
Tabel IV. 18	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	VI -184
Tabel V. 19	Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Pokok	VI -187
Tabel V. 20	Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perubahan Renstra.....	VI -189
Tabel VI. 21	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.....	VI -218
Tabel VI. 22	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.....	VI -228
Tabel VII. 23	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2020 (pokok) serta Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 (Perubahan) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	VI -253
Tabel VII. 24	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.....	VI -257
Tabel VII. 25	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2024 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	VI -258

Tabel VII. 26 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penetapan Target Indikator SPM Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024 (Permendagri No.100 Tahun 2018).....	I -260
Tabel VII. 27 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2021- 2024.....	VI -261

DAFTAR ISTILAH

BOP	:	Biaya Operasional Pendidikan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
Disdikbud	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.	:	Kabupaten
Kec.	:	Kecamatan
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Lakip	:	Laporan Akun tabilitas Instansi Pemerintah
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PP	:	Peraturan Pemerintah
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RKB	:	Ruang Kelas Baru
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah	:	
RTRW	:	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	:	Sekolah Dasar
Sisdiknas	:	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	:	Sanggar Kegiatan Belajar
SKPD	:	Satuan Kerja Pemerintahan Daerah
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
Tendik	:	Tenaga Pendidik
TK	:	Taman Kanak-Kanak
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang-Undang

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WAJO NOMOR 142 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
WAJO



BAB I **PENDAHULUAN**

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan



Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Olehnya itu, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berkewajiban menyusun Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 melalui beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan: (a) Persiapan penyusunan dan penyusunan Rancangan Awal Renstra; (b) Penyusunan Rancangan Renstra; (c) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; (d) Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan (e) Penetapan Renstra, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

Penyusunan rancangan perubahan Renstra dimaksud, mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penalaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan akhir RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,



lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan akhir RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan perubahan (Revisi) Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi



- Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan (revisi) Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam penyusunan perubahan (revisi) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024, memperbaharui perencanaan terkait tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan keuangan daerah serta program prioritas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindaklanjut evaluasi terhadap hasil Renstra dan percepatan penanganan pandemi Covid-19.



1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan (revisi) Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sejalan dengan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
2. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2022-2024;
3. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi;
7. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana Strategis dan tahunan daerah;
8. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; dan
9. Menetapkan Kebijakan Pemerintah Jangkah Menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir perubahan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019–2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang



telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang terkait dengan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, menelaah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah provinsi, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Wajo dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan



operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan.

BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo.

BABVIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo dan Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

2.1.1. Kepala Dinas

1) Tugas

Memimpin, merumuskan kebijakan umum dan teknis, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan.

2) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dinas;
- b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- c. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

3) Tugas Pokok

- a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. Memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan dinas dilingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- d. Menetapkan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program serta perencanaan strategis pendidikan anak



usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kabupaten sesuai dengan kebijakan dan perencanaan strategis pendidikan nasional;

- e. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Melaksanakan peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada bagian terkait dalam sekretariat daerah;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Sekretariat

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.

2) Fungsi

- a. Penyusunanke bijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan,pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

3) Tugas Pokok

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;



- d. Mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan program kerja, anggaran dan pelaporan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pembinaan ketenagaan serta kebudayaan;
- i. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- j. Melaksanakan urusan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perjalanan dinas serta keprotokolandi lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- k. Menilai prestasi kerja kepala sub bagian sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas

Melaksanakan pelayanan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi umum lainnya.

2) Fungsi

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan umum bidang kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan kepegawaian;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain oleh sekretaris baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan rencana program kerja di sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dengan fasilitasi bantuan hukum;
- e. Melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, cuti, izin/tugas belajar, mutasi, kartu pegawai, karsu/karis, taspen, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- g. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dan pengembangan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
- l. Menyusun laporan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.2.2. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

1) Tugas

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan capaian kinerja.

2) Fungsi

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi sub bagian perencanaan dan pelaporan.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan rencana program kerja, rencana anggaran di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas pendidikan dan kebudayaan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pokok dan Perubahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Menyusun data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;



- k. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- l. Menyusun laporansub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2.3. Kepala Sub bagian Keuangan

1) Tugas pokok

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian keuangan dan barang milik daerah.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan program kerja di sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- d. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- e. Menelaah laporan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan



pengembangan karir;

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusandan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan



- pendidikan nonformal; dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
- f. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan anak usia dini
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - l. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

1) Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



- b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. Melaksanakan analisis hasil belajar peserta pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait kurikulum dan penilaian;
- l. Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

1) Tugas pokok

Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka



pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;

d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.

3) Tugas Pokok

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

d. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

e. Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

f. Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;

i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

j. Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.3.3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

1) Tugas

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Fungsi

a. Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

b. Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;



- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait peserta didik;
- g. Menyusun laporan seksi peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah dasar;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah dasar; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah.



3) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Dasar;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- j. Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan sekolah dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- m. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.4.1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

1) Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
- d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Dasar;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- g. Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada Sekolah Dasar;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- l. Menelaah laporan pengawas Sekolah Dasar terkait kurikulum dan penilaian;
- m. Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.4.2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

1) Tugas

Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data kelembagaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- f. Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- g. Memantau dan mengevaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- j. Menelaah laporan pengawas sekolah dasar terkait kelembagaan, sarana dan prasarana;
- k. Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.4.3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

1) Tugas

Melaksanakan pembinaan kesiswaan dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Menelaah laporan pengawas Sekolah Dasar terkait peserta didik dan pembangunan karakter;
- g. Menyusun laporan seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

1) Tugas pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.



2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama; dan
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

3) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- h. menengah pertama sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- i. Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

1) Tugas

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- d. Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Menengah Pertama;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait kurikulum dan penilaian;
- l. Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;



- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.2. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana

1) Tugas pokok

Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Memantau dan mengevaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- j. Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait kelembagaan, sarana dan prasarana;
- k. Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah



menengah pertama;

- I. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

1) Tugas

Melaksanakan pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait peserta didik dan pembangunan karakter;
- g. Menyusun laporan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.6. Kepala Bidang Kebudayaan

1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kebudayaan;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahanperumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. Menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan



kesenian;

- l. Memantau dan mengevaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan kebudayaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- n. Menyusun laporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.1. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

1) Tugas

Memelihara situs cagar budaya, menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan penyimpanan benda purbakala di museum.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi cagar budaya dan permuseuman.

3) Tugas pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;



- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. Memantau dan mengevaluasi satuan Cagar Budaya dan Permuseuman;
- i. Menyusun laporan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6.2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi

1) Tugas

Menanamkan nilai sejarah dan melaksanakan pelestarian nilai tradisi yang berkembang di daerah.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi Sejarah dan Tradisi;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi sejarah dan tradisi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi sejarah dan tradisi;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi sejarah dan tradisi..

3) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Memantau dan mengevaluasi satuan sejarah dan tradisi;
- h. Menyusun laporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.6.3. Kepala Seksi Kesenian

1) Tugas

Melaksanakan pelestarian nilai seni yang berkembang didaerah.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi kesenian;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi kesenian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kesenian;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kesenian.

3) Tugas pokok

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Memantau dan mengevaluasi satuan kesenian;
- g. Menyusun laporan di bidang pembinaan kesenian;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

1) Tugas

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

2) Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan ketenagaan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan ketenagaan;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan.

3) Tugas Pokok



- a. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- c. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- e. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. Menyusun data base dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama;
- c. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan ketenagaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- h. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.7.1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

1. Tugas

Melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan nonformal.

2. Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Menyusun database di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- f. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- g. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan nonformal;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang



tugas;

- j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- k. Menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7.2 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

1) Tugas

Melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar.

3) Tugas Pokok

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- d. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- e. Menyusun data base di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- f. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan



- pendidikan sekolah dasar;
- g. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
 - h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
 - i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - k. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7.3 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

Pertama

1) Tugas

Melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- b. Pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
- d. Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar.

3) Tugas Pokok

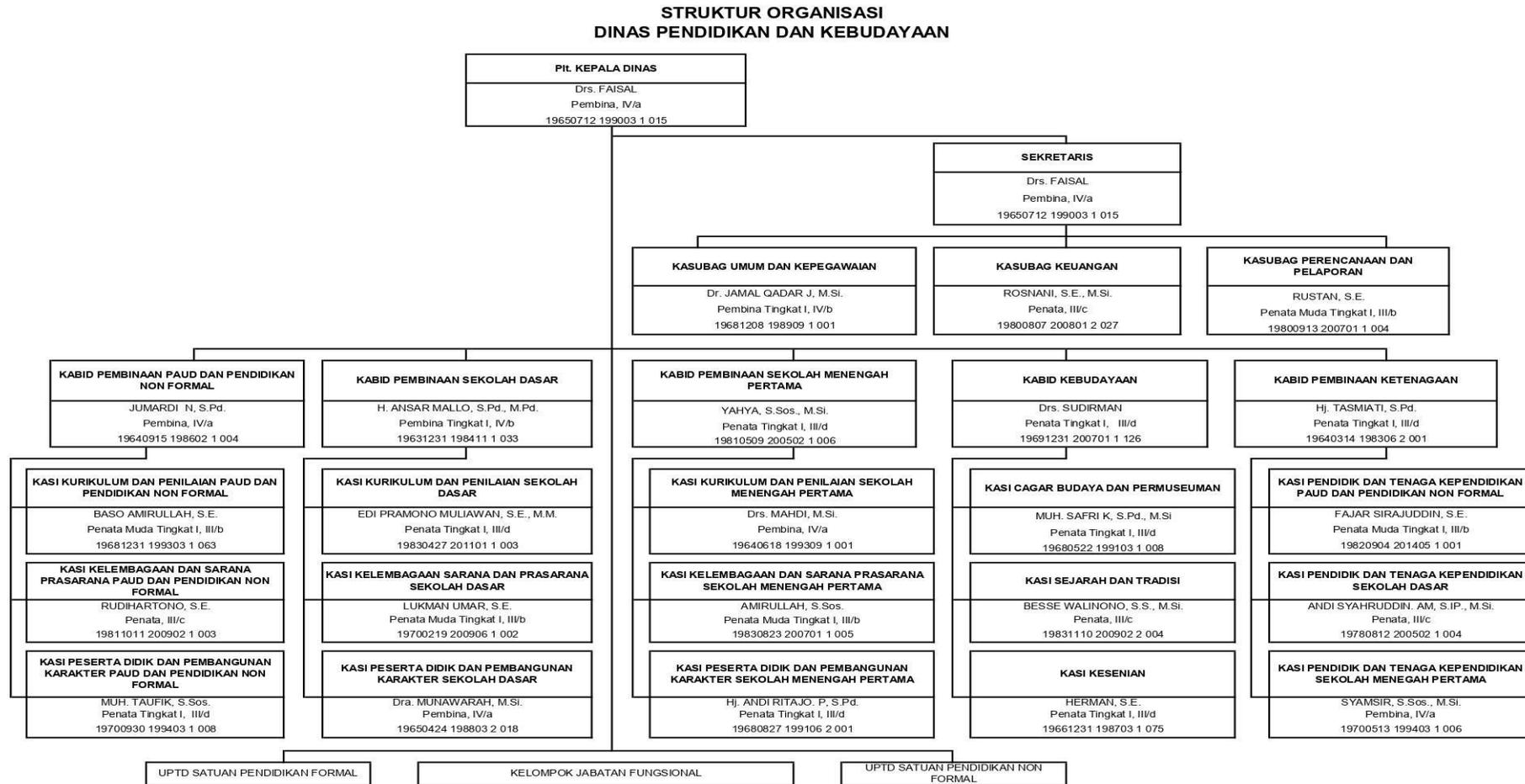
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan satuan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga



- kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - e. Menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - f. Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - g. Melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - k. Menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.2.1.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO



Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Nama	NIP	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan		Eselon	TMT CPNS	Masa Kerja Keseluruhan		Latihan Jabatan			Pendidikan Terakhir			Usia		Ket.
				Gol. Ruang	TMT	Nama	TMT			Thn	Bln	Nama	Bulan/Tahun	Jumlah Jam	Tingkat Ijazah	Nama	Lulus Thn	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Drs. FAISAL	19650712 199003 1 015	L	IV/b	01-10-2009	Kepala Dinas	08-07-2020	II.b	01-03-1990	31	06	Diklat PIM III	2010	360	S.1	Pendidikan Bahasa Dan Seni	1989	Tokampu	12-07-1965	
2	H. MAHMUD, S.Pd., M.Pd	19681231 198907 1 001	L	IV/b	01-10-2018	Sekretaris	08-07-2020	III.a	01-07-1989	31	11	Diklat PIM IV	2012	285	S.2	Pendidikan Ilmu Pengetahuan sosial	2005	Liu	31-12-1968	
3	H. ANSAR MALLO, S.Pd., M.Pd	19621231 198411 1 033	L	IV/b	01-10-2017	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	13-01-2020	III.b	01-11-1984	37	08	Workshop Pembinaan ASN	2017		S.1	Biologi	1999	Akkanpenng	31-12-1963	



4	YAHYA, S.Sos., M.Si	19810509 200502 1 006	L	III/d	01- 10- 2019	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13- 01- 2020	III.b	01-02- 2005	16	02	Diklat Pim IV	2015	825	S.2	Ilmu Administrasi	2013	Bala batu	09-05- 1981
5	ALAMS YAH TAHIR, S.Pd	19720822 199203 1 004	L	IV/a	01- 04- 2015	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	09- 07- 2020	III.b	01-03- 1992	29	03	Diklat Pim IV	2012	285	S.1	Administrasi Pendidikan	1997	Lompo	22-08- 1972
6	Drs. SUDIRM AN SABAN G	19691231 200701 1 126	L	III/d	01- 10- 2018	Kepala Bidang Kebudayaa n	28- 01- 2020	III.b	01-01- 2007	14	03	Diklat Pim IV	2012	285	S.1	Ilmu Administrasi Negara	1993	Pattiroso mpe	31-12- 1969
7	Hj. TASMIA TI. M, S.Pd	19640314 198306 2 001	P	III/d	01- 10- 2002	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaa n	13- 01- 2020	III.b	01-06- 1983	38	00				S.1	Pendidikan IPS	2011	Wajo	14-03- 1964
8	RUSTAN, SE	19800913 200701 1 004	L	III/c	01- 04- 2021	Kasubag. Umum dan Kepegawai an Pada Sekretariat	11- 01- 2021	IV.a	01-01- 2007	14	06	Penge mbang an Kompe tensi Penyus unan SPM	2020		S.1	Manajemen	2007	Baru Impa- Impa	13-09- 1980
9	EDI PRAMO NO MULIAW AN, S.E., M.M.	19830427 201101 1 003	L	III/d	01- 04- 2015	Kasubag. Perencana an dan Pelaporan Pada Sekretariat	11- 01- 2021	IV.a	01-01- 2011	10	03	Diklat Pim IV	2016	825	S.2	Magister Manajemen	2010	Ujung Pandang	11-05- 2006



10	ROSNA NI, SE	19800807 200801 2 027	P	III/d	01-04-2021	Kasubag. Keuangan Pada Sekretariat	13-01-2020	IV.a	01-01-2008	13	03	Diklat Manajemen ASN	2015	50	S.2	Ilmu Administrasi	2018	Wajo	07-08-1980
11	RUDI HARTO NO, S.E.	19811011 200902 1 003	L	III/c	01-04-2018	Kasi.kelem bagaan dan sarana prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Pend. Non Formal	28-01-2020	IV.a	01-02-2009	12	02				S.1	Manajemen	2010	Sengkan g	11-10-1981
12	MUH. TAUFIK, S. Sos	19700930 199403 1 008	L	III/d	01-04-2017	Kasi. Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan Pend. Non Formal	28-01-2020	IV.a	01-03-1994	27	01	Diklat Pim IV			S.1	Administrasi Negara	2002	Maddukk elleng	30-09-1970
13	MUHAM MAD ANIS SULTAN, S.Sos	19790104 200701 1 013	L	III/c	01-10-2015	Kasi. Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	11-01-2021	IV.a	01-01-2007	14	06	Worksh op PP No. 46 Tahun 2011	2013		S.1	Ilmu Administrasi Negara	2011	Sengkan g	04-01-1979
14	BASO AMIRUL LAH, S.E.	19681231 199303 1 063	L	III/b	01-10-2016	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SD	09-09-2020	IV.a	01-03-1993	28	03	Diklat Manajemen ASN	2015	50	S.1	Manajemen	2008	Bulu	12-31-1968



1 5	Dra. MUNAW ARAH, M.Si	19650424 198803 2 018	P	IV/a	01- 04- 2013	Kasi. Peserta Didik dan Pembangu nan Karakter Bidang Pembinaan SD	28- 01- 2020	IV.a	01-03- 1988	33	01	Adum	1999	250	S.2	Ilmu Administrasi	2012	Sengkan g	24-04- 1965	
1 6	LUKMA N UMAR, S.E	19700219 200906 1 002	L	III/c	01- 04- 2021	Kasi Kelembaga an Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SD	28- 01- 2020	IV.a	01-06- 2009	17	00				S.1	Manajemen Keuangan Perbankan	1997	Sengkan g	19-02- 1970	
1 7	Drs. MAHDI, M.Si	19640618 199309 1 001	L	IV/a	01- 10- 2009	Kasi. Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaaa n SMP	28- 01- 2020	IV.a	01-09- 1993	28	07	Diklat Pim III/Dikla t Pim IV	2007	360	S.2	Administrasi negara	2008	Sengkan g	18-06- 1964	
1 8	AMIRUL LAH, S.Sos	19830823 200701 1 005	L	III/c	01- 04- 2021	Kasi. Kelembaga an dan Sarana Prasarana Pada Bidang Pembinaan SMP	28- 01- 2020	IV.a	01-01- 2007	14	03	Diklat Teknis Pejabat Penata usahaa n Keuan gan	2015	60	S.1	Administrasi Negara	2002	Watallipu e	23/08/ 1983	



19	Hj. ANDI RITAJOP, S.Pd	19680827 1991062 001	P	III/d	01-10-2010	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Pada Bidang Pembinaan SMP	28-01-2020	IV.a	01-06-1991	29	10	Pelatihan Fungsi Penilik	2011		S.1	Ilmu Pendidikan	1985	Belawa	27-08-1968
20	BESE WALINO, S.S., M.Si	198311102009022 000	P	III/d	01-04-2021	Kepala Seksi Sejarah Dan Tradisi Pada Bidang Kebudayaan	14-02-2020	IV.a	01-02-2009	12	05				S.2	Ilmu Administrasi	2013	Wajo	10-11-1983
21	ANDI MUH. SAFRIK, S.Pd., M.Si.	19680522 1991031 008	L	III/d	01-04-2015	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman pada Bidang Kebudayaan	28-01-2020	IV.a	01-03-1991	30	02	Latpim Tk. IV	2016	-	S.2	Ilmu Komunikasi	2011	Sengkan g	22-05-1968
22	MUHAMMAD DIRGANTARA, S.E., M.Si	19730929 2011011 001	L	III/c	01-10-2018	Kasi Kesenian Pada Bidang Kebudayaan	11-01-2021	IV.a	01-01-2011	13	00	Prajabatan	2012	217	S.2	Ilmu Administrasi	2013	Wajo	29/09/1973
23	SYAMSIR, S.Sos, M.Si	19700513 1994031 006	L	IV/a	01-10-2018	Kasi PTK SMP Pada Bidang Pembinaan Ketenagaa n	28-01-2020	IV.a	01-03-1994	27	03	Diklat Manajemen Informasi Publik	2011		S.2	Ilmu Administrasi	2005	Jalang	13-05-1970



24	ANDI SYAHR UDDIN AM, S.IP.,M. Si	19780812 2005021 004	L	III/d	01-04-2021	Kasi PTK SD Pada Bidang Pembinaan Ketenagaa n	28-01-2020	IV.a	01-02-2005	16	02	Latpim Tk. IV	2017	585	S.2	Ilmu Administrasi	2016	Sengkan g	12-08-2018	
25	FAJAR SIRAJU DDIN, SE	19820904 2014051 001	L	III/c	01-04-2021	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal Pada Bidang Pembinaan Ketenagaa n	28-01-2020	IV.a	01-05-2014	7	01				S.1	Ekonomi Manajemen Keuangan dan Perbankan	2005	Wajo	04-09-1982	
26	MADE AMIN	19641231 1984111 011	L	II/d	01-10-2014	Pramu Kebersihan Pada Subag. Umum dan Kepegawai an	01-01-2018	-	01-11-1984	36	04	Prajab atan	1985	-	SLTA	SMA	2006	Lampajo Wage	31-12-1964	
27	BEDDU KASAU	19670203 1986021 003	L	II/d	01-04-2015	Pengadmi nistrasi Umum Pada Subag. Umum dan Kepegawai an	01-01-2018	-	01-02-1986	35	02	Prajab atan	1987	-	SMA	IPS	2007	Tonrong e	03-02-1967	
28	VITANIA , S.Sos	19870404 2011012 004	P	III/a	01-04-2019	Pengelola Kepegawai an Pada Subag. Umum dan Kepegawai an	03-01-2017	-	01-01-2011	10	03	Prajab atan	2012	174	S.1	Akuntansi	2005	Surakart a	04-04-1987	



29	DEWI SUKMA	19801003 2011012 002	P	II/c	01-04-2015	Pengadminis trasi Kepegawaia n Pada Subag. Umum dan Kepegawaia n	01-01-2018	-	01-01-2011	10	03	Prajab atan	2012	174	SMK	Administrasi Perkantoran	1999	Sengkan g	03-10-1980
30	DARNA WATI, S.A.P	19820825 2011012 004	P	III/a	01-04-2020	Pengelola Kepegawai an Pada Subag. Umum dan Kepegawai an	01-01-2018	-	01-01-2011	10	03	Prajab atan	2012	174	S.1	Administrasi Perkantoran	2000	Sengkan g	25-08-1982
31	ASRIANI, S.Sos	19880812 2019022 001	P	III/a	01-02-2019	Analisis Kepegawai an Ahli Pertama	01-02-2019	-	01-02-2019	02	04	Pelatih an Fungsional Analisis Kepeg awaian Keahlian	2021	120	S.1	Ilmu Administrasi Negara	2013	Wajo	12-08-1988
32	ANDI FATAHANGI	19831026 2014062 001	P	II/b	01-10-2018	Pengelola Kepegawai an Pada Subag. Umum dan Kepegawai an	01-01-2018	-	01-06-2014	17	04	Bimtek Optima lisasi Kinerja Aparat ur Pengelola Keuan gan Daerah	2017	-	D.III	Teknik Komputer & Jaringan	2002	Sengkan g	26-10-1983



33	NURSIA H NORI	19660304 198602 2 005	P	III/b	01-04-2018	Pengelola Program dan Kegiatan pada Subag. Perencanaan dan Pelaporan	01-01-2018	-	01-02-1986	35	01	Prajabatan	1987	-	SMA	IPS	2002	Wajo	04-03-1966
34	ANDI SULFIATI, A.Md	19860414 201101 2 002	P	III/a	01-10-2019	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Subag. Perencanaan dan Pelaporan	01-01-2018	-	01-01-2011	10	03				D.3	Teknik Komputer & Jaringan	2009	Duppawalie	14-04-1986
35	BESSE LILY ANDRIYANI, S.E	19830101 200902 2 005	P	III/c	01-10-2015	Analisis Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Keuangan	01-01-2018	-	01-02-2009	12	02	Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dan Pengelolaan Keuangan Daerah	2019	-	S.1	Manajemen	2010	Sengkanng	01-01-1983
36	MUHAMMAD NASIR	19810903 200003 1 003	L	II/d	1-10-2017	Bendahara Pada Sub Bagian Keuangan	03-01-2017	-	01-03-2000	21	01	Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dan Pengelolaan Keuan	2019	-	SLTA	IPA	1999	Maroangng	03-09-1981



												gan Daerah							
37	HASNA WATI SIRAJU DDIN, SE	19791105 200701 2013	P	III/a	01-04-2016	Pengelola Gaji Pada Sub Bagian Keuangan	01-01-2018	-	01-01-2007	14	03			S.1	Manajemen	2014	Sengkan g	05-11-1979	
38	INDRA WANSAH, S.Pd	19731116 200701 1011	L	III/c	01-10-2014	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subag. Keuangan	02-01-2020	-	01-01-2007	12	10	Prajab atan	2008	217	S.1	Pendidikan Seni rupa	1998	Amessan geng	16-11-1973
39	SAKARI AH	19641231 198602 1058	L	III/c	01-04-2015	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subag. Keuangan	01-04-2020	-	01-02-1986	35	04	Prajab atan	1987		SMA	Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas	1988	Sengkan g	31-12-1964
40	SURIYANTI	19830412 201406 2001	L	II/b	01-10-2018	Analisis Kelembagaan Pada seksi kelembagaan dan Sarana Prasarana Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	01-01-2018	-	01-06-2014	16	03	Prajab atan	2015	69	SMU	IPA	2002	Empaga e	12-04-1983



4 1	FRANSI SKA, S.Pd	19870605 201101 2 005	P	III/c	01- 04- 2015	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di Seksi Kelembaga an dan Sarana Prasarana Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	01- 01- 2018	-	01-01- 2011	10	03	Prajab atan	2012	217	S.1	Bahasa dan Sastra Indonesia	2010	Bungadid i Kec. Bone- Bone Kab. Lutra	05-06- 1987
4 2	SUARDI	19630717 198411 1 004	L	II/d	01- 10- 2015	Pengelola Peserta Didik Pada seksi Peserta Didik dan Pembangu nan Karakter Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	01- 01- 2018	-	01-11- 1984	31	05	-	-	-	SMA	IPS	2011	Sengkan g	17-07- 1963
4 3	AGUS SRIANJ ANI	198808282015021 001	L	II/b	01- 04- 2019	Pengelola Peserta Didik Pada seksi Peserta Didik dan Pembanguna n Karakter Pada Bidang Pembinaan	01- 01- 2021	-	01-02- 2015	06	05	Prajab atan	2016	274	SMA	Teknik Mesin / Mekanik Otomotif	2007	Wajo	28-08- 1988



						Sekolah Dasar														
4 4	ARYUS NI	19730521 201101 2 001	P	II/c	01-04-2015	Pengelola Kurikulum Pada Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Bidang Pembinaan SD	01-01-2018	-	01-01-2011	17	03	Prajabatan	2012	174	SMK	Administrasi Perkantoran	1992	Madduke Ileng	21-05-1973	
4 5	Hj. ASIPAH, M.Si	19630429 198206 2 001	P	IV/a	01-10-2003	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Pada Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP	02-01-2019	-	01-06-1982	38	11	Diklat PIM Tk. IV	2007	285	S.2	Ilmu Komunikasi	2011	Menge Belawa	29-04-1963	
4 6	ANJAS ASMARAH, S.S	19780708 200312 1 007	L	IV/a	01-04-2019	Analisis Pengembangan Peserta Didik Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP	01-07-2020	-	01-04-2005	16	02	Diklat PIM Tk. IV	2008	285	S.1	Sarjana SASTRA INGGRIS	2003	Sengkan g	08-07-1978	



4 7	Hj. I MAUPE, S.Pd	19651231 198602 2 034	P	III/d	01- 04- 2014	Pengelola Kurikulum di Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	02- 01- 2020	-	01-02- 1986	33	06				S.1	Ilmu Pendidikan	2006	Lampajo	31-12- 1965
4 8	ANDI MULIAN A, S.Sos	198201052014062 001	P	III/a	01- 04- 2020	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di Seksi Kelembaga an dan Sarana Prasarana di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	02- 01- 2020	-	01-06- 2014	07	01	Prajab atan	2015	69	S.1	Ilmu Komunikasi	2012	Lampajo	05-01- 1982
4 9	FAISAL NUR'AS WADI TALEBB E	19810321 201101 1 001	L	II/c	01- 04- 2015	Pengelola Peserta Didik Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangu nan Kararkter SMP Bidang Pembinaan	01- 01- 2018	-	01-01- 2011	10	03	Prajab atan	2012	174	SMK	Administrasi Perkantoran	1999	Sengkan g	21-03- 1981



						SMP														
50	HARIAN A, S.Sos	19650910 198603 2015	L	III/d	01-10-2014	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan SMP	02-05-2020	-	01-03-1986	35	03				S.1	Ilmu Adimistrasi Negara	2006	Ujung Pandang	10-09-1965	
51	SABIR WAHAB, SP	19800425 201001 1012	L	III/c	01-04-2018	Pamong Budaya Muda	28-01-2020	-	01-01-2010	11	03				S.1	Agronomi/Pertanian	2003	Sengkang	25-04-1980	
52	HERMAN, SE	19661231 198703 1075	L	III/d	01-04-2015	Pamong Budaya Muda	01-01-2021	-	01-03-1987	34	01	Diklat Pim IV	2015		S.1	Manajemen	2006	Wajo	31-01-1966	
53	H. ALI TARSONO	19700218 199310 1001	L	III/b	01-04-2018	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman di Bidang Kebudayaan	01-01-2018	-	01-10-1993	27	06	Bimtek Optimalisasi Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	2017		SME A	perkantoran	1990	Sengkang Kecamatan Tempe	18-02-1970	



5 4	RIDWAN MUKRI	19721020 201406 1 001	L	II/b	01- 10- 2018	Pengadmini- strasi Koleksi Museum pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseu- man di Bidang Kebudayaa- n	01- 09- 2020	-	01-06- 2014	16	04	Prajab- atan	2015	69	SMA	Ilmu Fisika	1991	Wajo	20-10- 1972	
5 5	MUJETA HIDDIN	19650513 199702 1 001	L	II/d	01- 10- 2014	Pengelola Data dan Pemanfaat- an Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Bidang Kebudayaa- n	01- 01- 2018	-	01-02- 1997	24	02	-	-	-	SLTA	IPS	1984	Bulu Tempe	13-05- 1965	
5 6	BUDIMAN, S.Pd	196505021984111 001	L	III/b	01- 10- 2017	Pengelola Data Sumber Sejarah di Bidang Kebudayaa- n pada Seksi Sejarah dan Tradisi	02- 01- 2020	-	01-11- 1984	36	07				S.1	Kurikulum&Tek- nologi Pendidikan	1998	Siwa	02-05- 1965	



57	HASNA WATI, S.H	196912311989032015	P	III/c	01-10-2019	Analisis Warisan Budaya di Seksi Sejarah dan Tradisi pada Bidang Kebudayaan	02-01-2020	-	01-03-1989	32	03	Prajabatan	1990		S.1	ILMU HUKUM	2008	Sengkang	31-12-1969
58	BASO FADLI	197610071999031006	L	II/c	01-10-2010	Pengadministrasi Koleksi Museum pada Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman di Bidang Kebudayaan	02-01-2020	-	01-03-1999	22	04	Penyusunan Indeks Profesional ASN	2018		SMA	IPS	1999	Maroang	07-10-1976
59	MASJAYA, S.Pd	197712312014061001	L	III/a	01-04-2020	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Seksi PTK PAUD dan Non Formal Pada Bidang Ketenagaaan	01-01-2018	-	01-06-2014	18	10	Prajabatan	2015		S.1		1999	Mario Bone	31-12-1977



60	SAHRIYAH, S.E.	19691231 200701 2 093	P	III/c	01-04-2018	Analisis Kebutuhan PTK pada Seksi PTK Pendidikan SMP Pada Bidang Ketenagaa n	01-01-2018	-	01-01-2007	14	03	Uji Kompetensi Penyesuaian/npasi ng Jabatan Penilik	2020		S.1	Manajemen	1994	Salobulo	31-12-1969
61	NOVIA HADI NARTI, S.Sos	19921012 201101 2 001	P	III/a	01-04-2019	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Seksi PTK Pendidikan SMP Pada Bidang Ketenagaa n	01-01-2018	-	01-01-2011	10	03	Prajabatan	2012	174	S.1	Akuntansi	2010	Maluku	12-10-1992
62	SITTI RAHMA ISHAQ, S.H	19861023 201406 2 001	P	III/a	01-04-2020	Analisis Kurikulum di Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	01-01-2018	-	01-06-2014	06	11	Pelatihan Okupasi bagi PPK	2021		S.1	ILMU HUKUM	2009	Wajo	23-10-1986
63	NURMING, S.Sos	19671110 199003 2 019	P	III/d	01-10-2018	Pengadministrasi Umum	02-01-2020	-	01-03-1990	31	03	Diklat Teknis Manajemen	2015	50	S.1	Ilmu Administrasi Negara	2004	Keera	10-11-1967



													ASN								
64	MUH.TA MRIN, Sos	196312311984111036	L	III/c	01-10-2017	Pengadmi strasi Umum	02-01-2020	-	31-10-1984	36	07	Prajab atan	1985		S.1	Ilmu Administrasi	2008	Cempa	31-12-1963		
65	PATRIA, S.Sos	196909052001031002	L	III/c	01-10-2019	Pengadmi strasi Umum	02-01-2020	-	01-03-2001	20	03	Prajab atan	2002	120	S.1	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2010	Sengkan g	05-09-1969		
66	ELVIAN A, S.Sos	199201282011012001	P	III/a	01-10-2020	Pengadmi strasi Umum	02-01-2020	-	01-01-2011	10	03				S.1	Ilmu Administrasi Negara	2015	Wajo	28-01-1992		
67	MUSLIANI, S.A.P	198909272011012002	P	III/a	01-10-2020	Pengadmi strasi Umum	02-01-2020	-	01-01-2011	10	03	Worksh op Penyus unan Indeks Profesi onaitas ASN	2018		S.1	ADMINISTRASI PUBLIK	2019	Wajo	27-09-1989		

PENILIK

68	Drs. H. SYARIFUDDIN MIRE	196212311982031118	L	IV/c	01-10-2020	Penilik Madya	25-05-2003	-	01-03-1982	39	00	Diklat Teknik Penilik	2016		S.2	Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2011	Lajokka (Wajo)	31-12-1962	
69	M. ANWAR, S.Pd	196112311982061030	L	IV/c	01-04-2020	Penilik Madya	25-05-2003	-	01-06-1982	38	09	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1995	Amessan gung	31-12-1961	



70	ABDUL KADIR DAHSAF, S.Pd.	196112301983061001	L	IV/c	01-04-2020	Penilik Madya	14-03-2007	-	01-06-1983	37	09	Diklat Petugas Supervisi Satuan PNF	2017	41	S.1	PGSD	2005	Ulugalung	30-12-1961
71	ABD. KADIR, S.Pd	196312311982061022	L	IV/c	01-04-2020	Penilik Madya	25-05-2003	-	01-06-1982	38	09	Pendidikan program mutu PNFI	2009	40	S.1	Ilmu Pendidikan	2002	Kampiri	31-12-1963
72	MADE, S.Pd	196312311983061020	L	IV/b	01-10-2014	Penilik Madya	25-05-2003	-	01-06-1983	37	09	Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan Fungsional	2010	32	S.1	Ilmu Pendidikan	1995	Laputeng /Wajo	31-12-1963
73	Hj. A. GANTI, S.Pd	196307121982062001	P	IV/c	01-04-2020	Penilik Madya	14-03-2007	-	01-06-1982	38	09	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	2006	Tanrutedong	12-07-1963
74	A. ARIBE, S.Pd	196312311982061015	L	IV/c	01-04-2020	Penilik Madya	30-05-2005	-	01-06-1982	38	09	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1999	Toddasalo	31-12-1963
75	KARIAWAN, S.Pd	196412311983061017	L	IV/c	01-10-2020	Penilik Madya	10-06-2008	-	01-06-1983	37	09	Diklat Pelatih Penilik	2013		S.1	Ilmu Pendidikan	1999	Sengkanng	31-12-1964
76	Drs. MUHIDDIN	196312311983031	L	IV/c	01-10	Penilik Madya	25-05	-	01-03-1983	38	00	Pelatihan Fungsional	2011		S.1	Ilmu Pendidikan	1991	Lagosi /Wajo	31-12-1963



		106			- 20 20		- 20 03					Penilik							
7 7	H. SUDIRMAN, S.Pd	19661231 198611 1 012	L	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	10 - 06 - 20 08	-	01-11- 1986	3 5	04	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	PGSD	2007	Mualla	31-12- 1966
7 8	RUSLAN ANGKA, S.Pd	19630413 198611 1 002	L	IV/a	01 - 10 - 20 15	Penilik Madya	12 - 08 - 20 06	-	01-11- 1986	3 4	04	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2010	Anabanu a	13-04- 1963
7 9	MUHARAM, S.Pd	19640102 198503 1 012	L	IV/c	01 - 04 - 20 20	Penilik Madya	25 - 05 - 20 03	-	01-03- 1985	3 6	00	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1998	Pompanu a	02-01- 1964
8 0	BASO PASSAMUL A, S.Pd	19621231 198206 1 033	L	IV/b	01 - 04 - 20 16	Penilik Madya	10 - 04 - 20 10	-	01-06- 1982	3 8	09	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Penilik	2018	30	S.1	PGSD	2009	Pao-Pao	31-12- 1962
8 1	AMBO TANG, S.Pd	19660204 198511 1 001	L	IV/b	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	02 - 01 - 20 19	-	01-11- 1985	3 5	08	Pelatihan Fungsional Penilik	2011		S.2	Magister Manajemen	2011	Kobbae Tosora	04/02/ 1966
8 2	AMBO INTANG, S.Pd	19671231 198611 1 002	L	IV/c	01 - 10 - 20	Penilik Madya	15 - 10 - 20	-	01-11- 1986	3 4	04	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1997	Raddae	31-12- 1967



					20		11													
83	ANDI ARMANSYA H, S.Pd	19781211 200502 1 004	L	IV/a	01 - 04 - 20 15	Penilik Madya	01 - 04 - 20 15	-	01-02-2005	1 6	01	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Geografi	2003	Tancung	11-12-1978	
84	MUKHTAR, S. Pd	19611231 198303 1 158	L	IV/b	01 - 04 - 20 18	Penilik Madya	01 - 05 - 20 15	-	01-03-1983	3 8	00	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1998	Sengkan g	31-12-1961	
85	MURSALIM, S.Pd.,M.Pd	19851215 200902 1 001	L	IV/a	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	01 - 10 - 20 20	-	01-02-2009	1 2	00	Diklat prajabatan	2010	135	S.1	Pendidikan Teknik Mesin	2007	Atapange	15-12-1985	
86	Drs. ABDUL MALIK	19621231 198206 1 038	L	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya		-	01-06-1982	3 8	09	Workshop Pembinaan ASN	2017		S.1	Ilmu Pendidikan	1990	Lajokka	31-12-1962	
87	H.MUSTAMI N,S.Pd.,MM	19671224 198903 1 006	L	IV/b	01 - 01 - 20 18	Penilik Madya	01 - 07 - 20 15	-	01-03-1989	3 2	00	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Ilmu Pendidikan	1995	Jakarta	24-12-1967	
88	HARIANTO, S.Pd	19660107 198612 1 001	L	IV/b	01 - 10 - 20	Penilik Madya	09 - 11 - 20	-	01-12-1986	3 4	03	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Penjaskesrek	2003	Wajo	07-01-1966	



					18		06												
8 9	PAKKI, S.Pd.,MM	19660405 198803 1 018	L	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	01 - 02 - 20 16	-	01-03- 1988	3 3	00	Penataran GR. BID. Studi Sains dan Matematika	1991	64	S.2	Manajemen Pendidikan	2011	Watan rumpia	05-04- 1966
9 0	NUR EMY, S.SI	19840622 200902 2 004	P	III/d	01 - 10 - 20 19	Penilik Muda	01 - 03 - 20 16	-	01-02- 2009	1 1	01	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.1	Fisika	2007	Pare- Pare	22-06- 1984
9 1	Drs. FIRDAUS, M.Si.	19620101 198203 1 022	L	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	01 - 08 - 20 16	-	01-03- 1982	3 9	00	Penataran Pengujian Pendidikan	1995	52	S.2	Ilmu Adm Publik	2007	Sengkan g	01-01- 1962
9 2	Hj. SUMARNI, S.Pd.,M.Pd	19611231 198203 2 077	P	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	27 - 05 - 20 06	-	01-03- 1982	3 8	00	Diklat Pengawas	2006	100	S.2	Penjaskesr ek	2015	Anabanu a	31-12- 1961
9 3	ARNI MAKKA, S.Pd	19621209 198411 2 002	P	IV/c	01 - 10 - 20 20	Penilik Madya	27- 05- 20 06	-	01-11- 1984	3 6	03	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Penjaskesr ek	2003	Sengkan g	09-12- 1962
9 4	Dra. NURHAYATI MAKKARUM PAK, M.Si.	19621029 199003 2 005	P	IV/c	01 - 04 - 20	Penilik Madya	01 - 10 - 20	-	01-03- 1990	3 1	00	Diklat Fungsional Penilik	2017	60	S.2	Ilmu Aministrasi	2011	Jambi	29-10- 1962



					20		16													
95	AINAR, S.Pd	19720113 200604 2 012	P	III/c	01 - 10 - 20 - 14	Penilik Muda	01 - 07 - 20 - 17	-	01-04- 2006	1 4	11	Bimtek Fungsional Penilik	2017	30	S.1	Pendidikan Biologi	2004	Wajo	13-01- 1972	
96	RUSTANG, S. Sos	19680525 198901 1 001	L	IV/a	01 - 04 - 20 21	Penilik Madya	01 - 04 - 20 20	-	01-01- 1989	3 2	03	Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilik	2014	40	S.1	Administراس i Negara	1998	Tempe	25-05- 1968	
97	BASO RANI S.Sos	19741231 200901 1 017	L	III/d	01 - 04 - 20 21	Penilik Muda	02 - 01 - 20 19	-	01-01- 2009	1 2	04	Pelatiha Peningkatan Kompetensi Penilik	2019	30	S.1	Ilmu Administراس i	1998	Caccae / Wajo	31-12- 1974	
98	Drs. H. SUWARDI, M.Si	19640626 198411 1 001	L	IV/a	01 - 04 - 20 04	Penilik Madya	08 - 01 - 20 19	-	01-11- 1984	3 6	07				S.1	Administراس i Pendidikan	1988	Tironge	26-06- 1964	
99	ANDI PANGORISE NG, S.Pd	19650706 198611 1 002	L	IV/a	01 - 10 - 20 06	Penilik Madya	08 - 01 - 20 19	-	01-11- 1986	3 4	08	Diklat Fungsional Penilik	2006	70	S.1	Administراس i Pendidikan	2006	Tobulelle	06-07- 1965	



100	ANDI TENRI AKE, S.Pd	19860225 201001 2 005	P	III/d	01 - 10 - 20 18	Penilik Muda	02 - 01 - 20 19	-	01-01- 2010	1 1	05	Workshop Pembinaan ASN	2017		S.1	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	2008	Wajo	25-02- 1986
101	BAHARUDDI N, S.Pd	19660107 198411 1 001	L	IV/b	01 - 04 - 20 06	Penilik Madya	01 - 03 - 20 19	-							S.1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2010	Wajo	07/01/ 1966
102	KASTATY, S.Pd	19640212 198306 2 003	P	IV/a	01 - 04 - 20 14	Penilik Madya	03 - 02 - 20 20	-	01-06- 1983	3 8	00	Uji Kompetensi Penyesuaia n/Inpassing	2019		S.1	Administra si Pendidikan	2002	Sengkan g	12-02- 1984
103	Dra. HANTAMAH T	19661231 200701 2 103	P	III/c	01 - 04 - 20 15	Penilik Muda	03 - 02 - 20 20	-	01-01- 2007	1 2	10	Workshop Penyusunan Indeks Profesionalit as ASN	2018		S.1	Pendidikan Luar Sekolah	1992	Doping	31-12- 1966
104	ANDI SRI HERLINDAY ANI, SE	19790121 200701 2 007	P	III/d	01 - 04 - 20 15	Penilik Muda	03 - 02 - 20 20	-	01-01- 2007	1 5	03	Diklat Pim Tk. IV	2015	825	S.1	Manajemen	2004	Sengkan g	21-01- 1979
105	H. ANDI SUPARMAN, S.Sos	19740724 200801 1 008	L	III/c	01 - 10 - 20 16	Penilik Muda	03 - 02 - 20 20	-	01-01- 2008	1 2	03				S.1	Ilmu Administra si	1998	Tancumg	24-07- 1974



106	BESSE ROSNI, S.T., M.A.P	197809102009042003	P	III/c	01-04-2009	Penilik Muda	14-01-2012	-	01-04-2009	12	02	Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing	2020		S.1	Teknologi Industri	2003	Lamata	10-09-1978
107	ANNAF, S.Sos.,M.Si	196702281988031008	L	IV/a	01-10-2013	Penilik Madya	02-01-2019	-	01-03-1988	29	01	Diklat Adum	1999	250	S.2	Ilmu Komunikasi	2011	Maddukkelleng	28-02-1967
108	Hj. JUMIATI, S.Sos, M.Si	197012041990032006	P	IV/a	01-04-2014	Penilik Madya	01-08-2020	-	01-03-1990	31	01	Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing	2020		S.2	Ilmu Administrasi	2011	Sengkanng	04-12-1970

PENGAWAS

109	Drs. MUHAMMAD ASSE, M.M	196512311984111005	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	14-08-2006		01-11-1984	36	05	Diklat Pengawas	2002	100	S.2	Manajemen Pendidikan	2012	Caleko	31-12-1965
110	AMRI, S.Pd, SH., MH	196203031982061001	L	IV/b	01-04-2012	Pengawas Sekolah Madya	03-03-2000		01-06-1982	38	10	Diklat Pengawas	2001	100	S.2	Hukum	2011	Siwa	03-03-1962
111	Drs. HERMANTO	196208121982031005	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	22-12-2002		01-03-1982	39	01	Diklat Pengawas	2002	100	S.1	Ilmu Pendidikan	1992	Lagosi	12-08-1962
112	ABDUL RAKHIM, S.Pd	196204151982031014	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	03-01-2017		01-03-1982	39	01	Diklat Pengawas	2005	100	S.1	Adm. Pendidikan	2003	Menge-Belawa/Wajo	15-04-1962



1 1 3	ABDUL SALAM, S.Pd., M.M	19631231 198306 1 016	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	14- 08- 2006		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.2	Manajemen Pendidikan	2013	Salojamp u / Wajo	31-12- 1963	
1 1 4	Dra. SITTI FATMAWATI .,M.Si	19640411 198306 2 001	P	IV/b	01-10- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	12- 06- 2006		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.2	Ilmu Adminstras i	2011	Wajo	11-04- 1964	
1 1 5	Drs. H. LA BOKDIN, M.Si	19641231 198306 1 018	L	IV/c	01-10- 2019	Pengawa s Sekolah Madya	09- 11- 2006		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.2	Ilmu Adminstras i	2009	Mario / Wajo	31-12- 1964	
1 1 6	Drs. M. TAMRIN	19621231 198511 1 014	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	09- 11- 2006		01-01- 1985	35	03	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Ilmu Pendidikan	1988	Awo, Belawa	31-12- 1962	
1 1 7	Drs. NURDIN. S., M.Pd	19640505 198206 1 001	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	09- 11- 2006		01-06- 1982	38	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.2	Bhs. Dan sastra Indonesia	2011	Palaguna	05-05- 1964	
1 1 8	Drs. TENRI TATTA	19620204 198203 1 010	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	09- 11- 2006		01-03- 1982	39	02	Diklat Pengawas	2003	100	S.1	Adm. Pendidikan	1988	Sengkan g/Wajo	04-02- 1962	
1 1 9	MUHAMMA D JUMADIL REMMANG, S.Pd., M.M	19681231 199107 1 001	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 06- 2008		01-07- 1991	29	10	Diklat Pengawas	2007	100	S.2	Manajemen	2013	Sumpang Ale	31-12- 1968	
1 2 0	Dra. ANDI ASNIDAR. AM., M.M	19640428 198306 2 001	P	IV/b	01-04- 2016	Pengawa s Sekolah Madya	10- 06- 2008		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2007	100	S.2	Manajemen Pendidikan	2013	Sengkan g	28-04- 1964	
1 2 1	Drs. MUHAMMA D ABDUH.MS, M.M	19631231 198206 1 019	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 06- 2008		01-06- 1982	38	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.2	Ilmu Adminstras i	2018	Tokampu	31-12- 1963	



1 2 2	Drs. H. ARAS BACO, M.M	19621231 198203 1 115	L	IV/b	01-10- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	26- 11- 2011		01-03- 1982	39	01	Bimtek Penyegaran Tim Pengemb g Kurikulum 2013	2017	-	S.2	Adminstras i Negara	2011	Liu Sabbang paru / Wajo	31-12- 1962	
1 2 3	MUHAMMA D SAID, S.Pd	19620606 198203 1 009	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	15- 10- 2011		01-03- 1982	39	01	Bimtek Penyegaran Tim Pengemb g Kurikulum 2013	2017	-	S.1	Kurikulum& Teknologi Pendidikan	1994	Paddupp a, Tempe	06-06- 1962	
1 2 4	MUH. DARWIS, S.Pd., M.Si	19610912 198411 1 002	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	13- 05- 2013		01-11- 1984	35	05	Bimtek Penyegaran Tim Pengemb g Kurikulum 2013	2017	-	S.2	Ilmu Adminstras i	2012	Sengkan g	12-09- 1961	
1 2 5	Hj. INDO ASSE. S.Pd.,MM	19660211 198611 2 001	P	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 04- 2010		01-11- 1986	34	05	Bimtek Pengawas Pemetaan Mutu Pendidikan	2019	18	S.2	Manajemen Pendidikan	2013	Impa- Impa	11-02- 1966	
1 2 6	PARMAN, S. Pd.,M. Si	19641231 199208 1 002	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	15- 10- 2011		01-08- 1992	28	08	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas	2018	-	S.2	Ilmu Komunikasi	2011	Menge	31-12- 1964	
1 2 7	Dra. Hj. YULIANA, M. Si	19630711 198203 2 001	P	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	15- 10- 2011		01-03- 1982	39	01	Bimtek Penyegaran Tim Pengembang Kurikulum 2013	2017	-	S.2	Ilmu Adminstras i	2008	Pare- Pare	11-07- 1963	
1 2 8	Drs. H. MUH. AKHSAN	19640808 198306 1 001	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	12- 01- 2015		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.1	Ilmu Pendidikan/ Adm. Pendidikan	1988	Tosora	08-08- 1964	



1 2 9	MELLE, S.Pd	19621231 198206 1 036	L	IV/c	01-04- 2020	Pengawa s Sekolah Madya	09- 11- 2006		01-06- 1982	38	10	Diklat Pengawas	2003	100	S.1	Adm. Pendidikan	2005	Patila	31-12- 1962	
1 3 0	HARIS, S.Pd	19621231 198306 1 012	L	IV/b	01-10- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 09- 2007		01-06- 1983	37	10	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Ilmu Pendidikan	1995	Tawaroe	31-12- 1962	
1 3 1	MARWANG, S.Pd	19620201 198206 1 002	L	IV/b	01-10- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 09- 2007		01-06- 1982	38	10	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Ilmu Pendidikan	1994	Tempe	01-02- 1962	
1 3 2	ABDURRAH MAN, S.Pd	19630207 198203 1 003	L	IV/b	01-10- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 09- 2007		01-03- 1982	39	01	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Pend. Matematika	2003	Cangadi / Soppeng	07-02- 1963	
1 3 3	Drs. ALIMUDDIN. ,M.Si	19620618 198206 1 003	L	IV/b	01-10- 2016	Pengawa s Sekolah Madya	01- 01- 2018		01-06- 1982	38	10				S.2	Ilmu Adminstras i	2013	Callaccu	18-06- 1962	
1 3 4	H. ANDI DAUNUDDI N, S.Pd	19640713 198612 1 002	L	IV/b	01-10- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 05- 2013		01-12- 1986	33	04	Diklat Calon Pengawas	2007	82	S.1	Adm. Pendidikan	2009	Pompanu a	13-07- 1964	
1 3 5	Drs. ABDUL KADIR, M. Si	19611231 198203 1 140	L	IV/b	01-10- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	15-10- 2011		01-03- 1982	40	01				S.1	Adminstras i Pendidikan	1990	Wajo,	31-12- 1961	
1 3 6	PANGURISE NG, S.Pd., M.M.	19711231 199212 1 003	L	IV/b	01-04- 2016	Pengawa s Sekolah Madya	01- 09- 2018		01-12- 1992	28	05	Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah	2019	-	S.1	PGSD	2005	Wajo	31-12- 1971	
1 3 7	ABDULLAH, S.Pd., M.M.	19650716 198611 1 001	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	01- 11- 2018		01-11- 1986	34	05	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	2016	-	S.1	Manajemen Pendidikan	2011	Keera	16-07- 1965	



138	H. A. HASAN, S.Pd.,M.Si	19641231 1983061 022	L	IV/b	01-04-2014	Pengawas Sekolah Madya	01-10-2018		01-06-1983	37	09	Diklat Instruktur Nasional KUR 2013	2017	72	S.2	Ilmu Administrasi	2010	Timoreng	31-12-1964
139	Hj. BESSE HASDAWATI, S.Pd	19691231 1989112 005	P	IV/b	01-10-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-12-2018		01-11-1989	31	07	Pelatihan Kepala Sekolah	2013	42	S.1	Pendidikan Matematika dan IPA	2007	Paria	31-12-1969
140	MUH. ILYAS, S.Pd	19650601 1986111 001	L	IV/b	26-06-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-08-2019		01-11-1986	34	07				S.1	Ilmu Pendidikan	2000	Baru Impa- Impa	01-06-1965
141	Hj. NURHAYATI, S.Pd	19631231 1986032 136	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	10-06-2008		01-03-1986	35	01	Diklat Pengawas	2007	100	S.1	PAUD	2007	Kampiri	31-12-1963
142	Hj. PARIDAH, S.Pd.Aud., MM	19630707 1985032 016	P	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	10-04-2010		01-03-1985	35	01				S.1	Administrasi Pendidikan	2011	Sengkan- g	07-07-1963
143	Hj. FARIDAH P, S. Pd., MM	19651231 1986032 103	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	15-10-2011		01-03-1986	34	01	Workshop Pembinaan ASN	2017	-	S.1	Administrasi Pendidikan	1995	Maroangi- ng	31-12-1985
144	ANDI MULIANNA, S. Pd	19641211 1987032 013	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	15-10-2011		01-03-1987	33	01	Pelatihan Kurikulum Tingkat KTSP	2010	36	S.1	Administrasi Pendidikan	1996	Makassar	11-12-1964
145	INDO ASSE, S.Pd	19640421 1983062 002	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	12-01-2015		01-06-1983	37	10	Diklat Pengawas	2006	70	S.1	Ilmu Pendidikan	1998	Wajo	21-04-1964
146	Hj. SENIWATI, S.Pd	19631231 1983062 023	P	IV/b	01-10-2014	Pengawas Sekolah Madya	14-09-2015		01-06-1983	37	10				S.1	Ilmu pendidikan	1998	Tancung	31-12-1963



147	Dra. Hj. A. JAUHARIYA H, M.M.	196302071983062001	P	IV/b	01-10-2015	Pengawas Sekolah Madya	09-09-2006		01-06-1983	37	10	Diklat Pengawas	2005	100	S.1	Ilmu Pendidikan	1992	Menge	07-02-1963
148	Dra. Hj. ASNIARTI, M.Pd.	196412171985032010	P	IV/b	01-04-2016	Pengawas Sekolah Madya	10-09-2007		01-03-1985	36	01	Diklat Pengawas	2007	100	S.1	Adm. Pendidikan	1988	Sengkan g	17-12-1964
149	Hj. RASIDAH ARSYAD, S.Pd	196410051985112002	P	IV/b	01-04-2016	Pengawas Sekolah Madya	10-05-2013		01-11-1985	35	05	Seminar Nasional Psikologi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran	2018	-	S.1	Pendidikan Bahasa Dan Seni	1998	Siwa	05-10-1964
150	Hj. HASNIAH, S.Pd	196705021989032009	P	IV/b	01-10-2014	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2015		01-03-1989	32	01	Pelatihan Pembuatan PTK	2015	36	S.1	PGPAUD	2004	Aluppang	02-07-1967
151	FATAYATI, S.Pd.Aud	197004071992032012	P	IV/b	01-10-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-08-2015		01-03-1992	29	01	Bimtek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	2018	61	S.1	Manajemen Pendidikan	2011	Paria	07-04-1970
152	Hj. ROSMIATI, S.Pd.	197104051993032007	P	IV/b	01-04-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-11-2016		01-03-1993	28	01				S.1	Manajemen Pendidikan	2007	Amessan geng	05-04-1971
153	ANDI DARNANIN GSIH, S.Pd.,M.Pd	197110181991032007	P	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-03-2017		01-03-1991	30	01	Diklat Fungsional Guru TK	2015	60	S.2	Magister Manajemen	2015	Ujung Pandang	18-10-1971
154	Hj. BESSE TANG AKMA, S.Pd., M.M	196212311984032078	P	IV/b	01-10-2014	Pengawas Sekolah Madya	01-03-2017		01-03-1984	37	01				S.2	Magister Pendidikan Islam	2011	Atapange	31-12-1962
155	ANDI ASMARANI,	197306242007012	P	IV/a	01-04-2020	Pengawas Sekolah	01-10-		01-01-2007	15	01	Bimtek Penilik dan Pengawas	2020	32	S.2	KTP	2011	Sengkan g	24-06-1973



5	S.Pd., M.Pd.I	015				Madya	2018				PAUD								
156	A. HELLI, S.Pd	19631231 198411 2 022	P	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-11-2018	01-11-1984	34	05	Workshop Pembinaan ASN	2017	32	S.1	Aqidah dan Filsafat	2004	Sengkang	31-12-1963	
157	Dra. RAJENG	19621231 198411 2 016	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	09-11-2006	01-11-1984	35	05	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Aqidah dan Filsafat	1990	Kampiri	31-12-1962	
158	Drs. SYARIFUDDIN. R	19621231 198411 1 030	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	15-08-2006	01-11-1984	35	05	Diklat Pengawas	2006	100	S.1	Manajemen Pendidikan	1991	Rumpia	31-12-1962	
159	Drs. AMINUDDIN, M.M	19621231 198411 1 032	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	12-08-2006	01-11-1984	35	05	Diklat Pengawas	2006	100	S.2	Manajemen Pendidikan	2011	Alliweng	31-12-1962	
160	Drs. AHMAD MUKTAMAR. B, MA	19690612 199512 1 003	L	IV/b	01-04-2016	Pengawas Sekolah Madya	09-11-2006	01-12-1995	25	02	Diklat Cawas	2006	70	S.2	Manajemen Pend.	2006	Sengkang	12-06-1969	
161	HASNAWATI, S.Pd.,M.M	19650412 198703 2 022	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	20-7-2013	01-03-1987	34	01	Bimtek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	2018	61	S.2	Manajemen	2013	Lolloe	04-12-1965	
162	Drs. MUH. IDRIS, MM	19631231 198903 1 163	L	IV/b	01-10-2014	Pengawas Sekolah Madya	15-09-2014	01-03-1989	32	01	Workshop Pembinaan ASN	2017	32	S.2	Administrasi Negara/ ilmu Administrasi	2014	Tampang	31-12-1963	
163	Hj. ANDI TENRIOLLE, S.Pd.,M.Si	19651127 198411 2 001	P	IV/b	01-04-2014	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2015	01-11-1984	36	05	Diklat Capacity Building Guru Sekolah SATAP Dan SMPT	2010	37	S.2	Ilmu Administrasi	2010	Gilireng	27-11-1965	



1 6 4	Drs. H.M.EFFEN DI, M.Si	19641025 199512 1 003	L	IV/b	01-10- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	01- 10- 2015		01-12- 1995	25	05	Program Kemitraan Kepsek SMP	2008	388	S.2	Manajemen	2010	Siwa	25-10- 1964	
1 6 5	H. MASE, S.Pd.,M.M.	19641231 198803 1 126	L	IV/b	01-04- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	01- 07- 2015		01-03- 1988	33	01	Bimtek Pengawas Pemetaan Mutu Pendidikan	2019	22	S.2	PKn	2011	Gilireng	31-12- 1964	
1 6 6	Dra. ANDI ARTATI	19670704 199702 2 003	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	11- 05- 2013		01-02- 1997	25	02	Cakep	2007	82	S.1	Pendidikan Olahraga	1991	Wajo	04-07- 1967	
1 6 7	ANWAR, S.Pd.,M.Pd	19641231 198803 1 129	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 09- 2007		01-03- 1988	33	01	Bimtek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	2018	61	S.2	Manajemen Pend.	2012	Labokon g	31-12- 1964	
1 6 8	ABD. RAHMAN, S.Pd	19651231 198512 1 009	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya			01-12- 1985	35	04	diklat Pengawas	2005	100	S.2	Pend. MIPA	2012	Paria	31-12- 1965	
1 6 9	KAMARIAH, S.Pd	19671231 199103 2 041	P	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	12- 12- 203		01-03- 1991	30	01	Diklat sertifikasi	2007		S.1	Adm. Pendidikan	2006	Pompanu a	31-12- 1967	
1 7 0	HAERUDDIN SUMANGE, S.Pd	19620402 198511 1 001	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	10- 05- 2013		01-11- 1985	35	05	Sertifikasi Guru	2008	48	S.1	PMP/KN	2005	Paseru	02-04- 1962	
1 7 1	Drs. SUKARDI	19630502 198903 1 016	L	IV/a	01-04- 1999	Pengawa s Sekolah Madya	15- 09- 2014		01-03- 1989	32	01	Diklat Pengawas / Calon Pengawas	2007		S.1	Pendidikan MIPA	1988	Sengkan g	02-05- 1963	



1 7 2	Hj.SURYANI NGSIH, S.Pd.	19700319 199203 2 007	P	IV/b	01-10- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	01- 11- 2016		01-03- 1992	29	01	Pelatihan Instrumen Monitoring Pendidikan Bagi Pengawas	2016		S.1	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	2003	Kampiri	19-03- 1970
1 7 3	JUMARDIN, S.Pd.,M.Pd	19680214 200003 1 005	L	IV/b	01-04- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	01- 07- 2017		01-03- 2000	21	01	Diklat Penguatan Kemampua n Kepala Sekolah	2011		S2	Pendidikan Olahraga	2013	Manciri	14-02- 1968
1 7 4	Hj. JOHAR TAHI, S.Pd., M.Pd	19670507 198803 2 014	P	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	01- 07- 2017		01-03- 1988	33	01	Diklat Pengawas	2002	100	S.2	Bahasa Indonesia	2012	Soppeng	07-05- 1967
1 7 5	FIRMAN, S.Pd.,M.Pd	19661018 198903 1 013	L	IV/b	01-04- 2015	Pengawa s Sekolah Madya	01-03- 2017		01-03- 1989	32	00				S.2	Magister Manajemen	2010	Wajo	18-10- 1966
1 7 6	HASAN BASRI NUR, S.Pd.,MM	19680504 199003 1014	L	IV/b		Pengawa s Sekolah Madya	01- 10- 2018		01-03- 1990	31	00	Workshop Tata Kelola Keuangan Sekolah	2015		S.2		2011	Botodong ga	04-05- 1968
1 7 7	H. ABIDIN RAUKAS, S.Pd.,M.Si	19691231 199303 1 053	L	IV/b		Pengawa s Sekolah Madya	01- 10- 2018		01-03- 1993	28	01	Diklat Teknis Manajemen ASN (Penyusuna n DUPAK)	2017	32	S.2				31-12- 1969
1 7 8	Drs. H. MUHAMMA D RIDWAN S	19680605 199103 1 018	L	IV/a	01-04- 2007	Pengawa s Sekolah Madya	08- 02- 2019		01-03- 1991	30	03				S.1	Pendidikan Bahasa Inggris	1993	Jongkang	05-06- 1968
1 7 9	Drs. BAHTIAR MASDIN.	19660716 198903 1 007	L	IV/b	01-10- 2014	Pengawa s Sekolah Madya	10- 06- 2008		01-03- 1989	30	00	Diklat Pengawas	2013	42	S.2	Manajemen Pendidikan	2012	Wajo	16-07- 1966



	M.M																			
180	HERI ARTO, S.Pd	19620402 198203 1 014	L	IV/a	01-04-2007	Pengawas Sekolah Madya	17-10-2011		01-03-1982	39	03	Diklat Pengawas	2013	42	S.1	Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi	2007	Gowa	06-04-1982	
181	H. NAJAMUDDIN, S.Pd., M.M	19650310 198812 1 003	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	09-03-2020		01-12-1988	32	06				S.2	Manajemen	2014	Pinrang	10-03-1965	
182	WAHIDAH, S.Pd	19670814 200604 2 009	P	IV/a	01-04-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2020		01-04-2006	15	02	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.1	Pendidikan Biologi	2007	Bone	14-08-1967	
183	ADENG B, S.Pd., M.Si	19651231 198611 1 017	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2020		01-11-1986	34	07	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Ilmu Komunikasi	2013	Tippulue	Tahun 1965	
184	HANATIDAH ALTAR, S.Pd., M.Si	19660212 198903 2 015	P	IV/b	01-04-2012	Pengawas Sekolah Madya	14-04-2020		01-03-1989	32	03				S.2	Ilmu Administrasi	2012	Sengkan g	12-02-1966	
185	HABBASIAH, S.Pd	19681231 199308 2 003	P	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-08-1993	27	08	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Manajemen	2017	Pinrang	Tahun 1968	
186	INDO ULENG, S.Pd.I., M.Pd.I	19760919 200801 2 011	P	III/d	01-04-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-01-2008	13	05	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Dirasah Islamiyah	2011	Sengkan g	19-09-1986	
187	NURJANNA H, S.Ag., M.Pd.I	19740404 199308 2 001	P	IV/b	01-04-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-08-1993	27	10	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Dirasah Islamiyah	2008	Kampiri	04-04-1972	



188	Dra. Hj. BESSE SYAHRI ALAM GAU, M.Si	19681231 198803 2 026	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-03-1988	33	03	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Ilmu Administrasi	2013	Salobulo	Tahun 1968	
189	H. NURMIN, S.Pd	19651022 199402 1 001	L	IV/b	01-10-2018	Pengawas Sekolah Madya	01-08-2020		01-02-1994	27	04	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.1	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	1999	Wajo	22-10-1965	
190	AMBO TANG, S.Pd.	19661231 198611 1 017	L	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-10-2020		01-11-1986	34	08	Diklat Penguatan Kepala Sekolah	2019	71	S.2	Manajemen	2015	Wajo	31-12-1966	
191	HASNAH B, S.Pd	19660922 199107 2 001	P	IV/b	01-10-2015	Pengawas Sekolah Madya	04-01-2021		01-07-1991	30	00	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.1	Pendidikan Biologi	2006	Sompe	22-09-1966	
192	Hj. WAHYUNAN INGSIH, S.Pd., M.Si.	19661231 198912 2 003	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2021		01-12-1989	31	07	Diklat Calon Pengawas Sekolah	2019	171	S.2	Ilmu Administrasi	2009	Wajo	Tahun 1966	
193	AGUS KARIM, S.Pd.	19690518 199308 1 002	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-06-2021		01-08-1993	27	11				S.1	Pendidikan Biologi	2008	Sengkan g	18-05-1969	



Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, PNS dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Non PNS. Sumber daya manusia tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo melakukan pendayagunaan PNS dengan mendistribusikan PNS ke sekretariat dan bidang-bidang sebagai unit kerja organisasi dengan mempertimbangkan variabel berupa persyaratan formal yang menuntut kesesuaian kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia. Namun karena keterbatasan kompetensi SDM yang ada, maka pendistribusian SDM tidak lagi berdasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan jabatan. Jumlah PNS lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo pada kondisi 30 April 2019 sebanyak 83 orang.

Tabel 2.2.2
JUMLAH TENAGA NON PNS SDM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Operator	S2	1		1
		S1	2	11	13
		SMA		1	1
2	Administrasi	S1	7	20	27
		D3		1	1



		SMA	5	10	15
3	Cleaning Service	SMA	1	1	2
4	Satpam	SMA	1		1
5	Sopir	SMA	1		1
6	Arsip	SMA/S1		2	2

Pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pemerintah. Sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo merupakan alat yang digunakan oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah sebuah gedung kantor dengan luas bangunan 1.350 m² dan satu masjid dengan luas 128 m². Gedung kantor tersebut beralamat di Jalan Jend. Akhmad Yani No. 27 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pengelolaan barang tahun 2019, jumlah sarana dan prasarana tercantum pada Tabel 2.2.3.

Tabel. 2.2.3.
SARANA DAN PRASARANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO

NO.	JENIS BARANG/NAMA BARANG	VOLUME/SATUAN	THN PENGADAAN	KONDISI
1	2	3	4	5
1	Tanah	3.870	1985	Baik
2	Gedung	1.350	1990	Baik
3	Masjid	1	2007	Baik
4	Mobil	2	2104	Baik
5	Sepeda Motor	120	2004	Baik
6	Filing cabinet	61	2005	Baik
7	Kursi Rapat	284	2016	Baik
8	Junifer Router	1	2006	Baik
9	Kursi Bundar	2	2016	Baik
10	Kursi Tamu	10	2016	Baik
11	Kulkas	1	2016	Baik
12	Kompor Gas	1	2016	Baik
13	Tabung Gas	2	2016	Baik
14	Almari TI	1	2016	Baik
15	CPU/Router	14	2015	Baik



NO.	JENIS BARANG/NAMA BARANG	VOLUME/SATUAN	THN PENGADAAN	KONDISI
1	2	3	4	5
16	AP Phone	7	2016	Baik
17	LCD Projector	12	2016	Baik
18	OHP	2	2016	Baik
19	Laptop	29	2017	Baik
20	Wireless Sound	8	2017	Baik
21	Amplifier	3	2017	Baik
22	Meja TV	1	2017	Baik
23	Scanner	4	2107	Baik
24	Msn pemotong kertas	1	2017	Baik
25	Faximile	2	2014	Baik
26	Meja Telephone	1	2012	Baik
27	TV	6	2016	Baik
28	Papan Pengumuman	4	2016	Baik
29	Rak Besi	44	2014	Baik
30	Whiteboard	22	2016	Baik
31	Meja TL	25	2016	Baik
32	Meja Kecil	24	2016	Baik
33	Rak Kayu	19	2016	Baik
34	Cash Box	2	2106	Baik
35	Lemari	1	2017	Baik
36	AC Duduk	3	2017	Baik
37	Lemari Es	1	2017	Baik
38	Mesin Absensi	2	2018	Baik
39	Laptop	5	2017	Baik
40	Printer Scan	1	2017	Baik
41	Printer	5	2017	Baik
42	Scanner	1	2017	Baik
43	Kamera	1	2017	Baik
44	Kursi Susun	156	2017	Baik
45	Kursi Rapat	9	2017	Baik
46	Meja Rapat	11	2017	Baik
47	Lemari 1 Pintu	3	2017	Baik
48	Lemari 2 Pintu	5	2017	Baik
49	Lemari 4 Pintu	16	2017	Baik
50	Laptop	5	2017	Baik
51	Laptop	4	2018	Baik
52	Printer	2	2018	Baik
53	Laptop	3	2019	Baik
54	Printer	3	2019	Baik
55	AC	2	2019	Baik



NO.	JENIS BARANG/NAMA BARANG	VOLUME/SATUAN	THN PENGADAAN	KONDISI
1	2	3	4	5
56	Laptop	5	2020	Baik
57	Printer	3	2020	Baik
58	AC	4	2021	Baik
59	Laptop	18	2021	Baik
60	PC Oll In One	3	2021	Baik
61	Printer	1	2021	Baik
62	Meja Kerja	9	2021	Baik
63	Kursi Kerja	9	2021	Baik
64	Lemari Arsip	2	2021	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintahan bidang urusan pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut menghasilkan capaian kinerja pelayanan (lihat Tabel 2.3.1). Dalam mencapai kinerja pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menyusun target perencanaan strategis berdasarkan indikator kinerja program dalam bentuk pencapaian kinerja 5 tahunan secara indikatif mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 dan tertuang dalam dokumen perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024.

Penggunaan anggaran selama tahun 2020-2024 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo juga menghasilkan realisasi pendanaan dalam pelaksanaan pelayanan (lihat Tabel 2.3.2). Capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo telah berkontribusi dalam pelaksanaan manajemen ASN yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, tidak diskriminatif, jujur, adil, dan merata yang dilandasi dengan etika, moral dan semangat pengabdian yang tinggi.



Tabel 2.3.1.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Melek Huruf		97%		97.27	97.77	98.27	98.77	98,77	93.03					93.03				
2	Angka rata rata lama sekolah		7,2%		7,29	7.5	7.71	7.92	7.92	6.81					6.81				
3	Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan				100	100	100	100	100	100					100				
4	PAUD				60.20	60.40	60.60	60.80	70.00		60.20				60.20				



5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI paket A				102	103	104	105	106	102					102				
6	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs paket B				95	100	100	100	100	95					95				
6	Angka Pendidikan yang ditamatkan				4630	4650	4850	4899	4990	4630					4630				
7	Angka partisipasi murni SD/MI/ paket A				100	100	100	100	100	100					100				
8	Angka partisipasi murni SMP/MTs/paket B				100	100	100	100	100	100					100				
9	Angka partisipasi sekolah SD/MI/ paket A				1000	100	100	100	100	1000					1000				
10	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/paket B				1000	100	100	100	100	1000					1000				
9	Angka putus sekolah SD/MI/ paket A				1.2	1.1	1	0.9	0.5	1.2					1.2				



10	Angka putus sekolah SMP/MTs/paket B				0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5					0.5				
11	Angka kelulusan SD/MI/ paket A				100	100	100	100	100	100					100				
12	Angka kelulusan SMP/MTs/paket B				100	100	100	100	100	100					100				
13	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs				0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87					0.87				
14	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik				30	40	50	60	70	30					30				
15	Sekolah pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik				7.60	40	50	60	70	7.60					7.60				
14	Fasilitas Pendidikan				30	40	50	60	70	30					30				
13	Rasio ketersediaan Sekolah / Penduduk usia sekolah dasar				115.09	94	94	94	94	115.09					115.09				



14	Rasio ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk usia sekolah menengah				1.98	3.28	3.35	4.65	4.72	1.98					1.98				
15	Rasio Guru/Murid sekolah pendidikan dasar (SD/ Mi dan SMP/ Mts)				0,05	0.75	0.8	0.85	0.9	0.05					0.05				
17	Rasio Guru / Murid perkelas rata-rata sekolah dasar				124.01	0.75	0.8	0.85	0.9	124.01					124.01				
18	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah				88.00	89.00	90	93	95	88.00					88.00				
19	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar				29.07	33.70	37.05	40.40	43.75	29.07					29.07				
20	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki				100	89.00	90	93	95	100					100				



21	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)				145.83	98.04	98.05	98.07	98.08	145.83					145.83				
22	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV				88	90	94	95	97	88					88				
23	Penyelenggaraan festival seni budaya				7	8	9	10	11	7					7				
24	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan				60	65	68	69	70	60					60				
25	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventaris				4	4	5	6	7	4					4				
26	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu				24	28	32	32	36	24					24				
27	Rata - Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah				100	100	100	100	100	100					100				
28	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,				100	100	100	100	100	100					100				



	penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan																	
29	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)				8	8	7	7	7	8					8			
30	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan (Orang)					2												
31	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)				27	27	1	1	1	27					27			
32	Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)				27	27	1	1	1	27					27			



33	Jumlah Dokumen DPA-PD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1					1				
34	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD (Dokumen)				1	1	1	1	1	1					1				
35	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Laporan)				5	5	1	1	1	5					5				
36	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD (Laporan)				1	1	1	5	5	1					1				
37	Jumlah Dewan Pendidikan yang melakukan Evaluasi (Orang)				10		10	10	10	10					10				
38	Frekuensi Pelaksanaan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan di satuan pendidikan (Kali)						1	1	1										



39	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu					100	100	100	100									
40	Jumlah ASN yang tersedia Gaji dan Tunjangannya (Orang/Bulan)					840000	840000	840000	840000	840000	840000					840000		
41	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Laporan)					5	5	5	5	5	5					5		
42	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran (Laporan)							12	12	12								
43	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar					100	100	100	100	100	100					100		
44	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD (Dokumen)						-	-	1	1								
45	Jumlah BMD-PD yang diamankan serta dokumen Penghapusan Aset pada					1	1	1	1	1	1					1		



	satuan Pendidikan (Dokumen)																		
46	Persentase Pegawai PD yang dilayani				100	0	100	100	100	100					100				
47	Jumlah ASN yang disediakan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Orang)					-	-	50	-										
48	Jumlah guru yang menerima DUPAK (Orang)				50	-	50	50	10	50					50				
49	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)					-	-	1	-										
50	Jumlah Peserta Seleksi Administrasi dan Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah (Orang)					-	83	-	-										
51	Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah (Orang)					-	83	-	-										



52	Jumlah Peserta Diklat Profesi Guru (Orang)					-	20	-	-									
53	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek (Orang)					-	13	17	1									
54	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar				100	100	100	100	100	100					100			
55	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)				4	4	10	5	3	4					4			
56	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Unit)					14												
57	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)				20	20				20					20			



58	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan (Lembar)						10000	10000	5000										
59	Jumlah Penyediaan Kolom Adventorial (Kolom)					2	2	2	2										
60	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)				12	12	12	12	12	12					12				
61	Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara (orang)				120	120	140	160	100	120					120				
62	Jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu (Laporan)				12	12	12	12	12	12					12				



63	Jumlah Laporan pengelolaan data pokok pendidikan (Laporan)				12	12	12	12	12	12					12				
64	Jumlah Data Base Pendidikan yang dibuat (Data Base)					-	1	-	-										
65	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi				100	100	100	100	100	100					100				
66	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)					-	-	10	3										
67	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan (Gedung)					-	3	-	-										
68	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)				9	4	9	5	1	9					9				
69	Jumlah jenis sarana pertunjukan pementasan (Jenis)					3	-	-	-										



70	Jumlah jenis pengadaan mebel pembentukan sekretariat Pokja Bunda PAUD (jenis)					5	-	-	-									
71	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia					100	100	100	100	100	100					100		
72	Jumlah surat keluar (Exampler)					750000	7500	7500	7500	7500	750000					750000		
73	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)					10	10	10	10	10	10					10		
74	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai (Kali)					12	12	12	12	12	12					12		
75	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kali)					12	12	12	12	12	12					12		



76	Jumlah Non PNS yang disediakan Gajinya (orang/Bulan)				344	1032	1044	1044	1044	344					344				
77	Jenis bahan/jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)				12	12	5	5	5	12					12				
78	Jumlah ASN dan Tamu yang Terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman) (Orang)				12	200	300	300	50	12					12				
79	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara				100	100	100	100	100	100					100				
80	Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang dipelihara (Unit)				12	1	1	1	1	12					12				
81	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)				12	5	5	5	3	12					12				



82	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya (Unit)				12	10	5	5	5	12					12				
83	Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Meter)				12	70	30	140	25	12					12				
84	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)				12	-	5	5	3	12					12				
85	Persentase Penataan Organisasi					100	0	0	0										
86	Jumlah Satuan Pendidikan/Lembaga yang di Evaluasi (Sekolah/Lembaga) (Sekolah)					854	-	-											
87	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)				100	100	100	100	100	100					100				



88	persentase WNI umur 7 - 15 tahun yang berpartisipasi pada SD/ MI / SMP/ MTS				100	100	100	100	100	100					100				
89	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				100	100	100	100	100	100					100				
90	Jumlah gedung seklah / ruang kelas / ruang guru yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)				12	3	2	2	2	12					12				
91	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Ruang)					5	3	3	3										
92	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)				5	1	2	2	2	5					5				
93	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				2	2	2	2	2	2					2				



	yang dibangun (Sekolah)																		
94	Jumlah taman baca yang dibangun (Taman Baca)					1	-	1	1										
95	Jumlah ruang kelas/ruang guru / gedung yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)				5	11	4	4	4	5					5				
96	Jumlah sekolah penerima rehabilitasi ruang kelas (Sekolah)				4	1	1	1	1	4					4				
97	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)				11		2	2	2	11					11				
98	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (Sekolah)					-	-	1	1										



99	Jumlah Luas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara (Meter)					-	-	50	50									
100	Jumlah Luas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara (Meter)						-	30	30									
101	Jumlah Sekolah TK dan KB Penerima Pengadaan Mobiler (Sekolah)					-	1	1	1									
102	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)							7	7									
103	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)				8	1	-	-	-	8					8			
104	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan				650	650	650	650	650	650					650			



	(SPM) (Orang)																		
105	Jumlah peserta Didik PAUD Yang menerima Biaya Personil (Anak)					-	30	30	30										
106	Jumlah PAUD Penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)					-	-	1	1										
107	Jumlah peserta kegiatan lomba kreatifitas (Lembaga)			14		14	14	14	14	14					14				
108	Jumlah Lemgaga yang Mengikuti Gebyar PAUD (Lembaga)			20		-	20	20	20	20					20				
109	Frekuensi pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Kali)					-	-	1	1										
110	Jumlah Desa/Kecamatan yang Mengikuti						14	14	14										



	implemtasi Mandiri Belajar PAUD (Kecamatan)																		
111	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidkan PAUD (Sekolah)						50	50											
112	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)			50		50	50	50	50					50					
113	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Orang)						10	5	5										
114	Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba bunda PAUD (kecamatan)						14	14	14										



115	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)						1	1	1										
116	Jumlah Pendidik Non ASN yang Menerima Gaji (Orang/Bulan)				770	9840	10440	10440	10440	770					770				
117	Jumlah Operator yang tersedia di Satuan PAUD (Orang/Bulan)							358	358										
118	Jumlah kepala sekolah PAUD (TK/KB/TPA/SP S) yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)						181	181	181										
119	Jumlah tenaga pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SP S) yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)					-	181	181	181										



120	Jumlah Penilik/Pengawas PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)						40	40	40									
121	waktu Pengelolaan Sertifikasi Guru (Bulan)				12	12	12	12	12	12					12			
122	Jumlah Peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (Orang)					-	300	300	300									
123	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba (Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini) (Lembaga)				20	20	-	-	-	20					20			
124	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (Sekolah)						-	130	130	130								



125	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sarana dan Prasarana Satuan PAUD (Kali)					-	1	1	1									
126	Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)				20	20	-	-	-	20					20			
127	Jumlah lembaga sosialisasi Desa Mandiri Belajar PAUD (Lembaga)					50	-	-	-									
128	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)				50	50	-	-	-	50					50			
129	Jumlah tenaga pendidik TK yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)					50	-	-	-									
130	Jumlah kegiatan pelaksanaan					1	-	-	-									



	koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Kegiatan)																		
131	Jumlah peserta lomba profil bunda PAUD kecamatan (Kecamatan)					14	-	-	-										
132	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)					1	-	-	-										
133	jumlah TK negeri penerima dana operasional rutin sekolah (TK)					12	-	-	-										
134	waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan akses pendidikan PAUD (Bulan)					12	-	-	-										



135	Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD (Bulan)				12	12	12	12	12	12					12				
136	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan BOP PAUD DAK Non Fisik (Lembaga)				363	363	363	363	363	363					363				
137	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI				100	100	100	100	100	100					100				
138	Jumlah Sekolah yang menerima Penambahan Ruang Kelas Baru (Ruang)				5			-		5					5				
139	Jumlah sekolah penerima penambahan Ruang Kelas Baru dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)					6	30	35	40										
140	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di				11	3	1	3	6	11					11				



	biayai oleh (DAK) (Ruang)																		
141	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)				11	6		6	6	11					11				
142	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)				15	-	2	2	2	15					15				
143	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)				7	2	5	5	5	7					7				
144	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Sekolah)					15	24	2	2										



145	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perenjaga Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)				2	-	1	1	7	2					2				
146	Jumlah Ruang Kelas SD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)				120	116	6	50	50	120					120				
147	Jumlah ruang Kelas SD yang di rehabilitasi (Ruang)					1	9	1	1										
148	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TUyang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)				39	11	3	3	11	39					39				
149	Jumlah Ruang Rehabilitasi Unit Kesehatan Sekolah di					4	4	4	4										



	Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)																		
150	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK) dan di biayai oleh (Ruang)				60	10	2	2	10	60					60				
151	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)				25	50	13	13	13	25					25				
152	Jumlah sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)				1	1	1	1	1	1					1				
153	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas				20	17	4	4	17	20					20				



	Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Unit)																		
154	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah (Unit)						1	1	1										
155	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)					-	-		100										
156	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (Sekolah)					3	3	3	3										
157	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan belajar (Sekolah)					-	-	2	2										



158	Jumlah siswa penerima Pengadaan Perlengkapan (SPM) SD (Orang)				100	250	300	300	300	100					100				
159	Jumlah Luas Saranan, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)					-	500	50	50										
160	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi /Tidak Mampu Tingkat SD (Orang)				1000	-	500	500	500	1000					1000				
161	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)					-	-	100	100										
162	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)					-	12	12	12										
163	Jumlah paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				330	52	10	52	52	330					330				



	(DAK) (Paket)																		
164	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) SD (Orang)					-	200	200	200										
165	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah SD (Bulan)					-	2	2	2										
166	Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasana SD (Kali)					-	1	1	1										
167	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK					-	-	50	50										



	Bidang Pendidikan Dasar (Orang)																		
168	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa SD (Orang)				40	30	30	100	100	40					40				
169	Jumlah pelaksanaan kegiatan JAMNAS (Kali)					1	1	-	-										
170	Jumlah Peserta Lomba Siswa Berprestasi (Orang)					-	84	84	84										
171	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)				50	-	350	350	350	50					50				
172	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti					80	150	150	150										



	kegiatan Peningkatan kompetensi (Orang)																		
173	Jumlah kepala sekolah SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)					80	150	150	150										
174	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)					45	40	40	40										
175	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SD (Orang)					40	-												
176	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SD (Orang)					40	-												
177	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti supervisi mutu (Orang)					11	-												
178	jumlah peserta lomba pengawas SD berprestasi					35	-												



	(Orang)																		
179	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SD (Orang)				80	-	-	-											
180	Jumlah peserta pendidik yang mengikuti pengembangan Karir di sekolah dasar (Peningkatan Kompetensi) (Orang)				50	-	-	-											
181	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti MBS SD (Orang)			100	100	100	100	100	100					100					
182	Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)			25	25	-	-	-	25					25					
183	Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa			100	500	-	-	-	100					100					



	(Orang)																		
184	Jumlah Ranperda yang diselesaikan tepat waktu (Ranperda)					1	-	-	-										
185	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat kab. Wajo (Sekolah)				1	42	42	42	42	1					1				
186	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos Pusat) (Bulan)				12	12	12	12	12	12					12				
187	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD (Bulan)				12	12	12	12	12	12					12				
188	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SD				397	397	397	397	397	397					397				



	(Sekolah)																		
189	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SD (Sekolah)				397	397	397	397	397	397					397				
190	persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS				100	100	100	100	100	100					100				
191	Jumlah sekolah penerima penambahan runag kelas Baru dan dibiayai oleh (DAK) Ruang)					-	10	20	20										
192	Jumlah sekolah penambahan Ruang kelas Baru APBD (Ruang)					-	3	3	3										
193	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					-	10	5	5										



194	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					-	-	5	5									
195	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					-	15	10	10									
196	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Laboratorium dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)			4		-	10	5	5	4				4				
197	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)			3		-	10	10	10	3				3				



198	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)				4	-	3	3	3	4					4				
199	Jumlah sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)					3	5	5	5										
200	Jumlah ruang gedung sekolah (ruang kepala sekolah / ruang tata usaha yang direhabilitasi sedang berat) dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					15	15	15	15										
201	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang / berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)				21	83	15	15	15	21					21				
202	Jumlah ruang Kelas SMP yang di rehabilitasi					-	-	1	1										



	(Ruang)																		
203	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)				4	6	5	5	5	4					4				
204	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Ruang)					-	-	2	2										
205	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					2	6	6	6										
206	Jumlah laboratorium (IPA dan Komputer) yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)				4	3	5	5	5	4					4				
207	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi				14	5	10	10	10	14					14				



	Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (Ruang)																		
208	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Unit)					-	-	2	2										
209	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet dan Ruang Ibadah) yang di rehabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					2	5	5	5										
210	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang)				6	3	8	8	8	6					6				
211	Jumlah sekolah penerima Pengadaan					-	-	2	2										



	Mebeluer Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)																		
212	Jumlah sekolah penerima mobiler sekolah SMP (Sekolah)					20	20	20	20										
213	Jumlah sekolah yang menerima perlengkapan Belajar (Sekolah)					3	1	1	1										
214	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah menengah pertama (SPM) (Orang)					-	-	1	1										
215	Jumlah luas Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)				100	200	200	200	200	100					100				
216	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi dan Tidak Mampu Tingkat SMP					-	-	50	50										



	(Orang)																		
217	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)					-	500	500	500										
218	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)					-	-	74	74										
219	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)					-	12	12	12										
220	Jumlah siswa penerima Perlengkapan Belajar (Orang)							20	20										
221	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lab. IPA, TIK, dan Media Pendidikan) dan dibiayai oleh					-	-	50	50										



	(DAK) (Sekolah)																		
222	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) (Orang)				24	20	10	10	10	24					24				
223	Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah (kali)					-	74	74	74										
224	Frekuensi Pelaksanaan Monitoring keterlaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMP (Kali)					-	2	2	2										
225	Waktu pelaksanaan PPDB Online					-	-	1	1										



	(Bulan)																		
226	Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SMP (kali)				12	12	12	12	12	12					12				
227	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Menengah (Orang)						1	1	1										
228	Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP (Orang)					-	-	20	20										
229	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)					20	10	10	10										



230	Jumlah peserta lomba siswa berprestasi SMP (Orang)					-	100	100	100										
231	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka (orang)					-	100	100	100										
232	Jumlah peserta pelatihan UKS SMP (Orang)					-	100	100	100										
233	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP (Orang)					-	100	50	50										
234	Jumlah peserta LDK OSIS SMP (Orang)					-	-	50	50										
235	Jumlah kepala sekolah SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)					-	100	100	100										
236	Jumlah Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi					-	74	74	74										



	(Orang)																		
237	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)					-	74	74	74										
238	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SMP (Orang)					-	22	22	22										
239	jumlah Pengelola Lab. Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)					-	-	80	80										
240	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SMP (Orang)					-	-	80	80										
241	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SMP (Orang)					-	-	40	40										



242	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti supervisi mutu (Orang)					-	-	40	40										
243	jumlah peserta lomba pengawas SMP berprestasi (Orang)					-	-	11	11										
244	Jumlah siswa sekolah Menengah pertama dan Mahasiswa yang menerima Beasiswa (Orang)					-	-	40	40										
245	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan kompetensi tenaga pendidik SMP (Orang)				500	500	-	-	-	500					500				
246	Waktu Belanja Rutin SMPN (Bulan)					50	-	-	-										
247	Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS SMP				12	12	-	-	-	12					12				



248	Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru				74	74	74	74	74	74					74				
249	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMP (Bulan)				40	40				40					40				
250	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bos Pusat) SMP (Bulan)				12	12	12	12	12	12					12				
251	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SMP (Sekolah)				12	12	12	12	12	12					12				
252	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SMP (Sekolah)				84	84	84	84	84	84					84				



253	Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (%)				100	100	100	100	100	100					100				
254	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					-	-	1	1										
255	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)					-	-	1	1										



256	Jumlah ruang praktik/ gedung Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					5	-	1	1										
257	Jumlah sekolah penerima ehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)					-	-	1	1										
258	Jumlah Luas sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dipelihara (Meter)					-	-	50	50										
259	Jumlah Lembaga (SKB/PKBM) penerima pengadaan					-	-	1	1										



	Mobiler dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)																		
260	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa (SPM) (Orang)				125	125	150	150	150	125					125				
261	Jumlah Peserta penerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Orang)					-	-	50	50										
262	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)				3	1	10	10	10	3					3				
263	Jumlah peserta didik Keaksaraan (Orang)				40	40	100	100	100	40					40				



264	Jumlah peserta PKBM pendidikan kecakapan hidup (orang)					-	9	9	9										
265	Frekuensi Pendataan Penuntasan Buta Aksara (Kali)					-	1	1	1										
266	Jumlah Peserta Kegiatan PKBM (PKBM)					-	9	9	9										
267	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kali)					-	1	1	1										
268	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)					-	-	50	50										



269	Waktu operasional rutin SKB (Bulan)				12	12	-	12	12	12					12				
270	Waktu pelaksanaan BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Bulan)				12	12	-	-	-	12					12				
271	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Akreditasi satuan pendidikan SKB (Lembaga)						-	-	-	1									
272	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Pendirian satuan pendidikan PKBM (Lembaga)						-	-	-	9									
273	Frekuensi Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (Kali)						-	1	1	1									
274	Jumlah Lembaga penerima BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Lembaga)						-	12	12	12									



275	persentase penerapan kurikulum muatan lokal apada jenjang pendidikan dasar				0	0	0	100	100	0					0				
276	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum				0	0	0	100	100						0				
277	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)						-	-	100	100									
278	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)						-	-	100	100									
279	Jumlah PTK yang telah mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mata						-	-	100	100									



	Pelajaran Muatan Lokal (Orang)																		
280	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum				0	0	0	100	100	0					0				
281	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)						-	-	50	50									
282	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)						-	-	50	50									
283	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0	0	0%	100	100	0					0				



284	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				0	0	0%	100	100	0					0				
285	Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang akan dipetakan dengan baik (Orang)					-	-	6000	6000										
286	Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang akan ditata dan didistribusikan dengan baik ke satuan pendidikan dan lembaga (Orang)					-	-	500	500										
287	Persentase lembaga pendidikan yang				0	0	0	100	100	0					0				



	berakreditasi																		
288	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				0	0	0	100	100	0					0				
289	Jumlah Lembaga PAUD baru yang diusulkan penerbitan perizinannya (Lembaga)					-	-	100	100										
290	Persentase Pengembangan Budaya				100		100	100	100	100					100				
291	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-	100	100	100	100					100				



292	Frekuensi pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (Kali)					-	-	1	1									
293	Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Pelestarian Lagu-lagu Daerah (Orang)					-	20	20	20									
294	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kesenian (Kecamatan)					-	14	14	14									
295	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				100		100	100	100	100					100			
296	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					-	-	3	3									



	(Objek)																		
297	Jumlah Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya (Kali)					-	1	1	1										
298	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100	100	100	100	100	100					100				
299	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100	100	100	100					100				
300	jumlah peserta gita bahana nusantara (Orang)				50		50	50	50	50					50				
301	jumlah Peserta festival pelajar (Orang)					-	-	50	50										
302	jumlah peserta pagelaran budaya daerah (sanggar seni)					17	-	17	17										



303	jumlah peserta bahana ekspresi pelajar (Orang)				15	15	15	15	15	15					15				
304	Jumlah Peserta Pagelaran Kesenian Tradisional Tingkat SMP Sederajat (Orang)					-	50	50	50										
305	Jumlah Peserta Lomba Lagu Daerah Tingkat PAUD, SD dan SMP (Orang)					-	50 g	50	50										
306	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota				100	100	100	100	100	100					100				
307	Persentase pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100	100	100	100	100	100					100				
308	jumlah peserta lomba cerita rakyat (Orang)				25	25	25	25	25	25					25				



309	Frekuensi Pelaksanaan Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah (Bulan)					-	1	1	1									
310	Jumlah Perda Pemajuan Budaya yang disusun (Perda)					1	-	-	-									
311	Frekuensi pelaksanaan Pekan Raya Sulawesi selatan (Kali)					-	-	-	1									
312	Frekuensi pelaksanaan Festival keraton Nusantara (Kali)				1	-	-	-	1	1					1			
313	Frekuensi pelaksanaan Pekan Budaya Nasional (Kali)					-	-	1	1									
314	jumlah peserta seminar budaya (Orang)				80	-	80	80	80	80					80			
315	jumlah peserta pekan budaya daerah (Orang)				1000	-	-	500	500	1000					1000			



316	Jumlah Buku Sejarah Lokal yang diterbitkan (Eksampler)					-	100	100	100									
317	Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Orang)					-	-	-	80									
318	Jumlah buku Kapita Selecta Sejarah Sul-sel dan Buku Kapita Selecta Kebudayaan Su-sel yang di cetak (Eksampler)					-	-	120	-									
319	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				100	100	100	100	100	100					100			
320	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100	100	100	100	100	100					100			
321	jumlah penambahan cagar budaya yang baru				3	3	15	17	20	3					3			



	diregistrasi																		
322	jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)					-	-	3	3										
323	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100		100	100	100	100					100				
324	jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)					-	1	1	1										
325	Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)					-	50	50	25										
326	Jumlah Cagar Budaya yang didata (Cagar Budaya)					-	21	25	25										
327	Jumlah Modul Cagar Budaya yang dibuat (Modul)					-	100	-	-										
328	jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan (Cagar Budaya)					-	-	-	3										



329	Persentase sarana dan prasarana museum yang terpelihara							100	100										
330	cakupan sarana dan prasarana museum yang dikelola							100	100										
331	jumlah Objek museum yang dikoleksi (Objek)					-	-	-	1										
332	Jumlah SDM Permuseuman yang dilatih (Orang)					-	-	20	20										
333	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan Akses terhadap Museum (Orang)					-	-	5000	5000										
334	Jumlah sarana dan prasarana Museum yang dipelihara (Buah)					-	-	50	50										



Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kab Wajo

Uraian (PP 58/2005)		Realisasi 2020	Uraian (PP 12/2019)	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	
1	Dana Perimbangan	54,103,410,294	2	Pendapatan Transfer	381,673,371,910	318,824,178,028	217,833,937,522	222,454,450,800
	Dana Alokasi Khusus	54,103,410,294		DAU	115,213,454,910	112,111,056,865	6,099,999,999	4,220,767,289
				DAK Fisik	49,133,518,000	33,414,035,823	38,248,369,257	43,782,132,711
				DAK Non Fisik	177,326,399,000	173,299,085,340	173,485,568,266	174,451,550,800
	Belanja			Belanja	341,673,371,910	318,824,178,028	217,833,937,522	222,454,450,800
				Belanja Operasi	290,847,115,110	260,346,551,915	149,356,311,409	153,976,824,687
	Belanja Pegawai	155,823,964,337		Belanja Pegawai	222,505,431,510	231,640,378,971	120,868,384,803	125,488,898,081
				Belanja Barang dan jasa	14,941,396,600	20,544,622,944	20,544,622,944	20,544,622,944
				Belanja Hibah	53,380,487,000	8,161,550,000	7,943,303,662	7,943,303,662
				Belanja Bantuan Sosial	19,800,000			
				Belanja Modal	50,826,256,800	58,477,626,113	68,477,626,113	68,477,626,113
	Belanja Langsung	110,618,930,510		Belanja Modal	50,826,256,800	58,477,626,113	68,477,626,113	68,477,626,113



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan PD

2.4.1. Hasil Telaah Renstra K/L dan Provinsi

2.4.1.1. Analisis terhadap Kebijakan Nasional dalam Bidang Aparatur Negara

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, yang mengarah pada penguatan layanan pendidikan, sejalan dengan itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Visi “ **Terbentuknya Insan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong**”

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 -2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perilaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat.
2. Mewujudkan Akses yang meluas, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu.
4. Mewujudkan Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

Adapun Tujuan dan sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan.
2. Pembedayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan.
3. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan



6. Peningkatan Sistem Tata Kelola Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik.

2.4.1.2. Analisis terhadap Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan rancangan akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2018-2023, yaitu “ Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”, maka misi yang diemban adalah :

1. Pemeritahan yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter.
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas Sulawesi Selatan dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan menjabarkan visi dan misi tersebut dalam tujuan dan sasaran rencana strategis 2018 - 2023 yaitu :

1. Mempercepat ketuntasan program wajib belajar, program pendidikan universal dan program pendidikan orang dewasa (melek huruf);
2. Memfasilitasi pengembangan sistem pembelajaran bermakna (berkualitas dan berkarakter);
3. Menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
4. Memfasilitasi bantuan subsidi untuk keterjangkauan layanan pendidikan untuk semua jenjang;

Mengelola manajemen pendidikan secara akuntabel, profesional dan bertanggungjawab.

Pemerintah Sulawesi Selatan dalam menguraikan arah kebijakan meletakkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik dan yang terpenting meningkatkan kompetensi tenaga pendidik untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin pesat sebagai media dalam proses pembelajaran.



Pembangunan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepariwisataan yang tergambar dalam misi Gubernur Sulawesi Selatan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Destinasi pariwisata yang berbasis Budaya dan Alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.



Tabel 2.4.1
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TERHADAP
SASARAN RENSTRA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN RENSTRA K/L

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN SASARAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO	SASARAN PADA RENSTRA PROVINSI	SASARAN PADA RENSTRA K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Angka Melek Huruf	98,77	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sulsel	Meningkatnya jumlah WNI yang dapat membaca dan menulis
2	Angka Lama Sekolah	7.92 Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sulsel	Meningkatnya kualitas pendidikan
3	Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan	100 %	Meningkatnya Capaian SPM Pendidikan	Meningkatnya Capaian SPM Pendidikan
4	Harapan Lama Sekolah	13.11 Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sulsel -	Meningkatnya kualitas pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar	93 %	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sulsel -	Meningkatnya Akses pendidikan
6	Angka Partisipasi Kasar	80,22%	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat sulsel -	Meningkatnya Akses pendidikan -
7	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	87%	Persentase guru yang memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasi S1	Meningkatnya tenaga pendidik yang bersertifikat dan S1

Dari table diatas, terdapat kesesuaian antara renstra Dinas Pendidikan



2.4.2. Hasil Telaah RT RW dan KLHS

Tabel 2.4.2
HASIL TELAHAH POLA RUANG / WILAYAH KABUPATEN WAJO

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan lindung:	Kawasan lindung:	Perwujudan Kawasan Lindung	Tidak terdapat pengaruh rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat arahan lokasi pengembangan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1) kawasan hutan lindung;	1) kawasan hutan lindung;	1) Hutan Lindung:		
	2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	a. Penetapan tata batas kawasan		
	3) kawasan perlindungan setempat;	3) kawasan perlindungan setempat;	b. Inventarisasi kondisi kawasan		
	4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;	4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;	c. Evaluasi hak penguasaan lahan yang telah direkomendasikan Pemkab ke Pemprov dan Nasional		
	5) kawasan rawan bencana alam;	5) kawasan rawan bencana alam;	d. Penghutan kembali, reboisasi hutan lindung		



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
	6) kawasan lindung geologi	6) kawasan lindung geologi	e. Pengelolaan hutan bersama masyarakat		
	7) kawasan lindung lainnya	7) kawasan lindung lainnya	2) Cagar Alam (pengembangan & pengelolaan) :		
			a. Penghutanan kembali dan reboisasi Kawasan		
			b. Melakukan pengawasan, pengamanan Kawasan		
			3) Konservasi Perairan		
			a. Perencanaan kawasan-kawasan resapan air yang berfungsi hidrologis.		
			b. Pengendalian kawasan untuk menunjang fungsi kawasan & pelestarian lingkungan.		
			c. Rehabilitasi DAS Walanae, DAS Bila, DAS Gilireng, DAS Siwa, DAS Keera dan DAS Awo		
			4) Sempa dan Sungai		
			a. Penataan ruang sekitar sungai (rekayasa teknis & non teknis)		
			b. Konservasilahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor		
			5) Sempa dan Pantai		
			a. Penataan ruang kawasan sekitar pantai (rekayasa teknis dan non teknis)		



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
			b. Menyusun pengelolaan terpadu kawasan pesisir untuk pengembangan kegiatan budidaya 6) Kawasan Sekitar Danau Tempe a. Rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau. b. Menata ulang kawasan untuk meningkatkan fungsi kawasan 7) Mitigasi Kawasan Rawan Bencana		
2	Kawasan budidaya: 1) kawasan peruntukan hutan produksi i; 2) kawasan peruntukan hutan rakyat; 3) kawasan peruntukan pertanian; 4) kawasan peruntukan perikanan; 5) kawasan peruntukan peternakan; 6) kawasan peruntukan pertambangan; 7) kawasan peruntukan industri;	Kawasan budidaya: 1) kawasan peruntukan hutan produksi; 2) kawasan peruntukan hutan rakyat; 3) kawasan peruntukan pertanian; 4) kawasan peruntukan perikanan; 5) kawasan peruntukan peternakan; 6) kawasan peruntukan pertambangan; 7) kawasan peruntukan industri;	Perwujudan Kawasan Budidaya 1) Kawasan Pertanian Lahan Basah a. Pengembangan prasarana pengairan b. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang subur c. Perluasan areal persawahan d. Peningkatan dan pembangunan pangan berkelanjutan e. Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan tanaman pangan 2) Kawasan Pertanian Lahan Kering	Tidak terdapat pengaruh rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat arahan lokasi pengembangan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
	8) kawasan peruntukan pariwisata;	8) kawasan peruntukan pariwisata;	a. Perluasan areal pertanian lahan kering		
	9) kawasan peruntukan permukiman; dan	9) kawasan peruntukan permukiman; dan	b. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah		
	10) kawasan peruntukan lainnya.	10) kawasan peruntukan lainnya.	c. Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal		
			3) Kawasan Perkebunan		
			a. Perluasan dan peremajaan areal perkebunan		
			b. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lainnya		
			c. Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya		
			4) Kawasan Peternakan		
			a. Pengembangan kawasan peternakan/ pengembalaan secara intensif		
			b. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.		
			5) Kawasan Perikanan		
			a. Program optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan		
			b. Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> c. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar d. Program Pengembangan perikanan tangkap dan armada nelayan e. Program Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat f. Pengembangan produksi perikanan dengan tetap menjaga kelestariannya g. Program Peningkatan sarana prasarana BBI Kec. Maniangpajo h. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan terpadu (Minapolitan) 6) Kawasan Hutan Produksi Tetap : <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan batas kawasan hutan produksi tetap b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan c. Mengusahakan hutan produksi tetap melalui dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat 7) Kawasan Hutan Produksi Terbatas: <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan batas kawasan hutan produksi 		



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan HPH dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat c. Pengawasan secara ketat pada kewajiban reboisasi dan rehabilitasi tanah pada bekas tebangan HPH d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya 8) Kawasan Perdagangan dan Jasa : <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kawasan perdagangan regional b. Pengembangan sektor jasa-jasa perkotaan dan perdesaan inter dan antar regional 9) Kawasan Permukiman : <ul style="list-style-type: none"> a. Penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, RTRK/RTBL) amanah UU No. 26 Tahun 2007. b. Penyusunan instrumen pengendalian kawasan perkotaan (Zoning Regulation). c. Pengembangan permukiman perdesaan menjadi pusat pertumbuhan d. Pengembangan permukiman perdesaan menjadi pusat pertumbuhan 		



NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan prasarana perhubungan untuk aksesibilitas desa-kota, wilayah dan produksi, pemasaran hasil-hasil pertanian 10) Kawasan Pertambangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan dan pengendalian kegiatan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung b. Pengendalian fungsi lindung dan rahabilitasi tanah pada kawasan-kawasan bekas kuasa pertambangan 11) KawasanPariwisata <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan RIP Pariwisata b. Penyusunan RD & ZR kawasan pariwisata c. Peningkatan sarana dan prasarana wisata d. Program manajemen & peningkatan mutu wisata e. Program Peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat f. Pengembangan jasa, cinderamata, SDM 12) Kawasan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Penetapan Kawasan Industri b. Penyiapan pelaksanaan Kawasan Industri c. Penyiapan infrastruktur pendukung 		



Tabel 2.4.3.

HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN WAJO

RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
Pusat-pusat kegiatan;	Pusat-pusat kegiatan;	Perwujudan Pusat Kegiatan:	Tidak terdapat pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat arahan lokasi pengembangan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);	1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);	1) Peningkatan peran Sengkang sebagai pusat PKW, regional dan antar regional		
2) Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);	2) Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp);	a. Program Penataan ruang kawasan perkotaan (RDTR, ZR, RTRK/BL)		
3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan	3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan	b. Program revitalisasi dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan		
4) Pusat Pelayanan Lokal (PPL).	4) Pusat Pelayanan Lokal (PPL).	c. Program peningkatan pelayanan umum dan pemerintahan		
		d. Program pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa regional dan antar regional		
		e. Program pembangunan dan peningkatan RTH di kawasan perkotaan		
		2) Peningkatan Peran Kota PKLp dan PPK sebagai pelayanan Antar Kawasan : a. Program pengembangan dan		



RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
		<p>peningkatan kawasan industri perikanan (Minapolitan).</p> <p>b. Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pariwisata</p>		
		<p>c. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan</p> <p>3) Peningkatan Peran Kota PPL sebagai pelayanan Kawasan/Kecamatan:</p> <p>a. Mendorong pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perdagangan, pariwisata, agroindustri, dan permukiman secara berimbang dan lestari</p> <p>b. Program penyeimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan kecamatan.</p>		
Sistem jaringan prasarana utama :	Sistem jaringan prasarana utama :	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah:	Tidak terdapat pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat arahan lokasi pengembangan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1) Sistem jaringan transportasi darat	1) Sistem jaringan transportasi darat	1) Sistem Prasarana Transportasi		
2) Sistem jaringan transportasi laut	2) Sistem jaringan transportasi laut	<p>a. Pengembangan Terminal Induk</p> <p>b. Peningkatan Ruas Jalan Arteri/Trans Sulawesi (Anabanua- Sidrap dan Anabanua- Luwu)</p>		



RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Peningkatan Ruas Jalan Kolektor Menghubungkan Kota Sengkangke Bone, dan Soppeng d. Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten 		
		<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan Ruas Jalan Kolektor dan Lokal Menghubungkan antar kecamatan dan pusat-pusat lingkungan f. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan g. Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan dan PPI 		
Sistem jaringan prasarana lainnya :	Sistem jaringan prasarana lainnya :		Tidak terdapat pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat arahan lokasi pengembangan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1) Sistem jaringan energi;	1) Sistem jaringan energi;	1) Sistem Prasarana Energi: <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Gas b. Peningkatan dan Pengembangan PLTG c. Peningkatan Daya dan sambungan Listrik untuk pelayanan masyarakat d. Pembangunan jaringan listrik ke wilayah-wilayah tertinggal dan atau terisolasi 		



RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
		e. Pengembangan Sistem Jaringan Gas untuk Sambungan Rumah f. Penyusunan Master Plan Kelistrikan		
2) Sistem jaringan telekomunikasi;	2) Sistem jaringan telekomunikasi;	2) Sistem Prasarana Telekomunikasi : a. Pembangunan dan peningkatan BTS Swasta		
		b. Peningkatan daya sambung telepon ke fas. sosial, ekonomi, umum, permukiman dan daerah baru		
3) Sistem jaringan sumber daya air	3) Sistem jaringan sumber daya air	3) Sistem Prasarana Sumber daya Air: a. Program Penyusunan Master Plan Sistem Air Bersih perkotaan dan perdesaan b. Program pembangunan & peningkatan sistem air bersih di perkotaan dan perdesaan c. Rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada d. Program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air potensial		



RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> e. Program Peningkatan Sumber Air bersih Perkotaan dan Perdesaan f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih g. Peningkatan Kinerja dan rehabilitasi DAM Kalola h. Peningkatan kinerja dan rehabilitasi jaringan irigasi 		
4) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.	4) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> 4) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan kualitas dan kuantitas drainase b. Penanganan kawasan banjir c. Penyusunan Master Plan Sistem Drainase d. Program Pembuatan Kolam Retensi penanganan air hujan e. Peningkatan sistem drainase perkotaan (terbuka) f. Peningkatan Sistem TPA (<i>re-design, controlled landfill</i>) g. Peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, sistem transfer depo h. Penerapan R3 untuk nilai ekonomis sampah TPA Regional 		



RENCANA STRUKTUR RUANG	STRUKTUR RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
		i. Studi FS dan Pembangunan TPA baru j. Peningkatan sistem manajemen persampahan k. Program pengelolaan limbah industri & pertambangan, permukiman		

Tabel 2.4.4.

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KLHS KABUPATEN WAJO

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5
1	Daya Dukung dan Daya Tampung		Tidak terdapat implikasi daya dukung dan daya tampung terhadap kebutuhan pelayanan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak terdapat catatan bagi perumusan program dan kegiatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	a) Pangan	a) Status penyediaan bahan pangan di Kabupaten Wajo masih cukup bagus dimana 97,1 % wilayahnya belum melampaui ambang batas		
	b) Air bersih	b) Status penyediaan air bersih di Kabupaten Wajo 100% wilayahnya belum terlampaui.		







BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masa mendatang. Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo:

1. Akses

- a. Daya serap peserta didik yang lulus dari PAUD ke SD serta dari SD ke SMP semakin berkurang
- b. Kondisi sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai.
- c. Masih terdapat warga yang belum menuntaskan pendidikan dasar;
- d. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
- e. Layanan lembaga PAUD masih sangat jarang di tingkat dusun, lebih banyak di ibukota desa

2. Mutu

- a. Belum tuntasnya pelaksanaan kurikulum K-13 di beberapa sekolah utamanya jenjang SD
- b. Kurangnya pelaksanaan lomba-lomba terkait siswa dan guru akibat kurangnya ketersediaan anggaran
- c. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- d. Kesenjangan kompetensi siswa antarsekolah;
- e. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. Jumlah tenaga honorer guru hampir sebanding dengan jumlah PNS Guru
- g. Persebaran pendidik belum proporsional;
- h. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi



kualifikasi;

- i. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan nonformal;
- j. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.

3. Tata kelola

- a. Masih rendahnya koordinasi antar OPD terkait perizinan penyelenggaraan lembaga pendidikan
- b. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang mekanisme pendirian sekolah
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat terkait pengembangan kebudayaan daerah
- d. Pelaksanaan kegiatan festival-festival yang terkait dengan pengembangan kebudayaan daerah masih jarang dilaksanakan
- e. Kurangnya pelibatan sekolah terhadap pengembangan kesenian tradisional
- f. Sarana prasarana terhadap kesenian tradisional sangat minim
- g. Rendahnya partisipasi dari masyarakat
- h. Kurangnya minat mengetahui dari masyarakat terkait tentang pengetahuan sejarah
- i. Rendahnya partisipasi masyarakat
- j. Kurang optimalnya perlindungan cagar budaya
- k. Masih kurangnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventaris
- l. Sumber data terkait penambahan cagar budaya masih sangat minim
- m. Jumlah museum yang terdaftar sebagai museum daerah hanya satu saja

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya dipetakan menjadi masalah pokok. Prioritisasi permasalahan pelayanan berdasarkan pada hubungan masalah dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi. Permasalahan berdasarkan pada indikator kinerja kunci (IKK) bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 3.1.1.



TABEL 3.1.1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NO	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya analisis kebutuhan terkait efektifitas pelaksanaan kegiatan - Capaian kinerja serta daya serap kegiatan yang masih rendah ditingkat para pejabat struktural - Munculnya paradigma bahwa pekerjaan itu adalah kegiatan yang memiliki anggaran.
2	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma bahwa pendidikan PAUD tidak diwajibkan - Tenaga Kependidikan PAUD masih didominasi oleh guru yang besar dari Guru Honorer - Tingkat kesejahteraan Guru Honorer PAUD yang masih sangat dibawah dri standar penggajian - Pendidik SD masih sangat didominasi oleh Guru dengan status Honorer - Tingkat kesejahteraan Guru Honorer SD masih sangat dibawah standar dengan sumber anggaran hanya pada dana BOS saja - Pertumbuhan Sekolah Tsanawiyah di beberapa kecamatan semakin pesat sehingga menjadi ancaman untuk beberapa SMP Negeri - Pendidik SMP masih sangat didominasi oleh Guru dengan status Honorer - Tingkat kesejahteraan Guru Honorer SMP masih sangat dibawah standar dengan sumber anggaran hanya pada dana BOS saja - Peran aktif Komite Sekolah di SMP masih sangat minim



		<p>Meningkatnya Aksesibilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pendidikan Pra Sekolah (PAUD) masih banyak yang berada di tingkat desa namun di tingkat dusun masih sedikit. - Penyelenggaraan PAUD ditingkat masyarakat masih sifatnya belum mandiri, dan bergantung ke pemerintah - Tidak teintegrasinya peserta didik lulusan PAUD ke jenjang pendidikan SD sehingga menimbulkan peserta didik baru SD semakin berkurang - Selayaknya setiap SD memiliki akses lembaga PAUD yang terdekat - Masih banyak sekolah SD yang memiliki jumlah peserta didik dibawah 50 orang secara keseluruhan - Pertumbuhan Sekolah Madrasah di beberapa kecamatan semakin pesat sehingga menjadi ancaman untuk sekolah negeri - Masih banyak SD yang sarana dan prasarannya dalam kondisi rusak sedang dan berat - Masih terdapat sekolah SD yang belum lengkap dalam hal pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan standar pendidikan - Peran aktif Komite Sekolah di SD masih sangat minim - Terdapat beberapa sekolah SD dengan status Kompleks - Konsep zonasi sekolah masih belum berjalan efektif - Banyak lulusan peserta didik SD tidak melanjutkan ke SMP Negeri namun melanjutkan ke Sekolah Tsanawiyah dibawah naungan Depag - Masih banyak SMP yang sarana dan prasarannya dalam kondisi rusak sedang dan berat - Masih terdapat sekolah SMP yang belum lengkap dalam hal pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan standar pendidikan - Dukungan data terkait Anak Tidak sekolah, Anak Putus Sekolah serta Buta Aksara belum dikelola dengan baik - Masih minimnya penyelenggara PKBM yang dikelola oleh masyarakat - Ketersediaan Guru Pamong masih sangat minim serta kualifikasi Pamong Belajar masih sangat Perlu ditingkatkan - Perlu adanya integrasi pengelolaan PAUD serta Pendidikan Non Formal terhadap Pemerintah Desa melalui Dana Desa
--	--	-----------------------------------	--



3	Penguatan dan pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan pada lembaga-lembaga kajian budaya yang dikelola oleh masyarakat masih sangat minim - Sasaran cagar budaya masih masih sangat minim, perlu penmbahan bebarapa refrensi cagar budaya - Kurang nya kegiatan pelatihan kesenian terhadap guru-guru disekolah sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan festival - Pelibatan lembaga sanggar seni yang dinilai masih sangat minim
---	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pernyataan visi yang disampaikan saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Wajo untuk masa jabatan 2019-2024 adalah **“Pemerintahan Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”**.

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi, yaitu amanah, maju dan sejahtera. **Amanah** menyatakan kondisi pemerintahan yang memenuhi kaidah tata kelola yang baik dan menghasilkan pelayanan publik yang memuaskan berdasarkan nilai-nilai dasar masyarakat Wajo. **Maju** menyatakan kondisi wilayah Kabupaten Wajo yang memiliki infrastruktur berdaya saing dalam mendukung kemajuan daerah. Sedangkan **sejahtera** menyatakan kondisi masyarakat dengan kualitas manusia yang tinggi dan tingkat kehidupan ekonomi yang berkecukupan. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Kabupaten Wajo pada tahun 2024 yang “Maju dan Sejahtera”.



3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak dijalankan untuk mewujudkan visi, yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan dan visi.

Rumusan dan penjelasan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Wajo untuk masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah, mencakup upaya-upaya pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan melayani masyarakat secara akuntabel, transparan, partisipatif melalui reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman, mencakup upaya-upaya pokok dalam pemenuhan layanan kehidupan kesehatan sesuai standar, pemenuhan layanan pendidikan, pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan serta kondisi perikehidupan yang nyaman dalam arti aman dan kondusif dengan mengedepankan nilai karakter agama pada setiap tingkah laku dan perbuatannya;
3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan, mencakup upaya-upaya pokok dalam mengelola wilayah dengan membangun infrastruktur dasar masyarakat secara adil dan merata, serta memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan, mencakup upaya-upaya pokok dalam memanfaatkan dan menggerakkan potensi sektor unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas, daya saing kompetitif dan daya saing komparatif daerah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses masyarakat dan dunia usaha untuk lebih mudah berusaha dan mengembangkan usaha sehingga



dapat menurunkan kesenjangan antar pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan menunjang ketercapaian misi kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dengan sasaran kualitas pendidikan meningkat.

3.2.3. Program

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka terdapat 25 program prioritas yang menjadi kerja nyata untuk masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) dan Layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien;
2. Percepatan 8 (delapan) reformasi birokrasi dan e-government;
3. Zona integritas menuju kawasan bebas korupsi;
4. Memperkuat kelembagaan desa;
5. Meningkatkan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa;
6. *Oto dottoro*'
7. Merevitalisasi sarana kesehatan dan pendidikan;
8. Menyediakan 6 dokter ahli di rumah sakit;
9. Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis;
10. 5000 beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan miskin;
11. Meningkatkan insentif tunjangan pegawai syara';
12. Gerakan masjid cantik (Gemantik);
13. Rumah pintar setiap kecamatan;
14. 1.000 km jalan kondisi mantap;
15. *Sport area* di setiap kecamatan;
16. 10.000 wirausahawan baru;
17. Satu kecamatan satu produk unggulan;
18. Penataan pasar;
19. Air layak minum 24 jam;
20. Pertanian terpadu (*integrated farming*);
21. Jaminan harga (resi gudang);
22. Peningkatan pendapatan per kapita 60 juta;
23. Rumah sehat untuk warga miskin;
24. Kedaulatan pangan (jaringan irigasi baik, ketersediaan pupuk, lahan pertanian berkelanjutan);
25. Bantuan modal usaha teknologi dan pemasaran bagi koperasi, UMKM,



petani, peternak dan nelayan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, maka program prioritas yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain sebagai berikut :

1. Merevitalisasi sarana kesehatan dan pendidikan. Pada program ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat berperan untuk terlaksananya program ini.
2. Melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis.
3. 5000 beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan miskin.
4. Rumah pintar setiap kecamatan.

3.2.4. Faktor Penghambat dan Pendorong

Berdasarkan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dicapai pada kondisi akhir Revisi Renstra Tahun 2014-2019 triwulan II Tahun 2019, maka ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang termuat pada Tabel 3.2.1.



Tabel 3.2.1

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Misi 1 : Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah</p> <p>Program</p> <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Rendahnya profesionalisme ASN</p> <p>b. Adanya paradigma yang mengatakan bahwa pekerjaan dikantor yang sesungguhnya adalah kegiatan yang memiliki nilai anggaran</p>	<p>Belum optimalnya penerapan dan penempatan ASN sesuai pendidikan dan kompetensi</p>	<p>Menerapkan the right man on the Right place</p>



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan</p> <p>Program 1. Program Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>1. Akses</p> <p>a. Daya serap peserta didik yang lulus dari PAUD ke SD serta dari SD ke SMP semakin berkurang</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana sekolah masih kurang memadai.</p> <p>c. Masih terdapat warga yang belum menuntaskan pendidikan dasar;</p> <p>d. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;</p>	<p>a. Perkembangan sekolah Madrasah dibawah naungan Depag semakin meningkat.</p> <p>b. Minat masyarakat cenderung ke sekolah agama</p> <p>c. Perilaku inovasi guru disekolah negeri masih sangat minim</p> <p>d. Pengembangan kurikulum muatan lokal tidak maksimal</p>	<p>a. Pemerintah menyiapkan Biaya operasional sekolah melalui Dana BOS</p> <p>b. Penyelenggaraan Pendidikan PAUD serta Pendidikan Non Formal sudah dapat dilakukan melalui anggaran Dana Desa untuk setiap Desa</p>



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>2. Program Pengembangan Kurikulum</p>	<p>e. Layanan lembaga PAUD masih sangat jearang di tingkat dusun, lebih banyak di ibukota desa</p> <p>2. Mutu</p> <p>a. Belum tuntasnya pelaksanaan kurikulum K-13 dibeberapa sekolah utamanya jenjang SD</p> <p>b. Kurangnya pelaksanaan lomba-lomba terkait siswa dan guru akibat kurangnya ketersediaan anggaran</p> <p>c. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>d. Kesenjangan kompetensi siswa antarsekolah;</p>	<p>a. Sekolah belum menerapkan manajemen berbasis sekolah dan belum mencapai standar pelayanan minimal pendidikan serta standar nasional pendidikan.</p> <p>b. Peran serta pengawas serta penilik dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan di penddidikan formal serta non formal masih sangat kurang, cenderung hanya melaksanakan sebagai formalitas saja</p>	<p>a. Keberadaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi-selatan akan menjadikan Sekolah lebih bisa dalam hal pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan</p>



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3. Mutu a. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan; b. Jumlah tenaga honorer guru hampir sebanding dengan jumlah PNS Guru c. Persebaran pendidik belum proporsional; d. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi; e. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan nonformal; f. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.	a. Dominasi tenaga pendidik dan kependidikan yang usia diatas 50 tahun masih sangat besar b. Rendahnya penguasaan teknologi media pendidikan dikalangan pendidikan dan tenaga kependidikan c. Perubahan regulasi terkait pendidik dan tenaga kependidikan sangat cepat	a. Terdapat beberapa program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Kemdikbud yang dapat meningkatkan prestasi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Peluang pemberian tunjangan sertifikasi guru masih terbuka lebar bagi pendidik yang belum bersertifikasi c. Pemberian tunjangan Non Sertifikasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non PNS



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	4. <i>Program Pengendalian Perizinan Pendidikan</i>	4. Tatakelola a. Masih rendahnya koordinasi antar OPD terkait perizinan penyelenggaraan lembaga pendidikan b. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang mekanisme pendirian sekolah	Masih panjangnya alur birokrasi dalam pemberian izin pendirian lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Antusiasme sangat tinggi dari masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan utamanya Kelompok Bermain (KB) PAUD b. Pemberian subsidi dana BOP (Biaya Operasional PAUD) sebagai dana stimulant dalam penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
	5. <i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	a. Rendahnya partisipasi masyarakat terkait pengembangan kebudayaan	Belum adanya regulasi terkait pemajuan kebudayaan daerah	Berkembangannya lembaga-lembaga pemerhati budaya yang didirikan oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian serta



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	<p>daerah</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan festival-festival yang terkait dengan pengembangan kebudayaan daerah masih jarang dilaksanakan</p> <p>a. Kurangnya pelibatan sekolah terhadap pengembangan kesenian tradisional</p> <p>b. Sarana prasarana terhadap kesenian tradisional sangat minim</p>	<p>Daya minat masyarakat cenderung berkurang dalam hal pengembangan kesenian tradisional, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat sehingga pola pikir masyarakat juga cenderung mengabaikan hal-hal yang sifatnya lampau</p>	<p>menjadi sumber informasi terkait pemajuan kebudayaan daerah</p> <p>Berkembangnya sanggar-sanggar kesenian tradisional yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian serta keinginan dalam pelestarian kesenian tradisional</p>



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
7.	Program Pembinaan Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya partisipasi dari masyarakat b. Kurangnya minat mengetahui dari masyarakat terkait tentang pengetahuan sejarah 	Belum adanya regulasi terkait pembinaan sejarah	Beberapa kajian sejarah yang dilakukan oleh masyarakat melalui social media yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang merupakan salah satu wujud kepedulian terkait kesejarahan
8.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya partisipasi masyarakat b. Kurang optimalnya perlindungan cagar budaya c. Masih kurangnya karya budaya yang direvitalisasi dan inventaris d. Sumber data terkait penambahan cagar budaya masih sangat minim 	Beberapa situs cagar budaya masih dikuasai oleh masyarakat, belum diserahkan ke pemerintah	Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk situs cagar budaya yang terdaftar dipemerintah daerah



VISI : Pemerintah Amanah, menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

No	Misi dan Program KDH Dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	9. <i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>	a. Jumlah museum yang terdaftar sebagai museum daerah hanya satu saja	a. Terdapat museum yang status nya masih dimiliki oleh masyarakat	Bantuan anggaran melalui Dana DAK untuk pengelolaan museum daerah sudah ada
Misi 3 Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan				
Misi 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan				



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kemeterian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

1. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latarbelakang sosial- budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan duniaindustri.

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi Kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai berikut:



Tabel 3.3.1
PERMASALAHAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
BERDASARKAN SASARAN RENSTRA PROVINSI SULAWESI SELATAN
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka rata-rata lama sekolah masih rendah	Ketersediaan sarpras mencukupi. Adanya bantuan siswa miskin.	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan.
2.	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Angka melek aksara belum mencapai 100 persen (masih ada penduduk yang belum bias membaca dan menulis	Adanya program PKBM	Rendahnya minat belajar pada penduduk usia lanjut.
3.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Masih terdapat sekolah yang belum mencapai akreditasi B	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan bantuan akreditasi	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SD Negeri.
4.	Persentase SMP/MTs berakreditasi	Masih terdapat sekolah yang belum	Adanya kegiatan pendampingan	Sulitnya pemberian bantuan dana



No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	minimal B	mencapai akreditasi B	akreditasi dan bantuan akreditasi	untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta
6.	Persentase capaian APK masih rendah	Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum mengakses pendidikan	Ketersediaan sarpras mencukupi. Adanya bantuan siswa miskin.	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan.



Misi dalam Renstra Kemendiknas tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wajo, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan Kabupaten Wajo dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan termuat visi yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera menyongsong peradaban baru. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi pertama yaitu membangun peradaban berbasis nilai kemanusiaan, dengan tujuan salah satunya mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter. Sedangkan sasaran yang akan dicapai ialah melek huruf masyarakat meningkat, aksesibilitas pendidikan meningkat, dan daya saing pendidikan meningkat. Ketiga sasaran tersebut menjadi salah satu dasar perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.



3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD

Tabel 3.4.1
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANKABUPATEN WAJO
BERDASARKAN TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan sesuai hirarki	Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan nasional	Terbatasnya anggaran pendidikan dan partisipasi masyarakat belum optimal dalam pembangunan pendidikan	Peningkatan pengalokasian anggaran untuk pendidikan melalui pencapaian anggaran 20 persen dalam APBD diluar dana transfer

Tabel 3.4.2
PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANKABUPATEN WAJO
BERDASARKAN ANALISIS KLHS
BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rasio APM Sekolah Dasar	Belum Mencapai standar	Kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan	Penyediaan anggaran yang maksimal



2	Angka Melek Huruf	Belum mencapai 100 persen	Kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan	Penyuluhan kepada masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana
---	-------------------	---------------------------	---	--

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Tabel 3.5.1
SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS

No.	Kriteria*)	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra PD	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas visi, misi dan program kerja nyata kepala daerah yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Berdasarkan kriteria dan skor pembobotan terhadap isu strategis, maka dilakukan penilaian isu strategis sebagaimana Tabel 3.5.2.

Tabel 3.5.2.
NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1=20	2=10	3=20	4=10	5=15	6=25	
1.	Ketersediaan anggaran dan SDM untuk mengentaskan buta huruf	(32x20)= 640	(30x10)= 300	(22x20)= 440	(40x10)= 400	(32x15)= 480	(30x25)= 750	3010



2	Daya tampung sekolah yang melebihi jumlah penduduk, dan ketersediaan bantuan siswa miskin serta bantuan operasional sekolah daerah	(42x20)= 840	(38x10)= 380	(22x20)= 440	(38x10)= 380	(22x15)= 330	(26x25)= 650	3020
3.	Komitmen Kabupaten Wajo dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan inklusif	(40x20)= 800	(22x10)= 220	(40x20)= 800	(22x10)= 220	(26x15)= 390	(38x25)= 950	3380
4.	Penyediaan bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SD Negeri.	(38x20)= 760	(30x10)= 300	(26x20)= 520	(32x10)= 320	(26x15)= 390	(38x25)= 950	3240
5.	Penginterasian peta mutu pendidikan	(40x20)= 800	(26x10)= 260	(40x20)= 800	(22x10)= 220	(22x15)= 330	(32x25)= 800	3210
6.	Menerapkan delapan standar pendidikan nasional	(40x20)= 800	(32x10)= 320	(22x20)= 440	(38x10)= 380	(22x15)= 330	(32x25)= 800	3070

Tabel 3.5.3
RATA-RATA SKOR ISU STRATEGIS

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Komitmen Kabupaten Wajo dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan inklusif	3380	0,1204
2.	Penyediaan bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SD Negeri	3240	0,1154
3.	Penginterasian peta mutu pendidikan	3210	0,1144
4.	Menerapkan delapan standar pendidikan nasional	3110	0,1108
5.	Ketersediaan anggaran dan SDM untuk mengentaskan buta huruf	3070	0,1094
6.	Menerapkan delapan standar pendidikan nasional	3030	0,1079





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Wajo, maka akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah perlu ditingkatkan, termasuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Wajo merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan, dan bersifat spesifik, realistis, terukur, dan dapat dicapai dalam periode waktu yang telah direncanakan. Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui dengan jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi target untuk periode lima tahun ke depan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019-2024 yaitu :

- “Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah
- Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan serta
- Penguatan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah”

b. Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.
2. Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud .
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD
4. Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel 4.1.1





Tabel 4.1.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Renstra Pokok Tahun 2019-2024							Perubahan Renstra Pokok Tahun 2019-2024									
Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Tahun 2020		Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target Kinerja (Tahun)				Kondisi Akhir Renstra
					Target	Capaian						2021	2022	2023	2024	
Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai Sakip perangkat daerah		Angka / Predikat	BB	BB	Tujuan 1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Angka / Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	1	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase	100%	100%		Sasaran 1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	1	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persentase	100%	100%	100%
Tujuan 2	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Angka Rata - Rata Lama Sekolah		Tahun	7,29 Tahun	7,29 Tahun	Tujuan 2	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	7,5 Tahun	7,71 Tahun	7,92 Tahun	7,92 Tahun
											Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan	Persentase	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	2	Angka Lulusan SD dan SMP	Persentase	100%	100%		Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	2	Angka Lulusan SD dan SMP	Persentase	100%	100%	100%



	Sasaran 3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	3	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	Persentase	SD = 102 SMP = 95 PAUD = 60,20	SD = 102 SMP = 95 PAUD = 60,20	Sasaran 3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	3	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	Persentase	SD = 103 SMP = 100 PAUD = 60,40	SD = 104 SMP = 105 PAUD = 60,60	SD = 105 SMP = 108 PAUD = 60,80	SD = 106 SMP = 112 PAUD = 70,00	SD = 106 SMP = 112 PAUD = 70,00
				Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	Persentase	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,2	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,2				Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	Persentase	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,4	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 63	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 64	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 65	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 65
Tujuan 3	Penguatan dan pengembangan Kebudayaan		Persentase capaian pengembangan budaya		persen	100%	100%	Penguatan dan pengembangan Kebudayaan		Persentase capaian pengembangan budaya		persen	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 4	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya	4	Persentase peningkatan Lembaga adat/ sanggar budaya yang aktif	persen	100%	100%	Sasaran 4	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya	4	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	persen	100%	100%	100%	100%	100%
			5	Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100%	100%			5	Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100%	100%	100%	100%	100%





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Wajo. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019 -2024 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2018.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Wajo. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2019–2024 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Renstra Pokok

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2020	2021
Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024					
1	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah				
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan urusan pemerintahan daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan SDM dan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas SDM Aparat Perencana serta pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan dan evaluasi	Peningkatan kapasitas SDM Aparat Perencana serta pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan dan evaluasi
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman				
	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Strategi 2 : Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dasar dan PAUD	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2020	2021
Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024					
		Sasaran 3 : Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Strategi 3 : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Dasar dan PAUD - Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Non Formal - Peningkatan pengembangan pendidikan 	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan strandart mutu pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan strandart mutu pendidikan



Tabel 5.2
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Perubahan Renstra

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024						
1	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah					
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan urusan pemerintahan daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan SDM dan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas SDM Aparat perencana serta pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan dan evaluasi serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Peningkatan kapasitas SDM Aparat perencana serta pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan dan evaluasi serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi	Peningkatan kapasitas SDM Aparat perencana serta pengelolaan keuangan dalam hal pelaporan dan evaluasi serta penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024						
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat dan beriman					
	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Strategi 3 : Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan



No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024						
		Sasaran 4 : Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Strategi 4 : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatandan pemerataan kualitas Pendidikan Non Formal - Peningkatan pengembangan pendidikan 	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan standart mutu pendidikan





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Definisi program adalah bentuk instrumen kebijakan yang terdiri atas kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dan strategi konkrit dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Wajo, dengan rincian pagu tahun 2021 sebesar 341.673.371.910, tahun 2022 sebesar 318.824.178.028, tahun 2023 sebesar 217.833.937.522, dan tahun 2024 sebesar 222.454.450.800

Adapun rencana program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tahun 2019 –2024 diuraikan sebagai berikut

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)
- Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan (Orang)

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja kegiatan ini adalah :



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

- Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen DPA-PD (Dokumen)

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD (Dokumen)

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Laporan)

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD (Laporan)
- Jumlah Dewan Pendidikan yang melakukan Evaluasi (Orang)
- Frekuensi Pelaksanaan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan di satuan pendidikan (Kali)

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ASN yang tersedia Gaji dan Tunjangannya (Orang/Bulan)

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Laporan)

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Laporan)

➤ **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD (Dokumen)



2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah BMD-PD yang diamankan serta dokumen Penghapusan Aset pada satuan Pendidikan (Dokumen)

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ASN yang disediakan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Orang)

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah guru yang menerima DUPAK (Orang)

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)

4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta Seleksi Administrasi dan Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah (Orang)
- Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah (Orang)
- Jumlah Peserta Diklat Profesi Guru (Orang)

5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek (Orang)

➤ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)

2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)



- Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan (Lembar)

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Penyediaan Kolom Adventorial (Kolom)
- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)

4. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara (orang)

5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu (Laporan)
- Jumlah Laporan pengelolaan data pokok pendidikan (Laporan)
- Jumlah data Data Base Pendidikan yang dibuat (Data Base)

➤ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)

2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Gedung Kantor yang diadakan (Gedung)

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)
- Jumlah jenis sarana pertunjukan pementasan (Jenis)
- Jumlah jenis pengadaan mebel pembentukan sekretariat Pokja Bunda PAUD (jenis)



➤ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah surat keluar (Exampler)
- Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai (Kali)

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kali)

4. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Non PNS yang disediakan Gajinya (orang/Bulan)
- Jenis bahan/jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)
- Jumlah ASN dan Tamu yang Terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman) (Orang)

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang dipelihara (Unit)

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diperlihara (Unit)
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya (Unit)

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang



dipelihara (Meter)

4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)

➤ Penataan Organisasi

1. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Satuan Pendidikan/Lembaga yang di Evaluasi (Sekolah/Lembaga) (Sekolah)

6.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

➤ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah gedung sekolah / ruang kelas / ruang guru yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Ruang)

2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (Sekolah)
- Jumlah taman baca yang dibangun (Taman Baca)

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ruang kelas/ruang guru / gedung yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah sekolah penerima rehabilitasi ruang kelas (Sekolah)

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi



dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)

- o Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (Sekolah)

5. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah Luas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara (Meter)

6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah Luas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara (Meter)

7. Pengadaan Mebel PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah Sekolah TK dan KB Penerima Pengadaan Mobiler (Sekolah)

8. Pengadaan Perlengkapan PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)

9. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)
- o Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan (SPM) (Orang)

10. Pengadaan Perlengkapan PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)
- o Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan (SPM) (Orang)

11. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah peserta Didik PAUD Yang menerima Biaya Personil (Anak)

12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah PAUD Penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)



13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta kegiatan lomba kreatifitas (Lembaga)
- Jumlah Lemgaga yang Mengikuti Gebyar PAUD (Lembaga)

14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Kali)
- Jumlah Desa/Kecamatan yang Mengikuti implemtasi Mandiri Belajar PAUD (Kecamatan)
- Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidkan PAUD (Sekolah)
- Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)
- Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Orang)
- Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba bunda PAUD (kecamatan)
- Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)

15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pendidik Non ASN yang Menerima Gaji (Orang/Bulan)
- Jumlah Operator yang tersedia di Satuan PAUD (Orang/Bulan)

16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah kepala sekolah PAUD (TK/KB/TPA/SPS) yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah tenaga pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SPS yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah Penilik/Pengawas PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- waktu Pengelolaan Sertifikasi Guru (Bulan)
- Jumlah Peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (Orang)



17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah lembaga yang mengikuti lomba (Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini) (Lembaga)
- Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (Sekolah)
- Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sarana dan Prasarana Satuan PAUD (Kali)
- Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)
- Jumlah lembaga sosialisasi Desa Mandiri Belajar PAUD (Lembaga)
- Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)
- Jumlah tenaga pendidik TK yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Kegiatan)
- Jumlah peserta lomba profil bunda PAUD kecamatan (Kecamatan)
- Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)
- Jumlah TK negeri penerima dana operasional rutin sekolah (TK)
- waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan akses pendidikan PAUD (Bulan)

18. Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD (Bulan)
- Jumlah Lembaga yang menerima bantuan BOP PAUD DAK Non Fisik (Lembaga)

➤ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sekolah yang menerima Penambahan Ruang Kelas Baru (Ruang)
- Jumlah sekolah penerima penambahan Ruang Kelas Baru dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)



2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di biayai oleh (DAK) (Ruang)

3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)

4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)

5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD) (Sekolah)

6. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)

7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Ruang Kelas SD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah ruang Kelas SD yang di rehabilitasi (Ruang)

8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Ruang Rehabilitasi Unit Kesehatan Sekolah di Rehabilitasi



Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)

10.Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK) dan di biayai oleh (Ruang)

11.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)

12.Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Unit)
- Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (APBD) (Unit)

13.Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (APBD) (Sekolah)

14.Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Perlengkapan belajar (Sekolah)

15.Pengadaan Perlengkapan Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah siswa penerima Pengadaan Perlengkapan (SPM) SD (Orang)

16.Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Luas Saranan, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang



dipelihara (Meter)

17. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi /Tidak Mampu Tingkat SD (Orang)
- Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)
- Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan

18. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK) (Paket)

19. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) SD (Orang)
- Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah SD (Bulan)

20. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SD (Kali)
- Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Dasar (Orang)

21. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa SD (Orang)
- Jumlah pelaksanaan kegiatan JAMNAS (Kali)
- Jumlah Peserta Lomba Siswa Berprestasi (Orang)
- Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)



22. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan Peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah kepala sekolah SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah Pengawas SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SD (Orang)
- Jumlah peserta lomba guru berprestasi SD (Orang)
- Jumlah Pengawas SD yang mengikuti supervisi mutu (Orang)
- Jumlah peserta lomba pengawas SD berprestasi (Orang)
- Jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SD (Orang)

23. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta pendidik yang mengikuti pengembangan Karir di sekolah dasar (Peningkatan Kompetensi) (Orang)
- Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti MBS SD (Orang)
- Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)
- Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa (Orang)
- Jumlah Ranperda yang diselesaikan tepat waktu (Ranperda)
- Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat kab. Wajo (Sekolah)

24. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos Pusat) (Bulan)
- Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD (Bulan)

25. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SD (Sekolah)



- Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SD (Sekolah)

➤ **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

1. Penambahan Ruang Kelas Baru

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima penambahan ruang kelas Baru dan dibiayai oleh (DAK) Ruang)
- Jumlah sekolah penambahan Ruang kelas Baru APBD (Ruang)

2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

5. Pembangunan Laboratorium

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Laboratorium dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

6. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

7. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas APBD (Sekolah)



8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ruang gedung sekolah (ruang kepala sekolah / ruang tata usaha yang direhabilitasi sedang berat) dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang / berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah ruang Kelas SMP yang di rehabilitasi APBD (Ruang)

10. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ruang guru yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Ruang)

11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

12. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

13. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah laboratorium (IPA dan Komputer) yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

14. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (Ruang)

15. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah



Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Unit)

16.Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet dan Ruang Ibadah) yang di rehabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)
- Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang)

17.Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)
- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK) (Sekolah)

18.Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima mobiler sekolah SMP APBD (Sekolah)

19.Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah yang menerima perlengkapan Belajar (Sekolah)

20.Pengadaan Perlengkapan Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah menengah pertama (SPM) (Orang)

21.Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah luas Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)

22.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi dan



Tidak Mampu Tingkat SMP (Orang)

- Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)
- Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)

23. Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)

24. Perlengkapan Belajar Peserta Didik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah siswa penerima Perlengkapan Belajar (Orang)

25. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lab. IPA, TIK, dan Media Pendidikan) dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)

26. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) (Orang)
- Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah (kali)
- Frekuensi Pelaksanaan Monitoring keterlaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMP (Kali)
- Waktu pelaksanaan PPDB Online (Bulan)

27. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SMP (kali)
- Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Menengah (Orang)

28. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :



- Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP (Orang)
- Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)
- Jumlah peserta lomba siswa berprestasi
- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka (orang)
- Jumlah peserta pelatihan UKS SMP (Orang)
- jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP (Orang)
- Jumlah peserta LDK OSIS SMP (Orang)

29. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah kepala sekolah SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Orang)
- jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SMP (Orang)
- jumlah Pengelola Lab. Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
- Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SMP (Orang)
- Jumlah peserta lomba guru berprestasi SMP (Orang)
- Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti supervisi mutu (Orang)
- Jumlah peserta lomba pengawas SMP berprestasi (Orang)

30. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah siswa sekolah Menengah pertama dan Mahasiswa yang menerima Beasiswa (Orang)
- Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan kompetensi tenaga pendidik SMP (Orang)
- Waktu Belanja Rutin SMPN (Bulan)
- Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS SMP



- o Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru

31. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMP (Bulan)
- o Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bos Pusat) SMP (Bulan)

32. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SMP (Sekolah)
- o Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SMP (Sekolah)

➤ Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah sekolah penerima Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru

2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah ruang praktik/ gedung Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- o Jumlah sekolah penerima ehabilitasi Sedang/Berat



Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)

5. Pemeliharaan Rutin sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Luas sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dipelihara (Meter)

6. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah SKB/PKBM penerima pengadaan Mobiler dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)

7. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa (SPM) (Orang)

8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta penerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Orang)

9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)

10. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta didik Keaksaraan (Orang)
- Jumlah peserta PKBM pendidikan kecakapan hidup (orang)
- Frekuensi Pendataan Penuntasan Buta Aksara (Kali)
- Jumlah Peserta Kegiatan PKBM (PKBM)

10. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kali)



11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)

12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Waktu operasional rutin SKB (Bulan)
- Waktu pelaksanaan BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Bulan)
- Jumlah Kegiatan Persiapan dan Akreditasi satuan pendidikan SKB (Lembaga)
- Jumlah Kegiatan Persiapan dan Pendirian satuan pendidikan PKBM (Lembaga)
- Frekuensi Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (Kali)

13. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Lembaga penerima BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Lembaga)

6.1.3 Program Pengembangan Kurikulum

➤ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)

2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)

3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah PTK yang telah mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum



Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)

➤ **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)

2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)

6.1.4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

➤ **Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang sudah terpetakan dengan baik

2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang telah ditata dan didistribusikan dengan baik ke satuan pendidikan dan Lembaga

6.1.5 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

➤ **Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat**



1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Persentase Jumlah Pengusulan perizinan pendirian PAUD dan PNF dengan kategori layak

6.1.6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

➤ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Frekuensi pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (Kali)

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Pelestarian Lagu-lagu Daerah (Orang)
- Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kesenian (Kecamatan)

➤ Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)

2. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya (Kali)

6.1.7 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

➤ Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah



Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta gita bahana nusantara (Orang)
- Jumlah Peserta festival pelajar (Orang)
- Jumlah peserta pagelaran budaya daerah (sanggar seni)
- Jumlah peserta bahana ekspresi pelajar (Orang)

2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta Pagelaran Kesenian Tradisional Tingkat SMP Sederajat (Orang)
- Jumlah Peserta Lomba Lagu Daerah Tingkat PAUD, SD dan SMP (Orang)

6.1.8 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

➤ Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta lomba cerita rakyat (Orang)
- Frekuensi Pelaksanaan Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah (Bulan)
- Jumlah Perda Pemajuan Budaya yang disusun (Perda)
- Frekuensi pelaksanaan Pekan Raya Sulawesi selatan (Kali)
- Frekuensi pelaksanaan Festival keraton Nusantara (Kali)
- Frekuensi pelaksanaan Pekan Budaya Nasional (Kali)
- Jumlah peserta seminar budaya (Orang)
- Jumlah peserta pekan budaya daerah (Orang)

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Buku Sejarah Lokal yang diterbitkan (Eksampler)

3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal



daerah (Orang)

- Jumlah buku Kapita Selecta Sejarah Sul-sel dan Buku Kapita Selecta Kebudayaan Su-sel yang di cetak (Eksampler)

6.1.9 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

➤ Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- jumlah penambahan cagar budaya yang baru diregistrasi

2. Penetapan Cagar Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)

➤ Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1. Pelindungan Cagar Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)

2. Pengembangan Cagar Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)
- Jumlah Cagar Budaya yang didata (Cagar Budata)
- Jumlah Modul Cagar Budaya yang dibuat (Modul)

3. Pemanfaatan Cagar Budaya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan (Cagar Budaya)

6.1.10 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

➤ Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- jumlah Objek museum yang dikoleksi (Objek)

2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah SDM Permuseuman yang dilatih (Orang)

3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum



Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan Akses terhadap Museum (Orang)

4. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah sarana dan prasarana Museum yang dipelihara (Buah)

6.2. Pendanaan Indikatif

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 perlu didukung oleh pendanaan agar mampu mencapai target dan sasaran organisasi. Adapun pendanaan indikatif sebesar Rp 1.100.785.938.260,-dengan perincian yang termuat dalam Tabel 6.2.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program, Sasaran dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target dan Capaian 2020				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										target	Rp	Capaian APBD	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah								Nilai Sakip perangkat daerah	CC	CC		BB			
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah							Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%		100%			
		1	01	1	09		Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan (PPD)	Ketersediaan renstra, renja, laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100,000,000	100%	85,000,000	Sekretariat	Disdikbud
		1	01	1	09	01	Penyusunan Renja Pokok PD	Jumlah Dokumen renja yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	1	09	02	Penyusunan Renja Perubahan PD	Jumlah Dokumen perubahan Renja yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	1	09	03	Penyusunan Perencanaan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	27 Dokumen	60,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	1	09	04	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Jumlah dokumen LKJIP OPD yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	1	09	05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	10,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
 Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		1	01	1	10		Program Pemenuhan Penunjang Urusan	Cakupan pemenuhan penunjang urusan	100%	100%	991,000,000	99,78%	761,849,846	Sekretariat	Disdikbud
		1	01	1	10	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	750000 Eksampler	750000 Eksampler	40,000,000	750000 Eksampler	41,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Kali	12 Kali	150,000,000	12 Kali	117,614,329	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	12 Kali	12 Kali	7,000,000	12 Kali	5,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	4 Jenis	7,000,000	4 Jenis	3,500,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bahan Bacaan	12 Bahan Bacaan	70,000,000	12 Bahan Bacaan	24,940,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	120 Kali	120 Kali	400,000,000	60 Kali	175,666,599	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	19	Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor	Jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	7,000,000	12 Jenis	7,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah pengelola administrasi penunjang urusan	344 Orang	344 Orang	250,000,000	344 Orang	249,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	21	Penyediaan data dan pelaksanaan urusan kepegawaian	Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian yang terpenuhi	12 Kali	12 Kali	40,000,000	12 Kali	40,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	31	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Unit)	6 Unit			9 Unit	85,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	1	10	37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	waktu Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	13,128,918	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan							Angka Rata - Rata Lama Sekolah	6,80 Tahun	7,29 Tahun		6,81 Tahun				
1. Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud							Angka Lulusan SD dan SMP	93,51 %	100%		100%		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Disdikbud	
2. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD							Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	SD = 100 SMP = 90,54 PAUD = 59,54	SD = 102 SMP = 95 PAUD = 60,20		SD = 102 SMP = 95 PAUD = 60,20				
							Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	SD = 99,77 SMP = 95,38 PAUD = 60,00	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,2		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,2				
		1	01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	100%	8,957,922,011	93,68%	7,738,697,447	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	57	Pembangunan sarana dan Prasarana PAUD	jumlah lembaga penerima bantuan sarpras		2 Sekolah	994,000,000	-	-	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	58	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Tenaga Pendidik	770 Orang	770 Orang	4,632,713,011	770 Orang	4,932,713,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	69	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pendidikan Anak Usia	waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan				4 Bulan	35,000,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	70	Pengelolaan Dana BOP DAK PAUD	Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	18,834,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	71	Bantuan Biaya Operasional rutin Pendidikan TK Negeri	jumlah TK negeri penerima bantuan	12 Sekolah	12 Sekolah	160,000,000		-	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	74	Aperasiasi PAUD	Jumlah jenis lomba yang diikuti		5 Jenis	50,000,000			Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud



		1	01	01	15	72	Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)	jumlah sekolah penerima DAK	12 Sekolah	5 Sekolah	1,400,624,000	12 Sekolah	1,371,427,152	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	73	Penigkatan Sarana dan Prasarana SKB (DAK)	jumlah sekolah penerima DAK	1 SKB	1 SKB	451,535,000	1 SKB	450,841,295	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	75	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD/TK (Penerapan SPM)	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa		4650 Siswa	100,000,000	4650 Siswa	99,440,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	76	Belanja Rutin operasional SKB	Waktu operasional rutin SKB	12 Bulan	12 Bulan	117,550,000		-	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	77	Belanja Rutin operasional SKB DAK non FISIK	Waktu operasional rutin SKB DAK Bon Fisik	12 Bulan	12 Bulan	244,300,000	12 Bulan	243,576,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	83	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAU - DAK Non Fisik)	waktu penyelenggaraan BOP dak non fisik	12 Bulan	12 Bulan	421,200,000	12 Bulan	415,200,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	95	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana PAUD	jumlah PAUD penerima bantuan Rehab sarpras		5 Sekolah	241,000,000	4 Sekolah	96,526,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	96	Pengembangan kreatifitas Pendidikan anak usia dini	jumlah peserta kegiatan lomba kreatifitas (Lembaga)	14 Lembaga	14 Lembaga	70,000,000		-	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	97	Pengembangan pendidikan anak usia dini	jumlah lembaga yang terakreditasi	20 Lembaga	20 Lembaga	55,000,000		-	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	99	Sosialisasi PAUD Holistik dan Integratif	Jumlah Peserta Sosialisasi				50 Orang	41,650,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	15	100	Pembinaan PAUD Holistik dan Integratif	Waktu pembinaan				12 Bulan	33,490,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud



		1	01	01	16		Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Persentase WNI umur 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100%	100%	58,919,399,000	96,57%	53,583,845,647	Bidang SD dan SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	67	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS	100 Lembaga	100 Lembaga	30,000,000		-	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	68	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan SMP	Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS	100 Lembaga	100 Lembaga	30,000,000	74 Lembaga	25,000,000	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	70	Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar	Jumlah Gedung SD yang direhabilitasi				1 Sekolah	14,887,000	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	71	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar	Jumlah Gedung SD yang dibangun	25 Sekolah	5 Ruang	1,025,000,000	5 Sekolah	504,656,350	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	72	Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Gedung SMP yang dibangun	1 Sekolah	3 Ruang	500,000,000	2 Sekolah	294,301,000	Bidang SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	77	Pengadaan Alat Peraga Sekolah Menengah Pertama	jumlah sekolah penerima alat peraga	1 Sekolah	1 Sekolah	155,000,000	1 Sekolah	148,792,000	Bidang SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	78	Penyelenggaraan olimpiade, festival dan seni tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah peserta pelaksanaan Penyelenggaraan olimpiade, festival dan seni tingkat sekolah menengah pertama (orang)	100 Orang	50 Orang	80,000,000		-	Bidang SMP	Disdikbud



			1	01	01	16	81	Penyelenggaraan Olimpiade, Festival dan Seni (FLS2N) untuk SD	Jumlah peserta pelaksanaan Penyelenggaraan olimpiade, festival dan seni tingkat sekolah	100 Orang	50 Orang	80,000,000	50 Orang	28,400,000	Bidang SD	Disdikbud
			1	01	01	16	89	Lomba Siswa Berprestasi SMP	Frekuensi lomba siswa berprestasi SMP	1 Kali	1 Kali	26,000,000	1 Kali	26,000,000	Bidang SMP	Disdikbud
			1	01	01	16	92	Pengelolaan / Manajemen DAK SMP	Jumlah sekolah pelaksanaan pengelolaan DAK SMP	118 Sekolah			3 Sekolah	15,045,000	Bidang SMP	Disdikbud
			1	01	01	16	93	Pengelolaan / Manajemen DAK SD	Jumlah sekolah pelaksanaan pengelolaan DAK SD	15 Sekolah			3 Sekolah	13,005,500	Bidang SD	Disdikbud
			1	01	01	16	95	Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar (Penerapan SPM)	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah dasar		100 Orang	100,000,000	100 Orang	99,912,950	Bidang SD	Disdikbud
			1	01	01	16	96	Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Menengah Pertama (Penerapan SPM)	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah menengah pertama		100 Orang	100,000,000	100 Orang	99,704,200	Bidang SMP	Disdikbud
			1	01	01	16	98	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK)	jumlah sekolah dasar penerima DAK	53 Sekolah	12 Sekolah	39,970,883,000	155 Sekolah	38,927,798,580	Bidang SD	Disdikbud
			1	01	01	16	99	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK)	Jumlah sekolah menengah pertama penerima DAK	118 Sekolah	12 Sekolah	11,754,989,000	23 Sekolah	11,074,564,515	Bidang SMP	Disdikbud
			1	01	01	16	213	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK Afirmasi)	jumlah sekolah dasar penerima DAK Afirmasi		7 Sekolah	1,978,915,000	22 Sekolah	1,845,741,800	Bidang SD	Disdikbud
			1	01	01	16	214	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAK Afirmasi)	Jumlah sekolah menengah pertama penerima DAK Afirmasi		3 Sekolah	438,389,000	2 Sekolah	433,036,952	Bidang SMP	Disdikbud



		1	01	01	16	215	Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ujian akhir tingkat sekolah dasar	persentase Sekolah Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS)	100 Persen	100 Persen	563,000,000		-	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	216	Sosialisasi ujian sekolah dan ujian nasional SMP	persentase Sekolah Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS)	100 Persen	100 Persen	35,000,000		-	Bidang SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	217	Pelaksanaan lomba sekolah sehat kab. Wajo	Frekuensi lomba sekolah sehat kab. Wajo	1 Kali	1 Kali	25,000,000		-	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	218	Pelaksanaan PPDB ON Line	Waktu pelaksanaan PPDB Online	1 Bulan	1 Bulan	200,000,000		-	Bidang SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	219	Belanja Rutin SMPN	Belanja Rutin SMPN Waktu Belanja Rutin SMPN	12 Bulan	12 Bulan	1,827,223,000		-	Bidang SMP	Disdikbud
		1	01	01	16	220	Lomba Minat Baca Tingkat TK Dan Mengarang Tingkat SD	Jumlah Peserta Lomba Baca dan Mengarang				20 Orang	4,999,900	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	221	Lomba Adzan dan Pildacil	Jumlah Peserta Lomba Adzan dan Pildacil				20 Orang	4,999,900	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	16	219	Pembentukan Taman Baca	jumlah taman bacaan yang dibentuk				1 Taman Baca	23,000,000	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	23		Program Pendidikan Kesetaraan	Persentase WNI umur 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan	100%	100%	230,000,000	92%	219,733,000	Bidang PAUD Dan PNF	Disdikbud
		1	01	01	23	69	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah peserta didik Keaksaraan	35 Orang	40 Orang	80,000,000	40 Orang	40,000,000	Seksi PNF	Disdikbud
		1	01	01	23	72	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta pendidikan kecakapan hidup (orang)	200 Orang	200 Orang	50,000,000		-	Seksi PNF	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		1	01	01	23	70	Pengadaan Perlengkapan Peserta Pendidikan Kesetaraan (Penerapan SPM)	Jumlah siswa yang menerima		125 Orang	100,000,000	125 Orang	149,750,000	Seksi PNF	Disdikbud
		1	01	01	23	71	Pembinaan Keaksaraan Fungsional	Waktu pembinaan				12 Bulan	29,983,000	Seksi PNF	Disdikbud
		1	01	01	24		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan (PPD)	Persentase SD dan SMP yang terakreditasi A	100%	100%	265,000,000	100%	25,000,000	Sekretariat	Disdikbud
		1	01	01	24	01	Pengelolaan dan Penerimaan DUPAK bagi guru	Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru	50 Orang	250 Orang	25,000,000	250 Orang	25,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Disdikbud
		1	01	01	24	02	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMP	Jumlah guru SMP yang mengikuti kegiatan kompetensi	75 orang	75 orang	50,000,000		-	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	24	03	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik SD	Jumlah guru SD yang mengikuti kegiatan kompetensi	80 orang	80 orang	70,000,000		-	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	24	04	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik PAUD	Jumlah guru yang mengikuti kegiatan kompetensi	80 orang	80 orang	70,000,000		-	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	24	05	Peningkatan Kompetensi Penilik	jumlah penilik yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	45 orang	45 orang	50,000,000		-	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	25		Program Pengkajian Perencanaan Pendidikan	Peresentase keterpenuhan pengkajian, perencanaan pendidikan	100%	100%	228,778,989	100%	188,749,200	Sekretariat	Disdikbud
		1	01	01	25	06	Pelaksanaan Pendataan Sekolah	Jumlah dokumen pendataan sekolah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	40,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	01	25	08	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penyusunan perencanaan	waktu pelaksanaan monev dan pelaporan	3 Bulan	3 Bulan	40,000,000		-	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		1	01	01	25	07	Penyusunan Profil Pendidikan	Jumlah dokumen Profil Pendidikan yang tersusun	1 Dokumen			1 Dokumen	30,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	01	25	11	Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan/Pelaporan Online	jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	30,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	01	25	12	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	waktu pengelolaan data pokok pendidikan	12 Bulan	12 Bulan	88,778,989	12 Bulan	73,749,200	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		1	01	01	25	13	Pelaksanaan Pendataan Aset Dinas Pendidikan	jumlah dokumen pendataan aset dinas pendidikan	1 Dokumen			1 Dokumen	15,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud
		1	01	01	26		Program Peningkatan Akses Pendidikan (PPD)	Persentase angka lulusan pendidikan dasar dan menengah	100%	100%	51,167,900,000	100%	47,766,767,370	Bidang SD, SMP dan PTK	Disdikbud
		1	01	01	26	466	Pembinaan dewan pendidikan	jumlah dewan pendidikan yang melakukan pembinaan	12 Orang	12 Orang	50,000,000		-	Perencanaan	Disdikbud
		1	01	01	26	467	Penyediaan Operasional Manajemen Dana BOSDA	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	29,995,000	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	26	468	Penyediaan Operasional Manajemen Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos pusat)	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	29,140,000	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	26	469	Pelaksanaan BOSDA	Jumlah sekolah (SD/MI, SMP/MTs) yang Menerima bosda	484 Sekolah	591 Sekolah	5,000,000,000	591 Sekolah	3,305,700,000	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	26	470	Pengelolaan Sertifikasi Guru	waktu pengelolaan sertifikasi guru	12 Bulan	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	20,000,000	Bidang PTK	Disdikbud
		1	01	01	26	471	Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa yang berprestasi dan tidak Mampu	Jumlah siswa dan Mahasiswa Penerima BeaSiswa	1000 Orang	1000 Orang	3,000,000,000	1000 Orang	1,043,483,000	Bidang SD	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		1	01	01	26	472	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri	Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	397 Sekolah	397 Sekolah	29,596,400,000	397 Sekolah	31,180,969,470	Bidang SD	Disdikbud
		1	01	01	26	473	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Biaya Operasional Sekolah Tingkat SMP	84 Sekolah	84 Sekolah	13,406,500,000	84 Sekolah	12,157,479,900	Bidang SMP	Disdikbud
Penguatan dan pengembangan Kebudayaan								Persentase capaian pengembangan budaya	86%	100%		88%			
	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya							Jumlah festival budaya daerah	6 Kali	7 Kali		7 Kali			
								Jumlah cagar budaya	4 Cagar	4 Cagar		4 Cagar			
		2	16	1	19		Program Pengembangan Budaya	Persentase capaian pengembangan budaya	100%	100%	265,000,000	100%	249,288,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	03	Gita Bahana Nusantara	jumlah peserta gita bahana nusantara		50 Orang	25,000,000	50 Orang	24,710,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	04	Fesival keraton nusantara	Frekuensi pelaksanaan Festival keraton Nusantara		1 Kali	50,000,000		-	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	05	Penyelenggaraan bahana ekspresi pelajar	jumlah peserta bahana ekspresi pelajar		15 Orang	30,000,000		-	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	17	Seminar Budaya	jumlah peserta seminar budaya warisan tak benda (Orang)	75 Orang	80 Orang	50,000,000	80 Orang	29,250,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	18	Registrasi Cagar Budaya Daerah	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi (Objek)	2 Objek	3 Objek	60,000,000	3 Objek	49,665,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	21	Pekan Budaya Daerah	jumlah peserta pekan budaya daerah (orang)	100 Orang	1000 Orang	50,000,000	1000 Orang	49,523,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
		2	16	1	19	23	Pengadaan Buku Muatan Sejarah dan Budaya Lokal	jumlah buku sejarh dan muatan lokal yng di cetak (Exampler)				120 Exampler	96,140,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
JUMLAH											121,125,000,000		110,618,930,510		



Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah							Nilai Sakip perangkat daerah	BB	BB		BB		BB		BB		BB					
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
		X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata - Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	223,691,454,560	100%	226,998,721,360	100%	122,968,384,803	100%	121,868,384,803	100%	695,526,945,526	Sekretariat	Disdikbud	
		X	X	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100,500,000	100%	259,114,000	100%	259,114,000	100%	109,114,000	100%	727,842,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	42,000,000	7 Dokumen	75,114,000	7 Dokumen	75,114,000	7 Dokumen	31,114,000	29 Dokumen	223,342,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud		
		X	X	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan (Orang)		2 Orang	15,000,000	-	-	-	-	-	2 Orang	15,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud		
		X	XX	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	27 dokumen	27 dokumen	15,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	25,000,000	30 Dokumen	120,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	
		X	XX	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	27 dokumen	27 dokumen	20,500,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	25,000,000	30 Dokumen	125,500,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	
		X	XX	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	31,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	



		X	XX	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	31,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
		X	X	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Laporan)	5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	3,000,000	4 Dokumen	19,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	3,000,000	5 Laporan	30,000,000	5 Laporan	5,000,000	12 Laporan	43,000,000		
		X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dewan Pendidikan yang melakukan Evaluasi (Orang)	10 Orang	-	-	10 Orang	20,000,000	10 Orang	20,000,000	10 Orang	5,000,000	30 Orang	45,000,000	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud
								Frekuensi Pelaksanaan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan di satuan pendidikan (Kali)				1 Kali	50,000,000	1 Kali	20,000,000	1 Kali	5,000,000	3 Kali	75,000,000		
		X	X	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	222,339,981,510	100%	223,032,457,760	100%	218,853,855,114	100%	218,853,855,114	100%	883,080,149,498	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia Gaji dan Tunjangannya (Orang/Bulan)	840000 Orang	840000 Orang	222,334,981,510	840000 Orang	223,007,457,760	840000 Orang	218,828,855,114	840000 Orang	218,828,855,114	3360000 Orang	883,000,149,498	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Laporan)	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	20 Laporan	20,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud						
		X	X	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran (Laporan)			-	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	36 Laporan	60,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud
		X	X	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	100%	5,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	10,000,000	100%	95,000,000	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD (Dokumen)		-	-	-	-	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	25,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud
		X	X	01	2	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD-PD yang diamankan serta dokumen Penghapusan Aset pada satuan Pendidikan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	70,000,000	Sub Bagian Keuangan dan BMD	Disdikbud
		X	X	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	0%	-	100%	198,500,000	100%	150,000,000	100%	5,000,000	100%	353,500,000	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2.1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang disediakan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Orang)		-	-	-	-	50 Orang	20,000,000	-	-	50 Orang	20,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

			X	X	01	2.1	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah guru yang menerima DUPAK (Orang)	50 Orang	-	-	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	10 Orang	1,000,000	110 Orang	41,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		-	-	-	-	1 Dokumen	30,000,000	-	-	-	1 Dokumen	30,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Seleksi Administrasi dan Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah (Orang)		-	-	83 Orang	20,000,000	-	-	-	-	-	83 Orang	20,000,000	Bidang PTK	Disdikbud
			X	X	01	2.1	09		Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah (Orang)		-	-	83 Orang	50,000,000	-	-	-	-	-	83 Orang	50,000,000		
									Jumlah Peserta Diklat Profesi Guru (Orang)		-	-	20 Orang	50,000,000	-	-	-	-	-	20 Orang	50,000,000		
			X	X	01	2.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek (Orang)		-	-	13 Orang	58,500,000	17 Orang	80,000,000	1 Orang	4,000,000	31 Orang	142,500,000	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	
			X	X	01	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	364,999,950	100%	931,386,000	100%	1,000,000,000	100%	400,000,000	100%	2,696,385,950	Sekretariat	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	4 Jenis	4 Jenis	5,000,000	10 Jenis	50,000,000	5 Jenis	10,000,000	3 Jenis	3,000,000	22 Jenis	68,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Unit)		14 Unit	10,000,000							14 Unit	10,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan pengandaan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	20 Jenis	9,999,950							30 jenis	9,999,950	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
										Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan (Lembar)				10000 Lembar	10,000,000	10000 Lembar	10,000,000	5000 Lembar	5,000,000	25000 Lembar	25,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Kolom Adventorial (Kolom)		2 Kolom	30,000,000	2 Kolom	35,000,000	2 Kolom	35,000,000	2 Kolom	5,000,000	8 Kolom	105,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	06		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	12 Bahan bacaan	12 Bahan bacaan	5,000,000	12 Bahan bacaan	15,000,000	12 Bahan bacaan	20,000,000	12 Bahan bacaan	5,000,000	48 Bulan	45,000,000			
			X	X	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara (orang)	120 Kali	120 Kali	230,000,000	140 Kali	439,886,000	160 Kali	720,000,000	100 Kali	200,000,000	520 Kali	1,589,886,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
			X	X	01	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	55,000,000	12 Laporan	55,000,000	48 Laporan	190,000,000	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Disdikbud	
										Jumlah Laporan pengelolaan data pokok pendidikan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	127,000,000	48 Laporan			477,000,000
										Jumlah Data Base Pendidikan yang dibuat (Data Base)		-	-	1 Data Base	176,500,000	-	-	-	-	1 Data Base			176,500,000



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		X	X	01	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100%	119,990,000	100%	2,050,000,000	100%	100,000,000	100%	25,000,000	100%	2,294,990,000	Sekretariat	Disdikbud	
		X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	-	-	-	-	10 Unit	50,000,000	3 Unit	12,500,000	13 Unit	62,500,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
		X	XX	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan (Gedung)	-	-	3 Gedung	2,000,000,000	-	-	-	-	3 Gedung	2,000,000,000	Sekretariat	Disdikbud	
		X	XX	01	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	9 Unit	4 Unit	40,000,000	9 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	1 Unit	12,500,000	19 Unit	152,500,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	XX	01	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana pertunjukan pementasan (Jenis)	-	3 Jenis	50,000,000	-	-	-	-	-	3 Jenis	50,000,000			
		X	XX	01	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan mebel pembentukan sekretariat Pokja Bunda PAUD (jenis)	-	5 jenis	29,990,000	-	-	-	-	-	5 jenis	29,990,000			
		X	X	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	441,480,000	100%	458,763,600	100%	460,886,000	100%	410,886,000	100%	1,772,015,600	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar (Exemplar)	750000 exemplar	7500 exemplar	5,000,000	7500 exemplar	5,000,000	7500 exemplar	5,000,000	7500 exemplar	3,000,000	30000 exemplar	18,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	X	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	10 Jenis	11,000,000	10 Jenis	10,363,600	10 Jenis	10,486,000	10 Jenis	5,486,000	40 Jenis	37,335,600		
		X	X	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai (Kali)	12 Kali	12 Kali	151,000,000	12 Kali	151,000,000	12 Kali	153,000,000	12 Kali	140,000,000	48 Kali	595,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	X	01	2.1	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kali)	12 Kali	12 Kali	3,500,000	48 Kali	14,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud						
		X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Non PNS yang disediakan Gajinya (orang/Bulan)	344 Orang	1032 Orang	252,000,000	1044 Orang	275,400,000	1044 Orang	275,400,000	1044 Orang	250,400,000	4164 Orang	1,053,200,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jenis bahan/jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	12 Jenis	10,700,000	5 Jenis	3,500,000	5 Jenis	3,500,000	5 Jenis	3,500,000	27 Jenis	21,200,000		
		X	XX	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah ASN dan Tamu yang Terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman (Orang)	12 Kali	200 Orang	8,280,000	300 Orang	10,000,000	300 Orang	10,000,000	50 Orang	5,000,000	850 Orang	33,280,000		
		X	X	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	37,186,600	100%	28,500,000	100%	65,000,000	100%	15,000,000	100%	145,686,600	Sekretariat	Disdikbud
		X	X	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang dipelihara (Unit)	12 Bulan	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	31,500,000	1 Unit	5,000,000	4 Unit	56,500,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	X	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	12 Bulan	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	3 Unit	2,000,000	18 Unit	17,000,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud
		X	X	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya (Unit)	12 Bulan	10 Unit	12,344,570	5 Unit	5,000,000	5 Unit	5,000,000	5 Unit	2,000,000	25 Unit	24,344,570		



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		X	X	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Meter)	12 Kali	70 Meter	9,842,030	30 Meter	5,000,000	140 Meter	20,000,000	25 Meter	4,500,000	265 Meter	39,342,030	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
		X	X	01	2.1	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	12 Kali	-	-	5 Unit	3,500,000	5 Unit	3,500,000	3 Unit	1,500,000	13 Unit	8,500,000	Sub. Bagian Umum & Kepegawaian	Disdikbud	
		X	X	01	2.1		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi		100%	282,316,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	282,316,500	Sekretariat		
		X	X	01	2.1	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Satuan Pendidikan/Lembaga yang di Evaluasi (Sekolah/Lembaga) (Sekolah)		854 Sekolah	282,316,500	-	-	-	-	-	-	-	854 Sekolah	282,316,500	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Pendidikan
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan							Angka Rata - Rata Lama Sekolah	7,29 Tahun	7,5 Tahun		7,71 Tahun		7,92 Tahun		7,92 Tahun		7,92 Tahun					
							Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1. Meningkatkan Kualitas pendidikan dasar dan PAUD							Angka Lulusan SD dan SMP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	2. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD						Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	SD = 102 SMP = 95 PAUD = 60,20	SD = 103 SMP = 100 PAUD = 60,40		SD = 104 SMP = 105 PAUD = 60,60		SD = 105 SMP = 108 PAUD = 60,80		SD = 106 SMP = 112 PAUD = 70,00		SD = 106 SMP = 112 PAUD = 70,00		SD = 106 SMP = 112 PAUD = 70,00			
							Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,2	SD = 100 SMP = 100 PAUD = 62,4		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 63		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 64		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 65		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 65		SD = 100 SMP = 100 PAUD = 65			
		1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100%	100%	117,877,917,350	100%	91,350,456,668	100%	93,565,552,719	100%	99,286,065,997	100%	402,079,992,734	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang SD, SMP dan PTK	Disdikbud	
		X	X	01	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	16,199,826,250	100%	9,373,182,197	100%	9,015,682,197	100%	9,015,682,197	100%	43,604,372,841	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF DAN Bidang PTK	Disdikbud	
		X	X	01	2	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung seklaah / ruang kelas / ruang guru yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	12 Sekolah	3 ruang	283,290,000	2 Ruang	137,953,000	2 Ruang	137,953,000	2 Ruang	137,953,000	9 Ruang	697,149,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud	
							Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Ruang)		5 Ruang	489,500,000	3 Ruang	145,000,000	3 Ruang	20,000,000	3 Ruang	20,000,000	14 Ruang	674,500,000				



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	5 Sekolah	1 sekolah	245,400,000	2 sekolah	150,000,000	2 sekolah	150,000,000	2 sekolah	150,000,000	7 sekolah	695,400,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud
		X	X	01	2	02	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (Sekolah)	2 sekolah	2 sekolah	75,000,000	2 sekolah	82,500,000	2 sekolah	30,000,000	2 sekolah	30,000,000	8 sekolah	217,500,000			
							Jumlah taman baca yang dibangun (Taman Baca)		1 Taman baca	20,000,000	-	-	1 Taman baca	5,000,000	1 Taman baca	5,000,000	3 Taman baca	30,000,000			
							Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru / gedung yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	5 Ruang	11 ruang	1,412,254,000	4 ruang	160,000,000	4 ruang	160,000,000	4 ruang	160,000,000	23 ruang	1,892,254,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud
		X	X	01	2	03	Jumlah sekolah penerima rehabilitasi ruang kelas (Sekolah)	4 Sekolah	1 sekolah	30,000,000	1 sekolah	-	1 sekolah	10,000,000	1 sekolah	10,000,000	4 sekolah	50,000,000			
							Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	11 Ruang		-	2 sekolah	100,000,000	2 sekolah	100,000,000	2 sekolah	100,000,000	7 sekolah	300,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud
		X	X	01	2	04	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (Sekolah)			-	-	-	1 sekolah	5,000,000	1 sekolah	5,000,000	2 Sekolah	10,000,000			
							Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Luas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara (Meter)			-	-	-	50 Meter	10,000,000	50 Meter	10,000,000	100 Meter	20,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud
		X	X	01	2	05	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara (Meter)			-	-	-	30 Meter	5,000,000	30 Meter	5,000,000	60 Meter	10,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud	
		X	X	01	2	06	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Sekolah TK dan KB Penerima Pengadaan Mobiler (Sekolah)			-	1 sekolah	15,000,000	1 sekolah	15,000,000	1 sekolah	15,000,000	3 sekolah	45,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud
		X	X	01	2	07	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)			-	-	7 Lembaga	35,000,000	7 Lembaga	35,000,000	28 Lembaga	70,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud	
							Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)	8 Sekolah	1 lembaga	25,000,000	-	-	-	-	-	-	25,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud	
		X	X	01	2	09	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan (SPM) (Orang)	650 orang	650 orang	50,000,000	650 orang	40,000,000	650 orang	30,000,000	650 orang	30,000,000	2600 Orang	150,000,000			
		X	X	01	2	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD Yang menerima Biaya Personil (Anak)			-	30 Anak	50,000,000	30 Anak	20,000,000	30 Anak	20,000,000	90 Anak	90,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
		X	X	01	2	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD Penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)			-	-	-	1 PAUD	10,000,000	1 PAUD	10,000,000	2 PAUD	20,000,000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

							Jumlah lembaga yang mengikuti lomba (Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini) (Lembaga)	20 Lembaga	20 Lembaga	41,720,000	-	-	-	-	20 Lembaga	41,720,000					
							Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (Sekolah)		-	-	130 Sekolah	15,000,000	130 Sekolah	10,000,000	130 Sekolah	10,000,000	390 Sekolah	35,000,000			
							Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sarana dan Prasarana Satuan PAUD (Kali)		-	-	1 Kali	20,000,000	1 Kali	10,000,000	1 Kali	10,000,000	42 Kali	40,000,000			
							Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)	20 Orang	20 Orang	5,000,000	-	-	-	-	-	-	20 Orang	5,000,000			
							Jumlah lembaga sosialisasi Desa Mandiri Belajar PAUD (Lembaga)		50 Lembaga	40,000,000	-	-	-	-	-	-	50 Lembaga	40,000,000			
							Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)	50 Orang	50 Orang	28,000,000	-	-	-	-	-	-	50 Orang	28,000,000			
		X	X	1	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah tenaga pendidik TK yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)		50 Orang	20,950,000	-	-	-	-	-	50 Orang	20,950,000			
								Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Kegiatan)		1 Kegiatan	30,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	30,000,000		
								Jumlah peserta lomba profil bunda PAUD kecamatan (Kecamatan)		14 Kecamatan	12,000,000	-	-	-	-	-	-	14 Kecamatan	12,000,000		
								Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)		1 Kali	49,999,250	-	-	-	-	-	-	1 Kali	49,999,250		
								Jumlah TK negeri penerima dana operasional rutin sekolah (TK)		12 TK	160,000,000	-	-	-	-	-	-	12 Sekolah	160,000,000		
								waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan akses pendidikan PAUD (Bulan)		12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	-		
								Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	10,000,000	48 Bulan	60,000,000		
		X	X	01	2	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan BOP PAUD DAK Non Fisik (Lembaga)	363 lembaga	363 lembaga	8,214,000,000	363 lembaga	7,967,729,197	363 lembaga	7,967,729,197	363 lembaga	7,967,729,197	1452 lembaga	32,117,187,591	
							Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI	100%	100%	58,469,579,100	100%	42,618,837,279	100%	46,588,662,257	100%	52,122,425,712	100%	199,799,504,348			
		1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK) dan di biayai oleh (Ruang)	60 ruang	10 ruang	1,009,197,950	2 ruang	250,000,000	2 ruang	250,000,000	10 ruang	1,009,197,950	24 ruang	2,518,395,900	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)	25 Sekolah	50 toilet	555,332,050	13 Sekolah	800,000,000	13 Sekolah	800,000,000	13 Sekolah	800,000,000	89 Sekolah	2,955,332,050	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
							Jumlah sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)	1 sekolah	1 sekolah	35,000,000	1 sekolah	-	1 sekolah	25,000,000	1 sekolah	25,000,000	4 Sekolah	85,000,000		
	1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Unit)	20 Unit	17 unit	1,923,891,800	4 Unit	200,161,133	4 Unit	200,161,133	17 unit	1,923,891,800	42 unit	4,248,105,866	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
							Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (APBD) (Unit)			-	1 Unit	35,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	3 unit	75,000,000		
	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebel Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)		-	-	-	-	-	100 Sekolah	519,094,138	108 Sekolah	519,094,138	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud	
							Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebel Sekolah (APBD) (Sekolah)		3 sekolah	150,000,000	3 sekolah	105,000,000	3 sekolah	25,000,000	3 sekolah	25,000,000	12 sekolah	305,000,000		
	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan belajar (Sekolah)		-	-	-	2 sekolah	30,000,000	2 sekolah	30,000,000	4 sekolah	60,000,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud	
	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa penerima Pengadaan Perlengkapan (SPM) SD (Orang)	100 Orang	250 orang	75,000,000	300 orang	50,000,000	300 orang	50,000,000	300 orang	50,000,000	1150 Orang	225,000,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
	1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Luas Saranan, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)		-	-	500 Meter	140,000,000	50 Meter	20,000,000	50 Meter	20,000,000	600 Meter	180,000,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi /Tidak Mampu Tingkat SD (Orang)	1000 Orang	-	-	500 Orang	25,000,000	500 Orang	25,000,000	500 Orang	25,000,000	1500 Orang	75,000,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
							Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)		-	-	-	100 Orang	20,000,000	100 Orang	20,000,000	200 Orang	40,000,000			
							Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)		-	-	12 Bulan	7,500,000	12 Bulan	7,500,000	12 Bulan	7,500,000	36 Bulan	22,500,000		
	1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah paket Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa (DAK) (Paket)	330 Paket	52 paket	2,381,158,050	10 paket	200,000,000	52 paket	2,381,158,050	52 paket	2,381,158,050	166 Paket	7,343,474,150	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024**

						Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) SD (Orang)	-	-	200 Orang	40,000,000	200 Orang	40,000,000	200 Orang	40,000,000	600 Orang	120,000,000			
		1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik											Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
		1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar											Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
		1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa											Bidang Pembinaan SD	Disdikbud



						Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan Peningkatan kompetensi (Orang)	80 Orang	-	150 Orang	60,000,000	150 Orang	60,000,000	150 Orang	60,000,000	530 Orang	180,000,000			
						Jumlah kepala sekolah SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	80 Orang	-	150 Orang	60,000,000	150 Orang	60,000,000	150 Orang	60,000,000	530 Orang	180,000,000			
						Jumlah Pengawas SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	45 orang	-	40 orang	30,000,000	40 orang	30,000,000	40 orang	30,000,000	165 Orang	90,000,000			
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SD (Orang)	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	40 orang	-	Bidang PTK SD	Disdikbud	
						Jumlah peserta lomba guru berprestasi SD (Orang)	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	40 orang	-			
						Jumlah Pengawas SD yang mengikuti supervisi mutu (Orang)	11 bulan	-	-	-	-	-	-	-	11 bulan	-			
						Jumlah peserta lomba pengawas SD berprestasi (Orang)	35 orang	-	-	-	-	-	-	-	35 orang	-			
						Jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SD (Orang)	80 orang	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	-			
						Jumlah peserta pendidik yang mengikuti pengembangan Karir di sekolah dasar (Peningkatan Kompetensi) (Orang)	50 orang	38,213,000	-	-	-	-	-	-	50 orang	38,213,000			
						Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti MBS SD (Orang)	100 Lembaga	100 Orang	20,000,000	100 Orang	40,000,000	100 Orang	20,000,000	100 Orang	20,000,000	400 Orang	100,000,000		
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah guru yang menerima DUPAK bagi guru (Orang)	25 Orang	25 Orang	7,500,000	-	-	-	-	-	25 Orang	7,500,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud	
						Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa (Orang)	100 Orang	500 Orang	500,000,000	-	-	-	-	-	500 Siswa	500,000,000			
						Jumlah Ranperda yang diselesaikan tepat waktu (Ranperda)	1 Ranperda	25,000,000	-	-	-	-	-	-	1 Ranperda	25,000,000			
						Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat kab. Wajo (Sekolah)	1 Kali	42 Sekolah	-	42 Sekolah	25,000,000	42 Sekolah	25,000,000	42 Sekolah	25,000,000	168 Sekolah	75,000,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos Pusat) (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	35,000,000	48 Bulan	115,000,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud
						Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	28,890,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	48 Bulan	88,890,000	Bidang PTK SD	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

	1	01	02	2.01	30	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SD (Sekolah)	397 Sekolah	397 Sekolah	29,596,400,000	397 Sekolah	29,614,180,000	397 Sekolah	29,614,180,000	397 Sekolah	29,614,180,000	1588 Sekolah	118,438,940,000	Bidang Pembinaan SD	Disdikbud	
							Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SD (Sekolah)	397 Sekolah	397 Sekolah	3,153,000,000	397 Sekolah	100,000,000	397 Sekolah	242,500,000	397 Sekolah	242,500,000	1588 Sekolah	3,738,000,000	Bidang PTK SD		
	1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS	100%	100%	41,021,762,000	100%	36,007,101,852	100%	35,476,440,000	100%	35,476,440,000	100%	147,981,743,852	Bidang Pembinaan SMP dan Bidang PTK	Disdikbud	
	1	01	02.2	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah sekolah penerima penambahan runag kelas Baru dan dibiayai oleh (DAK) Ruang	-	-	-	10 Ruang	2,000,000,000	20 Ruang	4,000,000,000	20 Ruang	4,000,000,000	50 Ruang	10,000,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
							Jumlah sekolah penambahan Ruang kelas Baru APBD (Ruang)	-	-	-	3 Ruang	200,000,000	3 Ruang	20,000,000	3 Ruang	20,000,000	9 Ruang	240,000,000			
	1	01	02.2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	-	-	10 Ruang	1,000,000,000	5 Ruang	500,000,000	5 Ruang	500,000,000	20 ruang	2,000,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
	1	01	02.2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	-	-	-	5 Ruang	500,000,000	5 Ruang	500,000,000	5 Ruang	500,000,000	10 Ruang	1,000,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
	1	01	02.2	02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	-	-	15 Ruang	1,500,000,000	10 Ruang	1,000,000,000	10 ruang	1,000,000,000	35 ruang	3,500,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
	1	01	02.2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Laboratorium dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	4 Ruang	-	-	10 Ruang	2,000,000,000	5 Ruang	500,000,000	5 Ruang	500,000,000	20 ruang	3,000,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
	1	01	02.2	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	3 Ruang	-	-	10 Ruang	1,000,000,000	10 Ruang	1,000,000,000	10 Ruang	1,000,000,000	30 Ruang	3,000,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
	1	01	02.2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	4 Sekolah	-	-	3 sekolah	500,000,000	3 sekolah	500,000,000	3 sekolah	500,000,000	9 Sekolah	1,500,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
							Jumlah sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas APBD (Sekolah)	3 sekolah	290,000,000	5 sekolah	553,161,852	5 sekolah	50,000,000	5 sekolah	50,000,000	18 Sekolah	943,161,852				
	1	01	02.2	02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah ruang gedung sekolah (ruang kepala sekolah / ruang tata usaha yang direhabilitasi sedang berat) dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	15 ruang	2,837,656,574	15 ruang	2,000,000,000	15 ruang	2,000,000,000	15 ruang	2,000,000,000	60 ruang	8,837,656,574	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang / berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	21 Ruang	83 ruang	12,779,813,770	15 ruang	2,000,000,000	15 ruang	2,000,000,000	15 ruang	2,000,000,000	128 ruang	18,779,813,770	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
							Jumlah ruang Kelas SMP yang di rehabilitasi APBD (Ruang)		-	-	-	-	1 ruang	20,000,000	1 ruang	20,000,000	2 ruang	40,000,000		
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	4 ruang	6 ruang	1,609,094,539	5 ruang	1,000,000,000	5 ruang	1,000,000,000	5 ruang	1,000,000,000	21 ruang	4,609,094,539	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
							Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Ruang)		-	-	-	-	2 ruang	20,000,000	2 ruang	20,000,000	4 Ruang	40,000,000		
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)		2 ruang	281,638,824	6 ruang	1,000,000,000	6 ruang	1,000,000,000	6 ruang	1,000,000,000	20 ruang	3,281,638,824	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	4 Ruang	3 ruang	742,692,824	5 ruang	1,187,720,000	5 ruang	1,187,720,000	5 ruang	1,187,720,000	18 ruang	4,305,852,824	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium (IPA dan Komputer) yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	14 Ruang	5 ruang	1,447,336,324	10 ruang	2,000,000,000	10 ruang	2,000,000,000	10 ruang	2,000,000,000	35 ruang	7,447,336,324	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (Ruang)		-	-	-	-	2 ruang	20,000,000	2 ruang	20,000,000	4 Ruang	40,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Unit)		2 unit	486,354,324	5 unit	1,000,000,000	5 unit	1,000,000,000	5 unit	1,000,000,000	17 unit	3,486,354,324	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet dan Ruang Ibadah) yang di rehabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	6 ruang	3 ruang	354,161,821	8 ruang	1,000,000,000	8 ruang	500,000,000	8 ruang	500,000,000	27 ruang	2,354,161,821	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
							Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang)		-	-	-	-	2 sekolah	20,000,000	2 sekolah	20,000,000	8 sekolah	40,000,000		



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

						Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) (Orang)			-	-	74 Orang	30,000,000	74 Orang	30,000,000	74 Orang	30,000,000	222 Orang	90,000,000		
						Frekuensi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah (kali)			-	-	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	2 Kali	25,000,000	6 Kali	75,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Frekuensi Pelaksanaan Monitoring keterfaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMP (Kali)			-	-	-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	2 kali	20,000,000		
						Waktu pelaksanaan PPDB Online (Bulan)	12 bulan	12 bulan		100,000,000	12 bulan	30,000,000	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	48 Bulan	170,000,000		
						Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SMP (kali)					1 kali	20,000,000	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000	3 kali	30,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Menengah (Orang)			-	-	-	-	20 Sekolah	5,000,000	20 Sekolah	5,000,000	40 Sekolah	10,000,000		
						Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP (Orang)		20 Orang		10,000,000	10 Orang	15,000,000	10 Orang	15,000,000	10 Orang	15,000,000	50 orang	55,000,000		
						Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)			-	-	100 Orang	75,000,000	100 Orang	67,500,000	100 Orang	67,500,000	350 Orang	210,000,000		
						Jumlah peserta lomba siswa berprestasi SMP (Orang)			-	-	100 Orang	30,000,000	100 Orang	20,000,000	100 Orang	20,000,000	300 Orang	70,000,000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka (orang)			-	-	100 Orang	15,000,000	100 Orang	10,000,000	100 Orang	10,000,000	300 Orang	35,000,000		
						Jumlah peserta pelatihan UKS SMP (Orang)			-	-	100 Orang	15,000,000	50 Orang	5,000,000	50 Orang	5,000,000	200 Orang	25,000,000		
						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP (Orang)			-	-	-	-	50 Orang	5,000,000	50 Orang	5,000,000	100 Orang	10,000,000		
						Jumlah peserta LDK OSIS SMP (Orang)			-	-	100 Peserta	15,000,000	100 Orang	10,000,000	100 Orang	10,000,000	300 Orang	35,000,000		



						Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SMP (Sekolah)	84 sekolah	84 sekolah	1.234.800.000	84 sekolah	100.000.000	84 sekolah	100.000.000	84 sekolah	100.000.000	336 Sekolah	1.534.800.000	Bidang Pembinaan SMP	Disdikbud	
		1	01	02.2	02	43	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SMP (Sekolah)	84 sekolah	84 sekolah	13.406.500.000	84 sekolah	13.388.720.000	84 sekolah	13.388.720.000	84 sekolah	13.388.720.000	336 Sekolah	53.572.660.000	Bidang PTK SMP	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (%)	100%	100%	2.186.750.000	100%	3.351.335.340	100%	2.484.768.265	100%	2.671.518.088	100%	10.694.371.693	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	-	-	-	1 Ruang	100.000.000	1 Ruang	100.000.000	2 Ruang	200.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)	-	-	-	-	1 Lembaga	50.000.000	1 Lembaga	50.000.000	2 Lembaga	100.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang praktik/ gedung Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	5 ruang	374.000.000	-	-	1 ruang	50.000.000	1 ruang	50.000.000	7 ruang	474.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah penerima ehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	-	-	-	-	1 Ruang	50.000.000	1 Ruang	50.000.000	2 Ruang	100.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Luas sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dipelihara (Meter)	-	-	-	-	50 Meter	20.000.000	50 Meter	20.000.000	100 Meter	40.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga (SKB/PKBM) penerima pengadaan Mobiler dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)	-	-	-	-	1 Lembaga	38.214.000	1 Lembaga	38.214.000	2 Lembaga	76.428.000	Bidang PNF	Disdikbud	
		1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa (SPM) (Orang)	125 siswa	125 siswa	50.000.000	150 siswa	40.000.000	150 siswa	30.000.000	150 siswa	30.000.000	575 Siswa	150.000.000	Bidang PNF	Disdikbud
		1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta penerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Orang)	-	-	-	-	50 Orang	10.000.000	50 Orang	10.000.000	100 Orang	20.000.000	Bidang PNF	Disdikbud	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)	3 Lembaga	1 Lembaga	100,000,000	10 Lembaga	1,638,214,000	10 Lembaga	350,000,000	10 Lembaga	350,000,000	31 Lembaga	2,438,214,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah peserta didik Keaksaraan (Orang)	40 Orang	40 orang	40,000,000	100 orang	70,000,000	100 orang	36,950,000	100 orang	36,950,000	340 orang	183,900,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah peserta PKBM pendidikan kecakapan hidup (orang)		-	-	9 PKBM	50,000,000	9 PKBM	20,000,000	9 PKBM	20,000,000	9 PKBM	90,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Frekuensi Pendataan Penuntasan Buta Aksara (Kali)		-	-	1 Kali	50,000,000	1 Kali	10,000,000	1 Kali	10,000,000	3 Kali	70,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah Peserta Kegiatan PKBM (PKBM)		-	-	9 PKBM	20,000,000	9 PKBM	10,000,000	9 PKBM	10,000,000	9 PKBM	40,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kali)		-	-	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	3 Kali	30,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)		-	-	-	-	50 Orang	20,000,000	50 Orang	10,000,000	100 Orang	30,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Waktu operasional rutin SKB (Bulan)	12 bulan	12 bulan	117,550,000	-	-	12 bulan	20,000,000	12 bulan	20,000,000	36 bulan	157,550,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Waktu pelaksanaan BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Bulan)	12 bulan	12 bulan	1,505,200,000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	1,505,200,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah Kegiatan Persiapan dan Akreditasi satuan pendidikan SKB (Lembaga)		-	-	-	-	-	1 Lembaga	5,000,000	1 Lembaga	5,000,000	5,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah Kegiatan Persiapan dan Pendirian satuan pendidikan PKBM (Lembaga)		-	-	-	-	-	9 PKBM	5,000,000	9 PKBM	5,000,000	5,000,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Frekuensi Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (Kali)		-	-	1 Kali	13,050,000	1 Kali	13,050,000	1 Kali	13,050,000	3 Kali	39,150,000	Bidang PNF	Disdikbud
						Jumlah Lembaga penerima BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Lembaga)		-	-	12 Lembaga	1,460,071,340	12 Lembaga	1,646,554,265	12 Lembaga	1,833,304,088	36 Lembaga	4,939,929,693	Bidang PNF	Disdikbud
						persentase penerapan kurikulum muatan lokal apada jenjang pendidikan dasar	0%	0%	-	0%	-	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	400,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	0%	0%	-	0%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

						1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	-	-	-	100 Orang	30,000,000	100 Orang	30,000,000	200 Orang	60,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	-	-	-	100 Orang	30,000,000	100 Orang	30,000,000	200 Orang	60,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah PTK yang telah mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	-	-	-	100 Orang	40,000,000	100 Orang	40,000,000	200 Orang	80,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	0%	0%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	-	-	-	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	100 Orang	100,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	-	-	-	50 Orang	50,000,000	50 Orang	50,000,000	100 Orang	100,000,000	Seksi Kurikulum	Disdikbud
						1	01	04			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0%	0%	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	300,000,000	Bidang PTK	Disdikbud
						1	01	04	2.01		Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0%	0%	-	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	300,000,000	Bidang PTK	Disdikbud
						1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang akan dipetakan dengan baik (Orang)	-	-	-	6000 orang	75,000,000	6000 orang	75,000,000	12000 orang	150,000,000	Bidang PTK	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

						1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang akan ditata dan didistribusikan dengan baik ke satuan pendidikan dan lembaga (Orang)	-	-	-	500 orang	75.000.000	500 orang	75.000.000	1000 orang	150.000.000	Bidang PTK	Disdikbud		
						1	01	05			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang berakreditasi	0%	0%	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	500.000.000	Bidang Pembinaan PAUD	Disdikbud		
						1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	0%	0%	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	500.000.000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud		
						1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga PAUD baru yang diusulkan penerbitan perizinannya (Lembaga)	-	-	-	100 Lembaga	250.000.000	100 Lembaga	250.000.000	200 Lembaga	500.000.000	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Disdikbud		
Penguatan dan pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya										Persentase capaian pengembangan budaya	88%	100%	-	100%			100%		100%					
											Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	100%	100%	-	100%			100%		100%					
											Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	-	100%			100%		100%					
						2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Budaya	100%	-	-	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	220.000.000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
						2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	140.000.000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
						2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Frekuensi pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (Kali)	-	-	-	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	2 Kali	60.000.000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud		
						2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Pelestarian Lagu-lagu Daerah (Orang)	-	-	20 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000	60 Orang	30.000.000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
											Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kesenian (Kecamatan)	-	-	14 kecamatan	30.000.000	14 kecamatan	10.000.000	14 kecamatan	10.000.000	36 kecamatan	50.000.000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud		



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

		2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	80,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud		
		2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)	-	-	-	3 Objek	10,000,000	3 Objek	10,000,000	6 Objek	20,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
		2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya (Kali)	-	1 Kali	20,000,000	1 Kali	20,000,000	1 Kali	20,000,000	3 Kali	60,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
		2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	100%	20,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
		2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	20,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
		2	22	03	2'01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta gita bahana nusantara (Orang)	50 Orang	-	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	200 Orang	60,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
							Jumlah Peserta festival pelajar (Orang)	-	-	-	50 Orang	10,000,000	50 Orang	10,000,000	20 sekolah	20,000,000				
							Jumlah peserta pagelaran budaya daerah (sanggar seni)	17 sanggar	10,000,000	-	17 sanggar	10,000,000	17 sanggar	10,000,000	51 sanggar	30,000,000				
							Jumlah peserta bahana ekspresi pelajar (Orang)	15 Orang	15 orang	10,000,000	15 orang	10,000,000	15 orang	10,000,000	60 orang	40,000,000				
		2	22	03	2'01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pagelaran Kesenian Tradisional Tingkat SMP Sederajat (Orang)	-	-	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	150 Orang	60,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud
							Jumlah Peserta Lomba Lagu Daerah Tingkat PAUD, SD dan SMP (Orang)	-	-	50 Orang	30,000,000	50 Orang	30,000,000	50 Orang	30,000,000	150 Orang	90,000,000			
		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	34,000,000	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	
		2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	34,000,000	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	Bidang Kebudayaan	Disdikbud	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 , Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019- 2024 , RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 , serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam empat program meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan ;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
7. Program Pembinaan Sejarah;
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Program Pengelolaan Permeseuman.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 di bawah ini:



Tabel 7.1

Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2020 (pokok) serta Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 (Perubahan) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kinerja Utama Renstra (Pokok)							Indikator Kinerja Utama Perubahan-Renstra						
No	IKU Renstra (Pokok)	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	No	IKU Perubahan Renstra	Asumsi Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Kondisi Akhir Perubahan Renstra
1	Nilai Sakip perangkat daerah	Nilai Sakip	CC	CC	BB	BB	1	Nilai Sakip perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100
3	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	6,80	6,37	7,29	6,81	3	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	7,5	7,71	7,92	7,92	7,92
							4	Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan	100	100	100	100	100
4	Angka Lulusan SD dan SMP	Persen	100	93,51	100	100	5	Angka Lulusan SD dan SMP	100	100	100	100	100
5	Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	74.99		60.20	60.12	6	Pendidikan Anak Usia Dini	60.40	60.60	60.80	70	70
6	Angka Partisipasi Kasar						7	Angka Partisipasi Kasar					
6,1	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	85	100	100	102	7,1	Angka Partisipasi Kasar SD	103	104	105	106	106



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

6,2	Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	65	90,54	100	95	6,2	Angka Partisipasi Kasar SMP	100	105	108	112	112
6,3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	100	59,54	100	60,20	6,3	Angka Partisipasi Kasar PAUD	60,40	60,60	60,80	70	70
7	Angka partisipasi Murni						7	Angka partisipasi Murni					
7,1	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	85.11	99,77	100	100	7,1	Angka Partisipasi Murni SD	100	100	100	100	100
7,2	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	63	95,38	100	100	7,2	Angka Partisipasi Murni SMP	100	100	100	100	100
7,3	Angka Partisipasi Murni PAUD	Persen	100	60,00	100	62,2	7,3	Angka Partisipasi Murni PAUD	62,4	63	64	65	65
8	Angka Partisipasi Sekolah						8	Angka Partisipasi Sekolah					
8,1	Angka partisipasi Sekolah SD/ MI/ Paket A	Persen	851.06		1000	880.98	8,1	Angka partisipasi Sekolah SD/ MI/ Paket A	100	100	100	100	100
8,2	Angka partisipasi sekolah SMP/ MTS/ Paket B	Persen	623.4		1000	605.91	8,2	Angka partisipasi sekolah SMP/ MTS/ Paket B	100	100	100	100	100
9	Angka Putus Sekolah						9	Angka Putus Sekolah					
9,1	Angka Putus Sekolah SD/ MI/paket A	Angka	0.66		1,2	0,85	9,1	Angka Putus Sekolah SD/ MI/paket A	1,1	1	0,9	0,5	0,5

9,2	Angka Putus Sekolah SMP/ MTS /paket B	Angka	1.53		0,5	1.64	9,2	Angka Putus Sekolah SMP/ MTS /paket B	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
10	Angka Kelulusan						10	Angka Kelulusan					
10,1	Angka Kelulusan SD/ MI/ paket A	Persen	97		1	0,98	10,1	Angka Kelulusan SD/ MI/ paket A	100	100	100	100	100
10,2	Angka Kelulusan SMP/ MTS / Paket B	Persen	106		1	0,97	10,2	Angka Kelulusan SMP/ MTS / Paket B	100	100	100	100	100
11	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTS		0.87		0.87	0.87	11	Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTS	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
12	Sekolah pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	Persen	25		0,3	0,3	12	Sekolah pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	40	50	60	70	70
13	Sekolah pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	Persen	7.56		7.60%	7.60%	13	Sekolah pendidikan SMP/ MTs kondisi bangunan baik	40	50	60	70	70
14	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia Sekolah Pendidikan Dasar		95.84		115.09	115.09	14	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia Sekolah Pendidikan	94	94	94	94	94
15	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar (SD/ Mi dan SMP/ Mts)	Angka	615.03		0,5	1102,25	15	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar (SD/ Mi dan	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9
16	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD/ Mi		124.01		124.01	102.01	16	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar (SD/	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9
17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	29.07		29.07%	28.50%	17	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah	33.70	37.05	40.40	43.75	43.75

18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D 4	Persen	86		0,88	0,87	18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D 4	90	94	95	97	97
19	Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	Persen	100		1	88.19%	19	Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan	89.00	90	93	95	95
20	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen			145.83%	145.83%	20	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98.04	98.05	98.07	98.08	98.08
21	Persentase capain pengembangan budaya	Persen			100	100	21	Persentase capain pengembangan budaya	100	100	100	100	100
22	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	Persen			100	100	22	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	100	100	100	100	100
23	Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	Persen			100	100	23	Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
24	Jumlah festival budaya daerah	Kali	3		7	6	24	Jumlah festival budaya daerah	8	9	10	11	11
25	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		100		60	60	25	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	65	68	69	70	70
26	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Angka	4		4	4	26	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	5	6	7	7
27	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Angka	24		24	24	27	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	28	32	32	36	36

Tabel 7.1. 2 . a
Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Kode	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2020		Unit Kerja Perangkat Daerah
			Target	Capaian	
1.01.1.09	Ketersediaan renstra, renja, laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	%	100%	100%	Disdikbud
1.01.1.10	Cakupan pemenuhan penunjang urusan	%	100%	99,78%	Disdikbud
1.01.1.15	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	100%	60,12%	Disdikbud
1.01.1.16	Persentase WNI umur 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	100%	96,57%	Disdikbud
1.01.01.23	Persentase WNI umur 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan	%	100%	63,6%	Disdikbud
1.01.01.24	Persentase SD dan SMP yang terakreditasi A	%	100%	100%	Disdikbud
1.01.01.25	Persentase keterpenuhan pengkajian, perencanaan pendidikan	%	100%	100%	Disdikbud
1.01.01.26	Persentase angka lulusan pendidikan dasar dan menengah	%	100%	100%	Disdikbud
2.16.1.19	Persentase capaian pengembangan budaya	%	100%	100%	Disdikbud



Tabel 7.1. 2 . b
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2024
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian IKK	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Prode Perubahan Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	2024		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	60,40	60,60	60,80	70,00	70,00	Disdikbud
2	Angka Patisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	103	104	105	106	106	Disdikbud
3	Angka Patisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	105	108	112	112	Disdikbud
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	Orang	4650	4850	4899	4990	4990	Disdikbud
5	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	Orang	4650	4850	4899	4990	4990	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
7	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
9	Angka Partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	1,1	1	0,9	0,5	0,5	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
 Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

11	Angka Putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	Disdikbud
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	Disdikbud
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	40	50	60	70	70	Disdikbud
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	40	50	60	70	70	Disdikbud
17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persen	94	94	94	94	94	Disdikbud
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Persen	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	Disdikbud
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Persen	0,75	0,8	0,85	0,9	0,9	Disdikbud
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	33,70	37,05	40,40	43,75	43,75	Disdikbud
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	89,00	90%	93%	95%	95%	Disdikbud
22	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	98,04	98,05	98,07	98,08	98,08	Disdikbud
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90	94	95	97	97	Disdikbud
24	Penyelenggara festival seni dan budaya	Kali	8	9	10	11	11	Disdikbud
25	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	65	68	69	70	70	Disdikbud
26	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	4	5	6	7	7	Disdikbud
27	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	28	32	32	36	36	Disdikbud



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tabel 7.3

**Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penetapan Target Indikator SPM
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
Tahun 2021-2024 (Permendagri No.100 Tahun 2018)**

No	Bidang/Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Tahun 2020		Target			
			Target	Capaian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs	100%	100%	96.57%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	63,6%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	60.12%	100%	100%	100%	100%



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Tabel 7. 4
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2021-2024

Kode Indikator	Target Indikator	Satuan	Sumber Data	Tahun 2020		Target Pencapaian			
				Target	Capaian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa	Orang	Bidang Pembinaan SD	500	500	500	500	500	500
2	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa SD	Orang	Bidang Pembinaan SD	50	50	30	30	100	100
3	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Orang	Bidang Pembinaan SD	50	50	0	350	350	350
4	Jumlah Peserta Lomba Siswa Berprestasi	Orang	Bidang Pembinaan SD	0	0	0	84	84	84
5	Jumlah siswa sekolah Menengah pertama yang menerima Beasiswa	Orang	Bidang Pembinaan SMP	500	500	500	500	500	500
6	Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP	Orang	Bidang Pembinaan SMP	50	50	20	10	10	10



7	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Orang	Bidang Pembinaan SMP	50	50	0	100	100	100
8	Jumlah peserta lomba siswa berprestasi SMP	Orang	Bidang Pembinaan SMP	0	0	0	100	100	100
9	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka	Orang	Bidang Pembinaan SMP	0	0	0	100	100	100
10	Jumlah peserta pelatihan UKS SMP	Orang	Bidang Pembinaan SMP	0	0	0	50	50	50
11	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP	Orang	Bidang Pembinaan SMP	0	0	0	0	50	50
12	Jumlah peserta LDK OSIS SMP	Orang	Bidang Pembinaan SMP	0	0	0	100	100	100
13	Waktu Pembinaan PAUD holistik dan integratif	Bulan	Bidang PAUD dan PNF	12	12	0	0	0	0
14	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif	Orang	Bidang PAUD dan PNF	0	0	50	50	50	50
15	Jumlah peserta didik Keaksaraan	Orang	Bidang PAUD dan PNF	40	40	40	40	40	40



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Disdikbud Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Rumus indikator yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Rumus
1	2	3
Indikator Tujuan		
1	Nilai Sakip perangkat daerah	
2	Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
3	Rata - Rata Persentase Capaian Indikator SPM Pendidikan	Jumlah seluruh persentase SPM pendidikan dibagi jumlah seluruh SPM pendidikan dikali 100%
4	Persentase capain pengembangan budaya	Jumlah capain pengembangan budaya dibagi dengan Jumlah budaya dikali 100%
Indikator Sasaran		
1	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah capaian kinerja program perangkat daerah dibagi dengan Jumlah program perangkat daerah dikali 100%
2	Angka Lulusan SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan Tertentu Per Jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat Pendidikan Tertentu X 100
3	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu X 100 persen
4	Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu per Jumlah penduduk kelompok usia tertentu X 100 persen
5	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	Jumlah festival budaya daerah
6	Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya
Indikator Program		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dibagi dengan Jumlah penunjang urusan perangkat daerah



		dikali 100%
2	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	Jumlah Siswa usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi pada jenjang PAUD per Jumlah WNI umur 5 – 6 Tahun x 100 persen
3	Persentase WNI umur 7 - 15 tahun yang berpartisipasi pada SD/ MI / SMP/ MTS	Jumlah Siswa usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi pada jenjang pendidikan SD/MI/SMP/MTs per Jumlah WNI umur 7 – 15 x 100 persen
4	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan penerapan kurikulum muatan lokal dibagi Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan penerapan kurikulum muatan lokal dikali 100%
5	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibagi dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikali 100%
6	Persentase lembaga pendidikan yang berakreditasi	Jumlah lembaga pendidikan yang berakreditasi dibagi dengan Jumlah lembaga Pendidikan dikali 100%
7	Persentase Pengembangan Budaya	Jumlah Pengembangan Budaya dibagi dengan Jumlah Budaya dikali 100%
8	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pengembangan Kesenian Tradisional dibagi dengan Jumlah Kesenian Tradisional dikali 100%
9	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Sejarah Lokal dikali 100%
10	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan Total Benda, situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikali 100%
11	Persentase sarana dan prasarana museum yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana museum yang terpelihara dibagi dengan Jumlah sarana dan prasarana museum dikali 100%
1	Indikator Kegiatan	
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dibagi Jumlah Seluruh dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dikali 100%
2	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	Jumlah Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu dibagi dengan Jumlah Administrasi



		Keuangan PD dikali 100%
3	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Jumlah BMD yang Diadministrasi sesuai standar dibagi dengan Jumlah BMD dikali 100%
4	Persentase Pegawai PD yang dilayani	Jumlah Pegawai PD yang dilayani dibagi dengan Jumlah Pegawai PD di kali 100%
5	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah administrasi umum PD berjalan sesuai standar dibagi dengan Jumlah administrasi umum PD dikali 100%
6	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah BMD-PD penunjang yang terpenuhi dibagi dengan Jumlah BMD-PD dikali 100%
7	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Jumlah jasa penunjang urusan yang tersedia dibagi dengan Jumlah jasa penunjang urusan dikali 100%
8	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Jumlah BMD penunjang urusan yang terpelihara dibagi dengan Jumlah BMD penunjang dikali 100%
9	Persentase Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi dibagi dengan Jumlah Organisasi dikali 100%
10	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibagi dengan Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikali 100%
11	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / MI dibagi dengan Jumlah Sekolah Dasar / MI dikali 100%
12	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ MTS dibagi dengan Jumlah Sekolah Menengah Pertama/ MTS dikali 100%
13	Persentase WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (%)	Jumlah WNI umur 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan dibagi dengan Jumlah WNI umur 7 - 18 tahun diwilayah itu dikali 100%
14	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	Jumlah muatan lokal yang masuk dalam kurikulum dibagi dengan Jumlah keseluruhan jenis muatan lokal yang masuk dalam kurikulum dikali 100%
15	Persentase muatan lokal yang masuk dalam kurikulum	Jumlah muatan lokal yang masuk dalam kurikulum dibagi dengan jumlah muatan lokal keseluruhan dikali 100%
16	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik	Jumlah Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi



	dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dibagi dengan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dikali 100%
17	Persentase Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dibagi dengan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidik Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dikali 100%
18	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dikali 100%
19	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dikali 100%
20	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dikali 100%
21	Persentase pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dikali 100%
22	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dikali 100%
23	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dibagi dengan Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dikali 100%
24	Cakupan sarana dan parasarana museum yang dikelola	Jumlah keseluruhan sarana dan parasarana museum yang dikelola
1	Indikator Sub Kegiatan	



1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Pokok yang disusun tepat waktu (Dokumen)
2	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan (Orang)	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun tepat waktu (Dokumen)
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen Revisi Renstra yang tersusun (Dokumen)
4	Jumlah Dokumen RKA-PD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	Jumlah dokumen Profil Pendidikan yang tersusun (Dokumen)
5	Jumlah Dokumen DPA-PD (Dokumen)	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Perencanaan Keuangan (Orang)
6	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD (Dokumen)	Jumlah dokumen pendataan sekolah yang tersusun (Dokumen)
7	Jumlah Dokumen Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Laporan)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD yang digandakan (Dokumen)
8	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD (Laporan)	Jumlah Dokumen RKA-PD yang digandakan (Dokumen)
9	Jumlah Dewan Pendidikan yang melakukan Evaluasi (Orang)	Jumlah Dokumen DPA-PD yang digandakan (Dokumen)
10	Frekuensi Pelaksanaan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan di satuan pendidikan (Kali)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD yang digandakan (Dokumen)
11	Jumlah ASN yang tersedia Gaji dan Tunjangannya (Orang/Bulan)	Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (Laporan)
12	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD (Laporan)	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD (Laporan) pendidikan (Bulan)
13	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran (Laporan)	Jumlah Dewan Pendidikan yang melakukan Evaluasi (Orang)
14	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD-PD (Dokumen)	Waktu Pelaksanaan Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan di satuan
15	Jumlah BMD-PD yang diamankan serta dokumen Penghapusan Aset pada satuan Pendidikan (Dokumen)	Jumlah BMD-PD yang diamankan serta dokumen Penghapusan Aset pada satuan Pendidikan (Dokumen)
16	Jumlah ASN yang disediakan Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Orang)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya (Orang)
17	Jumlah guru yang menerima DUPAK (Orang)	Jumlah guru yang menerima DUPAK (Orang)
18	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)



	(Dokumen)	
19	Jumlah Peserta Seleksi Administrasi dan Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah (Orang)	Jumlah Peserta Seleksi Administrasi dan Seleksi Subtansi Calon Kepala Sekolah (Orang)
20	Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah (Orang)	Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah (Orang)
25	Jumlah Peserta Diklat Profesi Guru (Orang)	Jumlah Peserta Diklat Profesi Guru (Orang)
26	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek (Orang)	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan (Orang)
27	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)
28	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Jenis)
29	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan (Lembar)	Jumlah Penyediaan Kolom Adventorial (Kolom)
	Jumlah Penyediaan Kolom Adventorial (Kolom)	
30	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)
31	Frekuensi Rapat Koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara (orang)	Jumlah Orang yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara (orang)
32	Jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu (Laporan)	Jumlah laporan online yang diselesaikan tepat waktu (Laporan)
33	Jumlah Laporan pengelolaan data pokok pendidikan (Laporan)	Jumlah Laporan pengelolaan data pokok pendidikan (Laporan)
34	Jumlah data Data Base Pendidikan yang dibuat (Data Base)	Jumlah data Data Base Pendidikan yang dibuat (Data Base)
35	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)	Jumlah Mebel yang diadakan (Unit)
36	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan (Gedung)	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan beserta perabotnya (Gedung Aula Mappadeceng, Gedung Perencanaan dan



		PTK) (Gedung)
37	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)
38	Jumlah jenis sarana pertunjukan pementasan (Jenis)	Jumlah jenis sarana pertunjukan pementasan (Jenis)
39	Jumlah jenis pengadaan mebel pembentukan sekretariat Pokja Bunda PAUD (jenis)	Jumlah jenis pengadaan mebel pembentukan sekretariat Pokja Bunda PAUD (jenis)
40	Jumlah surat keluar (Exampler	Jumlah surat keluar (Exampler
41	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)
42	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai (Kali)	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai (Kali)
43	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kali)	Jumlah satuan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kali)
44	Jumlah Non PNS yang disediakan Gajinya (orang/Bulan)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (orang/Bulan)
45	Jenis bahan/jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	Jenis bahan/jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)
46	Jumlah ASN dan Tamu yang Terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman) (Orang)	Jumlah Orang yang Terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman) (Orang)
47	Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang dipelihara (Unit)	Jumlah kendaraan Mobil Jabatan yang dipelihara (Unit)
48	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)
49	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya (Unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya (Unit)
50	Jumlah Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara (Meter)
51	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)
52	Jumlah Satuan Pendidikan/Lembaga yang di Evaluasi (Sekolah/Lembaga) (Sekolah)	Jumlah Satuan Pendidikan/Lembaga yang di Evaluasi (Sekolah/Lembaga) (Sekolah)
53	Jumlah gedung seklah / ruang kelas / ruang guru yang dibangun dan dibiayai oleh	Jumlah gedung / ruang kelas / ruang guru yang dibangun (DAK) (Ruang)



	(DAK) (Ruang)	
54	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Ruang)	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun (Ruang)
55	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (DAK) (Sekolah)
56	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (APBD)(Sekolah)	Jumlah Sekolah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun (APBD)(Sekolah)
57	Jumlah taman baca yang dibangun (Taman Baca)	Jumlah taman baca yang dibangun (Taman Baca)
58	Jumlah ruang kelas/ruang guru / gedung yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang kelas/ruang guru / gedung yang direhabilitasi (DAK) (Ruang)
59	Jumlah sekolah penerima rehabilitasi ruang kelas (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima rehabilitasi ruang kelas (Sekolah)
60	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (DAK) (Sekolah)
61	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (APBD) (Sekolah)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhabilitasi (APBD) (Sekolah)
62	Jumlah Luas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Meter)
63	Jumlah Luas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Meter)
64	Jumlah Sekolah TK dan KB Penerima Pengadaan Mobiler (Sekolah)	Jumlah Sekolah TK dan KB Penerima Pengadaan Mobiler (Sekolah)
65	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)
66	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)	Jumlah lembaga yang menerima perlengkapan PAUD (Lembaga)
67	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan (SPM) (Orang)	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan (SPM) (Orang)
68	Jumlah peserta Didik PAUD Yang menerima Biaya Personil (Anak)	Penurunan jumlah kasus pertumbuhan anak tidak normal (STUNTING) (Anak)
69	Jumlah PAUD Penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)	Jumlah PAUD Penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (PAUD)



70	Jumlah peserta kegiatan lomba kreatifitas (Lembaga)	Jumlah peserta kegiatan lomba kreatifitas (Lembaga)
71	Jumlah Lemgaga yang Mengikuti Gebyar PAUD (Lembaga)	Jumlah Lemgaga yang Mengikuti Gebyar PAUD (Lembaga)
72	Frekuensi pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Kali)	Waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Bulan)
73	Jumlah Desa/Kecamatan yang Mengikuti implemtasi Mandiri Belajar PAUD (Kecamatan)	Jumlah Desa/Kecamatan yang Mengikuti implemtasi Mandiri Belajar PAUD (Kecamatan)
74	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidkan PAUD (Sekolah)	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidkan PAUD (Sekolah)
75	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)
75	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Orang)	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Orang)
76	Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba bunda PAUD (kecamatan)	Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba bunda PAUD (kecamatan)
77	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)
78	Jumlah Pendidik Non ASN yang Menerima Gaji (Orang/Bulan)	Jumlah Pendidik Non ASN yang Menerima Gaji (Orang/Bulan)
79	Jumlah Operator yang tersedia di Satuan PAUD (Orang/Bulan)	Jumlah Operator yang tersedia di Satuan PAUD (Orang/Bulan)
80	Jumlah kepala sekolah PAUD (TK/KB/TPA/SPS) yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah kepala sekolah PAUD (TK/KB/TPA/SPS) yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
81	Jumlah tenaga pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SPS yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah tenaga pendidik PAUD (TK/KB/TPA/SPS yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)
82	Jumlah Penilik/Pengawas PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah Penilik/Pengawas PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
83	waktu Pengelolaan Sertifikasi	waktu Pengelolaan Sertifikasi Guru (Bulan)



	Guru (Bulan)	
84	Jumlah Peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (Orang)	Jumlah Peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum PAUD (Orang)
85	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba (Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini) (Lembaga)	Jumlah lembaga yang mengikuti lomba (Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini) (Lembaga)
86	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (Sekolah)	Jumlah sekolah Persiapan dan Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD (Sekolah)
87	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sarana dan Prasarana Satuan PAUD (Kali)	Waktu Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Sarana dan Prasarana Satuan PAUD (Bulan)
	Jumlah guru yang menerima DUPAK	
88	Jumlah lembaga sosialisasi Desa Mandiri Belajar PAUD (Lembaga)	Jumlah lembaga sosialisasi Desa Mandiri Belajar PAUD (Lembaga)
89	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)	Jumlah peserta Pembinaan PAUD holistik dan integratif (Orang)
90	Jumlah tenaga pendidik TK yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah tenaga pendidik TK yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi (Orang)
91	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Kegiatan)	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan Pokja Bunda PAUD Propinsi dan Pokja Bunda PAUD Pusat (Kegiatan)
92	Jumlah peserta lomba profil bunda PAUD kecamatan (Kecamatan)	Jumlah peserta lomba profil bunda PAUD kecamatan (Kecamatan)
93	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)	Jumlah pelaksanaan study wisata pada PAUD percontohan (Kali)
94	jumlah TK negeri penerima dana operasional rutin sekolah (TK)	jumlah TK negeri penerima dana operasional rutin sekolah (TK)
95	waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan akses pendidikan PAUD (Bulan)	waktu pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan akses pendidikan PAUD (Bulan)
96	Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD (Bulan)	Waktu pengelolaan Dana BOP DAK PAUD (Bulan)
97	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan BOP PAUD DAK Non Fisik (Lembaga)	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan BOP PAUD DAK Non Fisik (Lembaga)



98	Jumlah Sekolah yang menerima Penambahan Ruang Kelas Baru (Ruang)	Jumlah Sekolah yang menerima Penambahan Ruang Kelas Baru (Ruang)
99	Jumlah sekolah penerima penambahan Ruang Kelas Baru dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima penambahan Ruang Kelas Baru (DAK) (Ruang)
100	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DAK) (Ruang)
101	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK) (Ruang)
102	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK) (Ruang)
103	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK) (Sekolah)
104	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (APBD) (Sekolah)
105	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DAK) (Ruang)
106	Jumlah Ruang Kelas SD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah Ruang Kelas SD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
107	Jumlah ruang Kelas SD yang di rehabilitasi (Ruang)	Jumlah ruang Kelas SD yang di rehabilitasi (Ruang)
108	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
109	Jumlah Ruang Rehabilitasi Unit Kesehatan Sekolah di Rehabilitasi Sedang/Berat dan di biayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah Ruang Rehabilitasi Unit Kesehatan Sekolah di Rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)



110	Jumlah Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Perpustakaan Sekolah (DAK) dan di biyai oleh (Ruang)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Perpustakaan Sekolah (DAK) (Ruang)
111	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan di biyai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK) (Sekolah)
112	Jumlah sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)	Jumlah sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas (Sekolah)
113	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan di biyai oleh (DAK) (Unit)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DAK) (Unit)
114	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit)	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Unit)
115	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah dan di biyai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK) (Sekolah)
116	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (Sekolah)
117	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan (Sekolah)
118	Jumlah siswa penerima Pengadaan Perlengkapan (SPM) SD (Orang)	Jumlah siswa penerima Pengadaan Perlengkapan (SPM) SD (Orang)
119	Jumlah Luas Saranan, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter pemeliharaan Saranan, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Meter)
120	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi /Tidak Mampu Tingkat SD (Orang)	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi /Tidak Mampu Tingkat SD (Orang)
121	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)
122	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)
123	Jumlah paket Pengadaan Alat	Jumlah paket Pengadaan Alat Praktik dan



	Praktik dan Peraga Siswa (DAK) (Paket)	Peraga Siswa (DAK) (Paket)
124	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) SD (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) SD (Orang)
125	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah SD (Bulan)	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Naional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah SD (Bulan)
126	Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasana SD (Kali)	Waktu Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasana SD (Bulan)
127	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Dasar (Orang)	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Dasar (Orang)
128	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa SD (Orang)	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa SD (Orang)
129	Jumlah pelaksanaan kegiatan JAMNAS (Kali)	Jumlah pelaksanaan kegiatan JAMNAS (Kali)
130	Jumlah Peserta Lomba Siswa Berprestasi (Orang)	Jumlah Peserta Lomba Siswa Berprestasi (Orang)
131	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)
132	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan Peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti kegiatan Peningkatan kompetensi (Orang)
133	Jumlah kepala sekolah SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah kepala sekolah SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
134	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
135	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SD (Orang)	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SD (Orang)
136	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SD (Orang)	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SD (Orang)
137	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti supervisi mutu	Jumlah Pengawas SD yang mengikuti supervisi mutu (Orang)



	(Orang)	
138	jumlah peserta lomba pengawas SD berprestasi (Orang)	jumlah peserta lomba pengawas SD berprestasi (Orang)
139	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SD (Orang)	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SD (Orang)
140	Jumlah peserta pendidik yang mengikuti pengembangan Karir di sekolah dasar (Peningkatan Kompetensi) (Orang)	Jumlah peserta pendidik yang mengikuti pengembangan Karir di sekolah dasar (Peningkatan Kompetensi) (Orang)
141	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti MBS SD (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti MBS SD (Orang)
142	Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa (Orang)	Jumlah siswa sekolah Dasar yang menerima Beasiswa (Orang)
143	Jumlah Ranperda yang diselesaikan tepat waktu (Ranperda)	Jumlah Ranperda yang diselesaikan tepat waktu (Ranperda)
144	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat kab. Wajo (Sekolah)	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat kab. Wajo (Sekolah)
145	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos Pusat) (Bulan)	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos Pusat) (Bulan)
146	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD (Bulan)	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD (Bulan)
147	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SD (Sekolah)	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SD (Sekolah)
148	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SD (Sekolah)	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SD (Sekolah)
149	Jumlah sekolah penerima penambahan runag kelas Baru dan dibiayai oleh (DAK) Ruang)	Jumlah sekolah penerima penambahan runag kelas Baru (DAK) Ruang)
150	Jumlah sekolah penambahan Ruang kelas Baru APBD (Ruang)	Jumlah sekolah penambahan Ruang kelas Baru APBD (Ruang)
151	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DAK) (Ruang)
152	Jumlah sekolah penerima	Jumlah sekolah penerima Pembangunan



	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAK) (Ruang)
153	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah (DAK) (Ruang)
154	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Laboratorium dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Laboratorium (DAK) (Ruang)
155	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DAK) (Ruang)
156	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK) (Sekolah)
157	Jumlah sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas APBD (Sekolah)	Jumlah sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas APBD (Sekolah)
158	Jumlah ruang gedung sekolah (ruang kepala sekolah / ruang tata usaha yang direhabilitasi sedang berat) dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang gedung sekolah (ruang kepala sekolah / ruang tata usaha yang direhabilitasi sedang berat) (DAK) (Ruang)
159	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang / berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang / berat (DAK) (Ruang)
160	Jumlah ruang Kelas SMP yang di rehabilitasi APBD (Ruang)	Jumlah ruang Kelas SMP yang di rehabilitasi APBD (Ruang)
161	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang guru yang direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
162	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (Ruang)
163	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
164	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang



	yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
165	Jumlah laboratorium (IPA dan Komputer) yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah laboratorium (IPA dan Komputer) yang direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
166	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula (Ruang)
167	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Unit)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Unit)
168	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet dan Ruang Ibadah) yang di rehabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas (Toilet dan Ruang Ibadah) yang di rehabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
169	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang)	Jumlah sekolah penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang)
170	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Mebeluer Sekolah (DAK) (Sekolah)
171	Jumlah sekolah penerima mobiler sekolah SMP APBD (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima mobiler sekolah SMP APBD (Sekolah)
172	Jumlah sekolah yang menerima perlengkapan Belajar (Sekolah)	Jumlah sekolah yang menerima perlengkapan (Sekolah)
173	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah menengah pertama (SPM) (Orang)	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa sekolah menengah pertama (SPM) (Orang)
174	Jumlah luas Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Meter)
175	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi dan Tidak Mampu Tingkat SMP (Orang)	Jumlah Siswa Penerima Penyediaan Beasiswa berprestasi dan Tidak Mampu Tingkat SMP (Orang)
176	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi PIP (Orang)
177	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia	Waktu Pelaksanaan Biaya Operasional Program Indonesia Pintar (Bulan)



	Pintar (Bulan)	
178	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (DAK) (Sekolah)
179	Jumlah siswa penerima Perlengkapan Belajar (Orang)	Jumlah siswa penerima Perlengkapan Belajar (Orang)
180	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lab. IPA, TIK, dan Media Pendidikan) dan dibiayai oleh (DAK) (Sekolah)	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lab. IPA, TIK, dan Media Pendidikan) (DAK) (Sekolah)
181	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) (Orang)
182	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah (Orang)	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Asemen Nasional (AN) /AKM (Asemen Kompetensi Minimal) Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Ujian Sekolah (Orang)
183	Waktu Monitoring keterlaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMP (Bulan)	Waktu Monitoring keterlaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan SMP (Bulan)
184	Waktu pelaksanaan PPDB Online (Bulan)	Waktu pelaksanaan PPDB Online (Bulan)
185	Frekuensi Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SMP (kali)	Waktu Pendataan dan Survei Sarana Dan Prasarana SMP (Bulan)
186	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Menengah (Orang)	Jumlah peserta Sosialisasi Program DAK Bidang Pendidikan Menengah (Orang)
187	Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP (Orang)	Jumlah Siswa yang mengikuti minat bakat dan kreatifitas SMP (Orang)
188	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)	Jumlah peserta Kompetensi sains Nasional (KSN), Kompetensi Olahraga Siswa Nasional (KONS), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) (Orang)
189	Jumlah peserta lomba siswa berprestasi SMP (Orang)	Jumlah peserta lomba siswa berprestasi SMP (Orang)
190	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka (orang)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pramuka (orang)
191	Jumlah peserta pelatihan UKS	Jumlah peserta pelatihan UKS SMP



	SMP (Orang)	(Orang)
192	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP (Orang)	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Narkoba/ HIV Tingkat SMP (Orang)
193	Jumlah peserta LDK OSIS SMP (Orang)	Jumlah peserta LDK OSIS SMP (Orang)
194	Jumlah kepala sekolah SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah kepala sekolah SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
195	Jumlah Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Orang)	Jumlah Pendidik yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (Orang)
196	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
197	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SMP (Orang)	jumlah Pengelola perpustakaan yang mengikuti peningkatan kompetensi SMP (Orang)
198	jumlah Pengelola Lab. Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	jumlah Pengelola Lab. Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)
199	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SMP (Orang)	Jumlah peserta lomba kepala sekolah berprestasi SMP (Orang)
200	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SMP (Orang)	Jumlah peserta lomba guru berprestasi SMP (Orang)
201	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti supervisi mutu (Orang)	Jumlah Pengawas SMP yang mengikuti supervisi mutu (Orang)
202	jumlah peserta lomba pengawas SMP berprestasi (Orang)	jumlah peserta lomba pengawas SMP berprestasi (Orang)
203	Jumlah siswa sekolah Menengah pertama dan Mahasiswa yang menerima Beasiswa (Orang)	Jumlah siswa sekolah Menengah pertama dan Mahasiswa yang menerima Beasiswa (Orang)
204	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan kompetensi tenaga pendidik SMP (Orang)	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan kompetensi tenaga pendidik SMP (Orang)
205	Waktu Belanja Rutin SMPN (Bulan)	Waktu Belanja Rutin SMPN (Bulan)
206	Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS SMP	Jumlah Lembaga Pendidikan yang menerapkan MBS SMP
207	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMP (Bulan)	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMP (Bulan)



208	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bos Pusat) SMP (Bulan)	Waktu Penyediaan Operasional Manajemen Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bos Pusat) SMP (Bulan)
209	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SMP (Sekolah)	Jumlah Sekolah Penerima BOSDA SMP (Sekolah)
210	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SMP (Sekolah)	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat SMP (Sekolah)
211	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan (DAK) (Ruang)
212	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)	Jumlah sekolah penerima Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAK) (Lembaga)
213	Jumlah ruang praktik/ gedung Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah ruang praktik/ gedung Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhabilitasi Sedang/Berat (DAK) (Ruang)
214	Jumlah sekolah penerima ehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dan dibiayai oleh (DAK) (Ruang)	Jumlah sekolah penerima ehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAK) (Ruang)
215	Jumlah Luas sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dipelihara (Meter)	Jumlah Meter Pemeliharaan Rutin sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan (Meter)
216	Jumlah Lembaga (SKB/PKBM) penerima pengadaan Mobiler dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)	Jumlah Lembaga (SKB/PKBM) penerima pengadaan Mobiler dan dibiayai oleh (DAK) (Lembaga)
217	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa (SPM) (Orang)	Jumlah siswa yang menerima perlengkapan siswa (SPM) (Orang)
218	Jumlah Peserta penerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Orang)	Jumlah Peserta penerima Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Orang)
219	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah penerima Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan (DAK) (Lembaga)



	Nonformal/Kesetaraan (DAK) (Lembaga)	
220	Jumlah peserta didik Keaksaraan (Orang)	Jumlah peserta didik Keaksaraan (Orang)
221	Jumlah peserta PKBM pendidikan kecakapan hidup (orang)	Jumlah peserta PKBM pendidikan kecakapan hidup (orang)
222	Frekuensi Pendataan Penuntasan Buta Aksara (Kali)	Waktu Pendataan Penuntasan Buta Aksara (Bulan)
223	Jumlah Peserta Kegiatan PKBM (PKBM)	Jumlah Peserta Kegiatan PKBM (PKBM)
224	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kali)	Waktu Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Bulan)
225	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)
226	Waktu operasional rutin SKB (Bulan)	Waktu operasional rutin SKB (Bulan)
227	Waktu pelaksanaan BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Bulan)	Waktu pelaksanaan BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Bulan)
228	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Akreditasi satuan pendidikan SKB (Lembaga)	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Akreditasi satuan pendidikan SKB (Lembaga)
229	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Pendirian satuan pendidikan PKBM (Lembaga)	Jumlah Kegiatan Persiapan dan Pendirian satuan pendidikan PKBM (Lembaga)
230	Frekuensi Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (Kali)	Waktu Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (Bulan)
231	Jumlah Lembaga penerima BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Lembaga)	Jumlah Lembaga penerima BOP DAK Non Fisik Kesetaraan (Lembaga)
232	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	Jumlah Kompetensi Dasar yang tersusun Mata Pelajaran Muatan Lokal yang telah tersusun
233	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	Jumlah Silabus pada mata pelajaran Muatan Lokal yang telah disusun
234	Jumlah PTK yang telah mengikuti Pelatihan	Jumlah PTK yang telah mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mata Pelajaran



	Penyusunan Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	Muatan Lokal
235	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	Jumlah Kompetensi Dasar yang tersusun Mata Pelajaran Muatan Lokal yang telah tersusun
236	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti Penyusunan Silabus dalam Mata Pelajaran Muatan Lokal (Orang)	Jumlah Silabus pada mata pelajaran Muatan Lokal yang telah disusun
237	Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang sudah terpetakan dengan baik	Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang sudah terpetakan dengan baik
238	Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang telah ditata dan didistribusikan dengan baik ke satuan pendidikan dan lembaga	Persentase Jumlah PTK pada Jenjang (SMP, SD, TK, PAUD dan PNF) yang telah ditata dan didistribusikan dengan baik ke satuan pendidikan dan lembaga
239	Persentase Jumlah Pengusulan perizinan pendirian PAUD dan PNF dengan kategori layak	Persentase Jumlah Pengusulan perizinan pendirian PAUD dan PNF dengan kategori layak
240	Frekuensi pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (Kali)	Jumlah pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (Kali)
241	Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Pelestarian Lagu-lagu Daerah (Orang)	Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan Pelestarian Lagu-lagu Daerah (Orang)
242	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kesenian (Kecamatan)	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kesenian (Kecamatan)
243	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Objek)
244	Jumlah Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya (Kali)	Jumlah Pemberian Dukungan, penghargaan dan kerjasama di Bidang Budaya (Kali)
245	jumlah peserta gita bahana nusantara (Orang)	jumlah peserta gita bahana nusantara (Orang)
246	jumlah Peserta festival pelajar (Orang)	jumlah Peserta festival pelajar (Orang)
247	jumlah peserta pagelaran budaya daerah (sanggar seni)	jumlah peserta pagelaran budaya daerah (sanggar seni)



248	jumlah peserta bahana ekspresi pelajar (Orang)	jumlah peserta bahana ekspresi pelajar (Orang)
249	Jumlah Peserta Pagelaran Kesenian Tradisional Tingkat SMP Sederajat (Orang)	Jumlah Peserta Pagelaran Kesenian Tradisional Tingkat SMP Sederajat (Orang)
250	Jumlah Peserta Lomba Lagu Daerah Tingkat PAUD, SD dan SMP (Orang)	Jumlah Peserta Lomba Lagu Daerah Tingkat PAUD, SD dan SMP (Orang)
251	jumlah peserta lomba cerita rakyat (Orang)	jumlah peserta lomba cerita rakyat (Orang)
252	Frekuensi Pelaksanaan Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah (Bulan)	Waktu Pelaksanaan Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah (Bulan)
253	Jumlah Perda Pemajuan Budaya yang disusun (Perda)	Jumlah Perda Pemajuan Budaya yang disusun (Perda)
254	Frekuensi pelaksanaan Pekan Raya Sulawesi selatan (Kali)	Jumlah pelaksanaan Pekan Raya Sulawesi selatan (Kali)
255	Frekuensi pelaksanaan Festival keraton Nusantara (Kali)	Jumlah pelaksanaan Festival keraton Nusantara (Kali)
256	Frekuensi pelaksanaan Pekan Budaya Nasional (Kali)	Jumlah pelaksanaan Pekan Budaya Nasional (Kali)
257	jumlah peserta seminar budaya (Orang)	jumlah peserta seminar budaya (Orang)
258	jumlah peserta pekan budaya daerah (Orang)	jumlah peserta pekan budaya daerah (Orang)
259	Jumlah Buku Sejarah Lokal yang diterbitkan (Eksampler)	Jumlah Buku Sejarah Lokal yang diterbitkan (Eksampler)
260	Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Orang)	Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (Orang)
261	Jumlah buku Kapita Selecta Sejarah Sul-sel dan Buku Kapita Selecta Kebudayaan Su-sel yang di cetak (Eksampler)	Jumlah buku Kapita Selecta Sejarah Sul-sel dan Buku Kapita Selecta Kebudayaan Su-sel yang di cetak (Eksampler)
262	jumlah penambahan cagar budaya yang baru diregistrasi	jumlah cagar budaya yang diregistrasi (Cagar Budaya)
263	jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)	jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)
264	jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)	jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)
265	Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)
266	jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)	jumlah cagar budaya yang direvitalisasi (Situ Cagar)
267	Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)	Jumlah Peserta Sosialisasi Cagar Budaya (Orang)



268	Jumlah Cagar Budaya yang didata (Cagar Budata)	Waktu Pedataan Cagar Budaya (Bulan)
269	Jumlah Modul Cagar Budaya yang dibuat (Modul)	Jumlah Modul Cagar Budaya yang dibuat (Modul)
270	jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan (Cagar Budaya)	jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan (Cagar Budaya)
271	jumlah Objek museum yang dikoleksi (Objek)	jumlah Objek museum yang dikoleksi (Objek)
272	Jumlah SDM Permuseuman yang dilatih (Orang)	Jumlah SDM yang dilatih
273	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan Akses terhadap Museum (Orang)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan
274	Jumlah sarana dan prasarana Museum yang dipelihara (Buah)	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara





BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019- 2024, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023 , serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kabupaten Wajo.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Drs. FAISAL
NIP. 19650712 199003 1 015
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Berdasar SK Bupati Nomor : 821.22/1950/Tahun 2020
Tanggal : 8 Juli 2020
Bertugas untuk dan atas nama : Kepala Dinas
Dinas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berkedudukan di Jalan (Alamat Kantor) : Jl. Jendral Akhmad Yani No. 27
Sengkang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sengkang, 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Drs. FAISAL

NIP. 19650712 199303 1 005





BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 501 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2019-2024

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu persiapan penyusunan Renstra dalam hal penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Wajo Nomor 388 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024, perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

h

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

h

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

b

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

W

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

h

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 29);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

4

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Lembaran Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 114);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);
 38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 121);
 39. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pedoman Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Wajo Nomor 388 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang,
pada tanggal 5 Juli 2021

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDELMIRA RAJAWATI S.N.
NIP. 19640115 200304 2 010


BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Tembusan:

1. Ketua DPRD Wajo, di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo di Sengkang;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

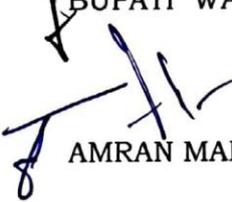
LAMPIRAN
KEPUTUBAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2019-
2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2019-2024

- Ketua** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- Wakil Ketua** : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 5. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 6. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 7. Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Wajo;
 8. Muh. Darwis, S.Pd., M.SI
 9. Drs. Muhammad Asse, M.M
 10. Drs. Umar Muhadi, MM
 11. Andi Syahrudin AM, S.IP., M.SI
 12. Muhammad Anis Sultan, S. Sos
 13. Muhammad Nasir

13

14. Andi Sulfiati, A.Md
15. Nursiah Nori
16. Asriani, S. Sos
17. Asmidar, SE
18. Astry Ameliah Wahda, ST
19. Rusdi Rahma, S.Pd
20. Chaeril Herman, S. Sos
21. Asti Wulandari AU, S.AP
22. Gusnitasari Nawir, S. Sos

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDIE M. FAJAR KUSUMA, S.H.
N.P. 19840118 200604 2 010

